

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik

Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh disusun sebagai pertanggungjawaban organisasi kepada pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Proses penyusunan laporan akuntabilitas ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

Landasan penyusunan laporan ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017, dengan menyajikan analisa antara target dan realisasi atas indikator kinerja yang menjadi fokus kerja Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2016. Sampai dengan Desember 2016, secara umum kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh yang diukur melalui realisasi indikator kinerja telah memenuhi target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Banda Aceh melihat, setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target indikator kinerja yang ada sebagai media evaluasi sebagai pemicu peningkatan kinerja ke depan.

Kami berharap laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2016 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Banda Aceh, _____ Maret 2017 M
Jumadil Akhir 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH

**Hj. ILLIZA SAÁDU Hj. ILLIZA SAÁDUDDIN
DJAMAL, SE**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Daerah	2
1.2.1 Letak Wilayah Geografis dan Luas Wilayah	2
1.2.2 Demografi	3
1.2.3 Perekonomian Daerah	5
1.2.4 Struktur Pemerintahan.....	13
1.2.5 Aparatur Pemerintahan	16
1.3. Sistematika Penyajian	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
2.1 Rencana Strategis 2012-2017.....	20
2.1.1 Visi dan Misi	21
2.1.2 Tujuan dan Sasaran	22
2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	24
2.1.4 Indikator Kinerja	27
2.2 Perjanjian Kinerja 2016.....	32
2.3 Rencana Anggaran Tahun 2016.....	43
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja.....	45
3.1.1. Analisis Capaian Kinerja	51
3.2 Akuntabilitas Keuangan	134
3.2.1 Realisasi Anggaran Sasaran Strategis	135
3.2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	136
BAB IV PENUTUP	142

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 1.1. Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan di Kota Banda Aceh	2
Tabel 1.2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan.....	4
Tabel 1.4. Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh, 2014 - 2016	6
Tabel 1.5. Struktur PDRB Kota Banda Aceh, 2014 - 2016	7
Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh 2014 - 2016	8
Tabel 1.7. PDRB Perkapita Kota Banda Aceh, 2014– 2016.....	9
Tabel 1.8. Inflasi Bulanan Kota Banda Aceh Tahun 2016	10
Tabel 1.9. Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi, 2014-2016	12
Tabel 1.10. Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jabatan	16
Tabel 1.11. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	17
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Daerah	27
Tabel 2.2. Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016	44
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja	45
Tabel 3.2. Pencapaian IKU.....	46
Tabel 3.3. Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam Yang Ditangani Tahun 2016 .	54
Tabel 3.4. Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2016.....	74
Tabel 3.5. Peraturan Walikota Terkait Pelayanan Birokrasi Tahun 2016.....	79
Tabel 3.6. Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2016	80
Tabel 3.7. Jumlah Anggota Linmas per Kecamatan Tahun 2016.....	82
Tabel 3.8. Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2016.....	84
Tabel 3.9. Prosentase Partisipasi masyarakat dalam Pilchiksung Tahun 2016.....	86
Tabel 3.10. Fasilitas Kesehatan Kota Banda Aceh	104
Tabel 3.11. Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/poskesdes menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2016.....	105
Tabel 3.12. Program, Kegiatan dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2016.....	135
Tabel 3.13. Tabel Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2016.....	138
Tabel 3.14. Tabel Rincian Belanja Daerah Tahun 2016.....	139
Tabel 3.15. Tabel Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2016	140
Tabel 3.16. Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2016.....	140

Daftar Gambar

	Halaman
Gambar 1.1. Batas Administrasi Kota Banda Aceh.....	3
Gambar 1.2. Alur Penyusunan LAKIP Kota Banda Aceh Tahun 2016.....	18

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 1.1. Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2016.....	6
Grafik 1.2. Pendapatan Perkapita Kota Banda Aceh, 2014 - 2016.....	9
Grafik 1.3. Laju Inflasi Kota Banda Aceh (%) Tahun 2016	11
Grafik 1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh, 2013 – 2015 ..	11
Grafik 3.1. Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama	50
Grafik 3.2. Perbandingan Capaian Kinerja, 2013 - 2016	51
Grafik 3.3. Penerimaan ZIS Kota Banda Aceh, 2012-2016.....	62
Grafik 3.4. PAD Kota Banda Aceh, 2013-2016	75
Grafik 3.5. Sarana Penangkapan Ikan di Kota Banda Aceh	96
Grafik 3.6. Produksi Perikanan tahun 2012-2016.....	98
Grafik 3.7. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	103
Grafik 3.8. Jumlah Bangunan Sesuai RTRW, 2012-2016	114
Grafik 3.9. Jumlah Bangunan ber-IMB 2012-2016.....	116
Grafik 3.10. Jumlah Penumpang Pelabuhan Ulee Lheue, 2012-2016	121
Grafik 3.11. Jumlah Kasus Permasalahan Lingkungan yang Ditangani, 2012-2016....	123
Grafik 3.12. Kunjungan Wisatawan ke Kota Banda Aceh 2012-201.....	128

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2016 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD revisi Kota Banda Aceh periode 2012-2017, yang ditetapkan berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2016. Dalam mewujudkan visi Kota Banda Aceh “Banda Aceh Model Kota Madani” ditetapkan 7 misi, 10 tujuan dan 21 sasaran.

Selama tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2016 adalah sebesar **103,53 %** dengan kategori **sangat baik**, diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 62 (enam puluh dua) indikator kinerja, sebagai berikut :

- ❑ Misi I terdapat 2 tujuan, 3 sasaran dan 9 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
8 indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 1 indikator kinerja tidak dilakukan perhitungan yaitu Meningkatnya Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi disebabkan tahun 2016 tidak ada penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi.
- ❑ Misi II terdapat 2 tujuan, 6 sasaran dan 15 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
15 indikator kinerja dengan kategori sangat baik.
- ❑ Misi III terdapat 1 tujuan, 5 sasaran dan 14 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
9 indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 1 indikator kinerja dengan kategori baik, 3 indikator kinerja dengan kategori cukup dan 1 indikator kinerja dengan kategori kurang.
- ❑ Misi IV terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 6 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
5 indikator kinerja dengan kategori sangat baik, 1 indikator kinerja tidak dilakukan perhitungan yaitu Peringkat Kelulusan Tk. Nasional disebabkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus perangkan hasil ujian nasional secara nasional.
- ❑ Misi V terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 15 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
15 indikator kinerja dengan kategori sangat baik.
- ❑ Misi VI terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
1 indikator kinerja dengan kategori sangat baik.

- ❑ Misi VII terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja, dengan rincian sbb :
2 indikator kinerja dengan kategori sangat baik.

Berdasarkan rincian diatas, dapat disimpulkan dari 62 (enam puluh dua) indikator kinerja terdapat 55 indikator kinerja dengan kategori sangat baik (skala >85), 1 indikator kinerja dengan kategori baik (skala 70-85), 3 indikator kinerja dengan cukup (skala 55-69), 1 indikator kinerja dengan kategori kurang (skala <55), dan 2 indikator kinerja tidak dilakukan perhitungan. Dari keseluruhan ukuran kinerja, ada beberapa indikator kinerja yang mengalami peningkatan, cenderung *stagnan* ataupun mengalami penurunan.

Sedangkan dari perspektif penyerapan anggaran, realisasi belanja daerah Kota Banda Aceh tahun 2016 setelah perubahan mencapai 95,88% atau sebesar Rp. 1.321.564.179.318,- dari jumlah belanja daerah Rp. 1.378.366.044.234,-.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penilaian kinerja merupakan salah satu instrumen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak pada pelaksanaan Good Governance. Perhatian terhadap kinerja menjadi sangat penting karena penilaian kinerja yang erat dengan akuntabilitas publik dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah. Melalui Penilaian kinerja diharapkan adanya transparansi dalam menyediakan informasi dalam penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), menyatakan bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Kebijakan ini mengamanatkan setiap instansi pemerintah/lembaga negara yang dibiayai anggaran negara wajib menyusun Laporan akuntabilitas kinerja. Laporan ini merinci pertanggungjawaban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 mendefinisikan Akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka mengimplementasikan Instruksi Presiden tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh menyusun LAKIP. LAKIP tersebut dimaksudkan untuk menjadi sarana utama akuntabilitas publik yang dapat mengungkapkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Landasan penyusunan LAKIP Kota Banda Aceh adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Kota Banda Aceh Tahun 2016 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Laporan ini menggambarkan pencapaian kinerja yang memuat informasi mengenai pencapaian sasaran strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM). Pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 yang merupakan tahun keempat RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017. Dengan kata lain LAKIP merupakan instrumen yang menjadi tolok ukur sejauh mana pencapaian pelaksanaan RPJM Kota Banda Aceh 2012-2017.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAKIP tingkat pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Presiden melalui Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2 Gambaran Umum Daerah

Bagian ini menguraikan mengenai Aspek Geografis, Demografi, Perekonomian Daerah dan Struktur Pemerintahan.

1.2.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kota Banda Aceh merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh yang terletak diantara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, dengan tinggi rata-rata diatas permukaan laut 0,80 meter, dengan luas wilayah ± 61,36 km², yang terdiri dari 9 kecamatan dan 90 gampong (desa).

Tabel 1.1
Luas dan Persentase Wilayah Kecamatan
di Kota Banda Aceh

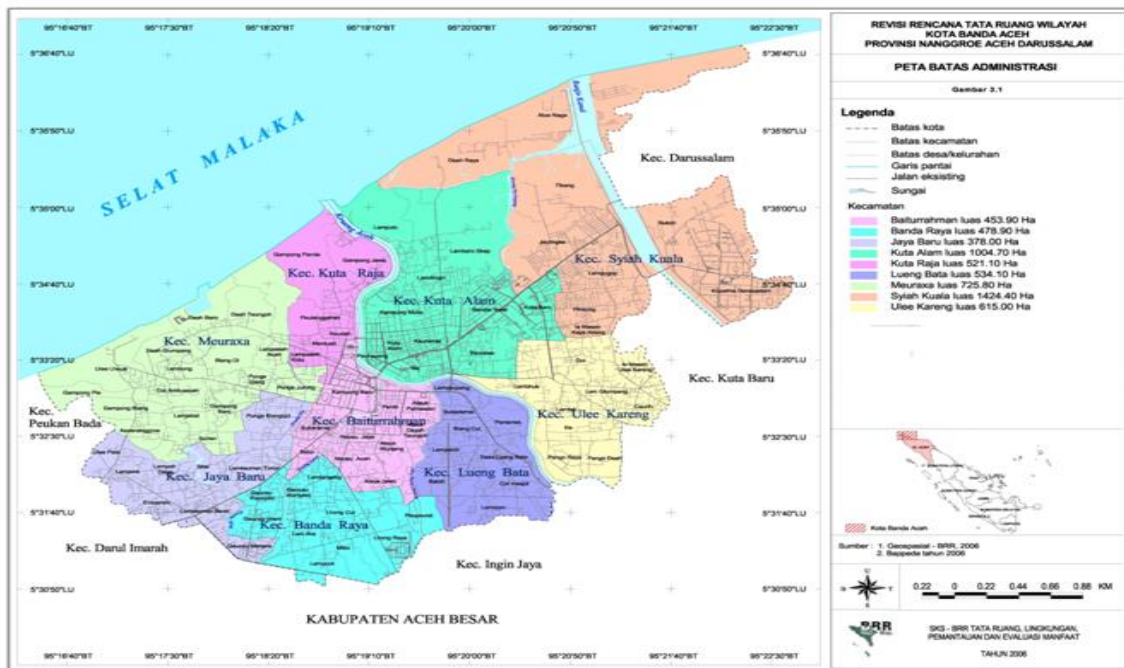
No.	Kecamatan	Luas	
		(Km ²)	Persentase
1.	Kecamatan Meuraxa	7,26	11,83
2.	Kecamatan Baiturrahman	4,54	7,40
3.	Kecamatan Kuta Alam	10,05	16,38
4.	Kecamatan Syiah Kuala	14,24	23,21
5.	Kecamatan Ulee Kareng	6,15	10,02
6.	Kecamatan Banda Raya	4,79	7,81
7.	Kecamatan Kuta Raja	5,21	8,49
8.	Kecamatan Lueng Bata	5,34	8,70
9.	Kecamatan Jaya Baru	3,78	6,16
Jumlah		61,36	100,00

Sumber : Statistik Banda Aceh 2016, BPS Kota Banda Aceh

Secara administratif Kota Banda Aceh mempunyai batas wilayah, sbb :

- ➡ Utara : Selat Malaka
- ➡ Selatan : Kabupaten Aceh Besar (Kec. Darul Imarah dan Kec. Ingin Jaya)
- ➡ Barat : Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Peukan Bada)
- ➡ Timur : Kabupaten Aceh Besar (Kec. Barona Jaya dan Kec. Darussalam)

Gambar 1.1. Batas Administrasi Kota Banda Aceh



Sumber : RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017

1.2.2 Demografi

Penduduk sebagai salah satu komponen dalam sistem perwilayahan memiliki peranan yang penting sebagai subyek pemanfaat ruang. Selain sebagai pemanfaat ruang, penduduk juga memainkan peranan sebagai pelaku perubahan ruang. Oleh karena itu, dinamika kependudukan memiliki peranan yang penting bagi perkembangan suatu wilayah yang dinamis.

Sebagai subyek pembangunan, sumber daya kependudukan merupakan faktor kunci dalam menjalankan roda pembangunan. Semakin tinggi kualitas sumber daya kependudukan, semakin berkualitas pulalah hasil pembangunan yang dicapai. Sedangkan sebagai obyek pembangunan, sumber daya kependudukan juga perlu mendapat perhatian, perbaikan, serta ditingkatkan kapasitas dan kualitasnya agar pembangunan fisik dan non fisik dapat berjalan seimbang.

Kota Banda Aceh sebagai ibukota provinsi Aceh memiliki karakteristik penduduk yang heterogen. Fungsi kota sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pendidikan

menjadikan Kota Banda Aceh sebagai daerah tujuan bagi penduduk sekitar Banda Aceh maupun daerah lainnya dari dalam maupun luar Aceh.

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebanyak 273.951 jiwa, yang terdiri atas 141.222 laki-laki dan 132.729 perempuan yang tersebar pada 9 kecamatan, dengan sex ratio 106,40 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Kecamatan Baiturrahman	19.386	18.408	37.794	105,31
2.	Kecamatan Kuta Alam	27.880	25.615	53.495	108,84
3.	Kecamatan Meuraxa	11.695	10.480	21.026	111,59
4.	Kecamatan Syiah Kuala	20.258	19.391	39.649	104,47
5.	Kecamatan Lueng Bata	14.084	13.364	27.448	105,39
6.	Kecamatan Kuta Raja	7.535	6.695	14.230	112,55
7.	Kecamatan Banda Raya	12.447	12.288	24.735	101,29
8.	Kecamatan Jaya Baru	14.086	13.171	27.257	106,95
9.	Kecamatan Ulee Kareng	13.851	13.317	27.168	104,01
JUMLAH		141.222	132.729	273.951	106,40

Sumber : Profil Perkembangan Penduduk Kota Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2016

Dengan luas wilayah 61,36 Km², Kota Banda Aceh yang didiami oleh 273.951 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk setiap Km² sebesar 4.465 jiwa/ Km².

Dari segi tingkat pendidikan penduduk Kota Banda Aceh, jenjang pendidikan SLTA/ sederajat merupakan yang paling tinggi mencapai 49,37% atau 94.011 orang dari total 190.416 penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan, diikuti penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV (D-IV) sebanyak 31.666 orang atau sekitar 16,63%.

Tabel 1.3
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi

Gol Umur	Tamat SD	SLTP	SLTA	D-II	AKADEMI / D-III/ SARJANA MUDA	D-IV/ S1	S2	S3	TOTAL
0 – 4									0
5 – 9	24	2							26
10 – 14	990	398	6						1394

Gol Umur	Tamat SD	SLTP	SLTA	D-II	AKADEMI / D-III/ SARJANA MUDA	D-IV/ S1	S2	S3	TOTAL
15 – 19	3820	3568	2840	3	3	4			10238
20 – 24	1530	6201	12064	64	446	448	6		20759
25 – 29	672	2492	20682	910	2600	4656	186	7	32205
30 – 34	904	2636	15677	1344	3165	7537	518	17	31798
35 – 39	993	2437	11379	679	1945	5484	609	31	23557
40 – 44	822	2076	9532	395	1288	3962	739	65	18879
45 – 49	854	1515	7600	317	915	3307	601	93	15202
50 – 54	1162	1460	5254	256	673	2636	520	97	12058
55 – 59	1237	1401	3560	212	385	1808	380	59	9042
60 – 64	1033	1028	2296	132	245	919	247	29	5929
65 – 69	795	746	1456	82	180	492	115	17	3883
70 – 74	723	509	867	43	120	277	52	8	2599
75+	1217	545	798	30	72	136	30	19	2847
Jumlah	16776	27014	94011	4467	12037	31666	4003	442	190416

Sumber : Profil Perkembangan Penduduk Kota Banda Aceh, Disdukcapil Kota Banda Aceh, 2016

1.2.3 Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Indikator yang dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat pertumbuhan perekonomian makro adalah Produk Domestik Regional Brutto (PDRB), Sumbangan Sektor, Pendapatan Perkapita, Inflasi, IPM, dan Investasi.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banda Aceh yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam

menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi pada daerah-daerah di seluruh Indonesia, termasuk Kota Banda Aceh. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banda Aceh pada tahun 2015 atas dasar harga konstan sebesar 12.725.924,1 (juta rupiah), mengalami peningkatan pertumbuhan dari 5,01 persen dari tahun 2014 dan tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh diproyeksikan sebesar 13.375.000 (juta rupiah) atau diproyeksikan meningkat sebesar 5,10 persen.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kota Banda Aceh atas dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai 13.647.523,9 (juta rupiah) atau 8,5 persen, pada tahun 2015 pertumbuhan melambat sekitar 14.741.869.5 (juta rupiah) atau 8,02 persen, begitu juga dengan tahun 2016 diproyeksikan melambat yang berkisar 15.670.000 (juta rupiah) atau 6,3 persen. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 1.4

Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh, 2014 - 2016

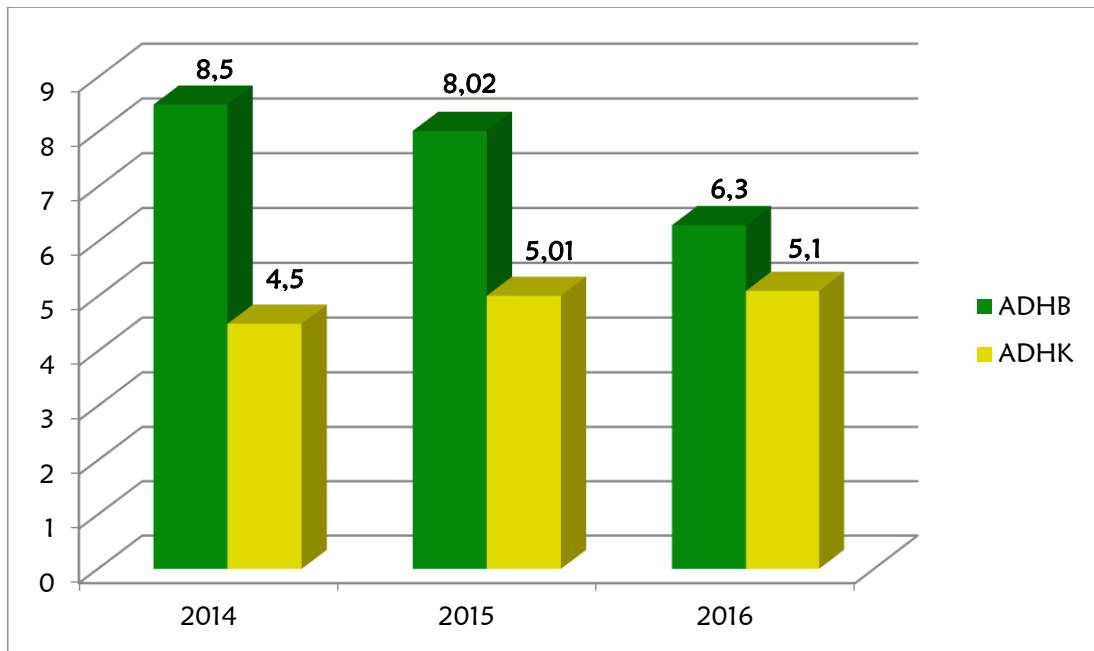
Tahun	PDRB ADHB (JutaRp)	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK (JutaRp)	Pertumbuhan (%)
1	2	3	4	5
2014	13.647.523	8,5	12.119.047	4,50
2015	14.741.869	8,02	12.725.924	5,01
2016*	15.670.000	6,3	13.375.000	5,10

Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

*) Tahun 2016 angka proyeksi

Grafik 1.1

Pertumbuhan PDRB Kota Banda Aceh Tahun 2014 - 2016



Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

*) Tahun 2016 angka proyeksi

B. Sumbangan Sektoral

Struktur ekonomi Kota Banda Aceh dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor dalam sumbangannya terhadap PDRB seluruhnya. Kontribusi sektor pembentuk PDRB tahun 2016 di Kota Banda Aceh diproyeksi tidak mengalami perubahan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan nilai kontribusi terbesar bagi perekonomian Kota Banda Aceh sebesar 21,71 persen, diikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 19,68 persen.

Struktur ekonomi Kota Banda Aceh tahun 2014 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 1.5
Struktur PDRB Kota Banda Aceh, 2014 - 2016

No	Sektor	2014	2015	2016*
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	118.948,4	123.626,9	129.718,6
2	Pertambangan dan Penggalian	0,0	0,0	0,0
3	Industri Pengolahan	254.139,0	263.261,8	276.234,1
4	Pengadaan Listrik dan Gas	40.952,5	40.802,1	42.812,7
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.615,1	11.492,7	12.059,0
6	Konstruksi	874.192,1	1.000.391,6	1.049.686,4
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.672.562,1	2.763.488,9	2.899.661
8	Transportasi dan Pergudangan	1.807.892,5	1.833.657,4	1.924.011,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	326.888,8	358.122,2	375.768,8
10	Informasi dan Komunikasi	1.093.525,3	1.112.387,4	1.167.200,8
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	311.750,4	320.492,1	336.284,3
12	Real Estate	692.403,3	752.913,4	790.013,6
13	Jasa Perusahaan	270.352,6	279.812,4	293.600,3
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.363.106,5	2.504.665,2	2.628.083,8
15	Jasa Pendidikan	660.937,6	693.918,9	728.112,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	415.021,1	448.064,3	470.142,9
17	Jasa lainnya	205.760,1	218.826,8	229.609,6
PDRB		12.119.047,3	12.725.924,1	13.352.999,1

Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

*) Tahun 2016 angka proyeksi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh pada tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sedangkan untuk tahun 2016 laju pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh berkisar 5,15 persen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Banda Aceh selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kota Banda Aceh
2014 - 2016

No	Lapangan Usaha	Pertumbuhan (%)		
		2014	2015	2016*
1	2	3	4	5
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.68	3,93	4,00
2	Pertambangan dan Penggalian			
3	Industri Pengolahan	5.05	3,59	3,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7.31	-0,37	-0,25
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.84	8,27	8,50
6	Konstruksi	-0.08	14,44	15,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.40	3,40	3,50
8	Transportasi dan Pergudangan	1.41	1,43	1,50
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10.08	9,55	10,00
10	Informasi dan Komunikasi	6.15	1,72	1,75
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	-3.43	2,80	2,85
12	<i>Real Estate</i>	8.48	8,74	8,75
13	Jasa Perusahaan	6.39	3,50	3,50
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.98	5,99	5,00
15	Jasa Pendidikan	5.90	4,99	5,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.83	7,96	8,00
17	Jasa lainnya	6.68	6,35	6,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,50	5,01	5,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		4,50	5,01	5,15

Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

*) Tahun 2016 angka proyeksi

C. Pendapatan Perkapita

Ukuran lain yang digunakan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah atau potensi ekonomi suatu daerah adalah besaran PDRB Per-Kapita Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB per-kapita merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi, dapat pula dijadikan gambaran kasar dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah. Gambaran kemakmuran tersebut dikatakan kasar karena pada kenyataannya produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk wilayah yang bersangkutan.

Data Pendapatan Per-Kapita Penduduk Kota Banda Aceh menunjukkan pertumbuhan yang positif. PDRB Per-Kapita Kota Banda Aceh tahun 2015 sebesar Rp 58.788.748, terjadi peningkatan 8,65% bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 54.108.433 Sedangkan untuk tahun 2016 diproyeksikan mencapai Rp. 61.067.810.

Pendapatan Per-Kapita Penduduk Kota Banda Aceh Tahun 2014-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

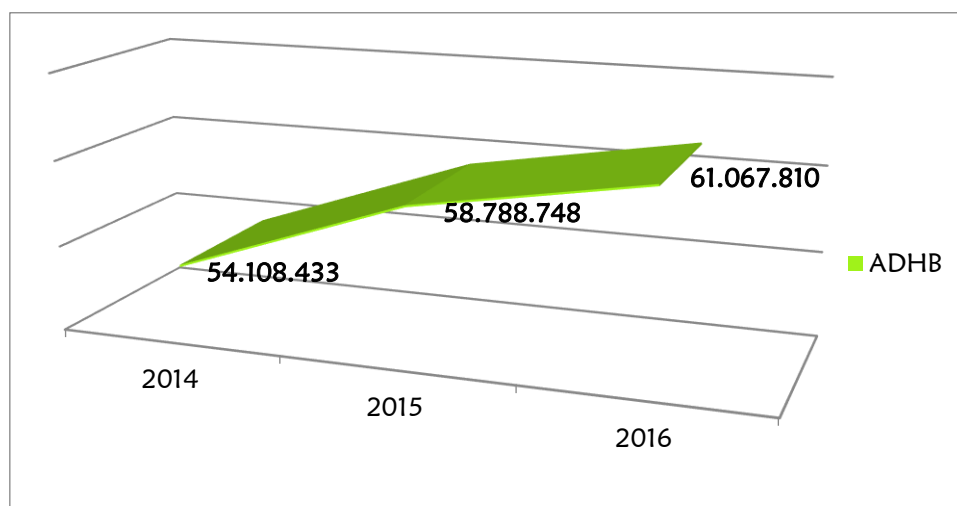
Tabel 1.7
PDRB Perkapita Kota Banda Aceh, 2014– 2016

Tahun	ADHB (Rp)	ADHK (Rp)
1	2	3
2014	54.108.433	48.497.188
2015	58.788.748	50.758.481
2016*	61.067.810	52.038.192

Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

*) Tahun 2016 angka proyeksi

Grafik 1.2
Pendapatan Perkapita Kota Banda Aceh, 2014 - 2016



Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

*) Tahun 2016 angka proyeksi

D. Inflasi

Inflasi adalah salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu wilayah atau daerah yang menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari Indeks Harga Konsumen (IHK). Angka inflasi juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat tingkat daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa terutama lapisan masyarakat berpenghasilan tetap.

Sepanjang tahun 2016, angka inflasi di Kota Banda Aceh terlihat cukup fluktuatif. Tercatat ada delapan kejadian inflasi dan empat kejadian deflasi di Kota Banda Aceh. Inflasi terjadi pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Juli, September, November dan

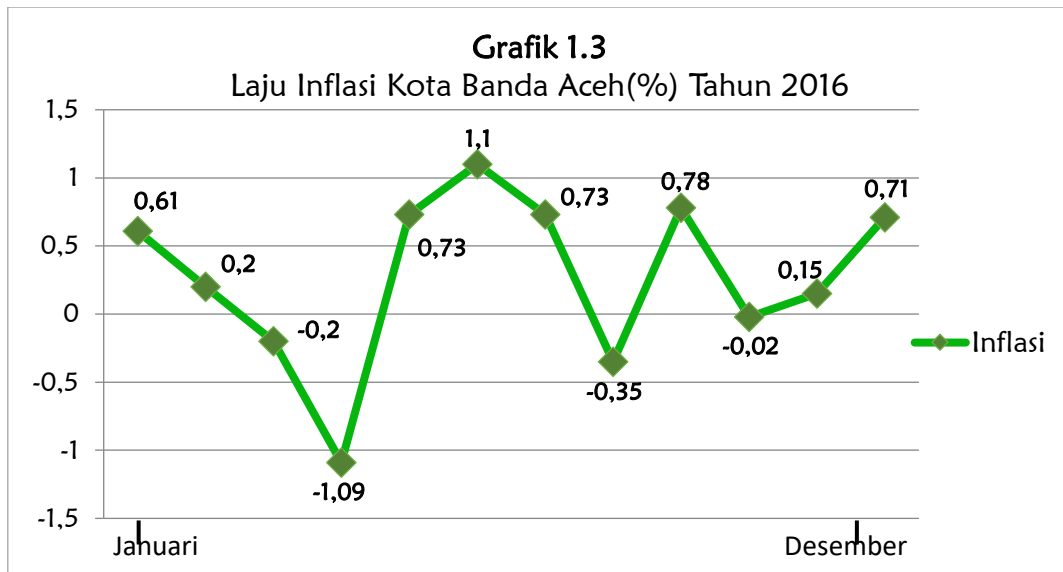
Desember. Pada bulan Juni, inflasi Kota Banda Aceh menunjukkan angka tertinggi, yaitu 1,10 persen dan Inflasi terendah terjadi pada bulan oktober yaitu 0,02 persen. Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh disebabkan oleh inflasi pada sejumlah Kelompok kebutuhan pokok. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar lainnya menyumbang inflasi yang besar di Kota Banda Aceh. Angka inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.8
Inflasi Bulanan Kota Banda Aceh Tahun 2016

Bulan	Inflasi (%)	Laju Inflasi	
		Tahun Kalender (%)	Tahun ke Tahun (%)
Januari	0,61	0,61	1,79
Februari	0,2	0,63	2,74
Maret	-0,2	0,37	3,10%
April	-1,09	-72%	1,90
Mei	0,73	0,00%	2,12%
Juni	1,10	1,10	2,01
Juli	0,73	1,84	1,84
Agustus	-0,35	1,48%	2,00
September	0,78	2,27%	3,17
Oktober	-0,02	2,25%	3,04%
November	0,15	2,41	2,97
Desember	0,71	3,13	3,13

Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian Kota Banda Aceh, 2016

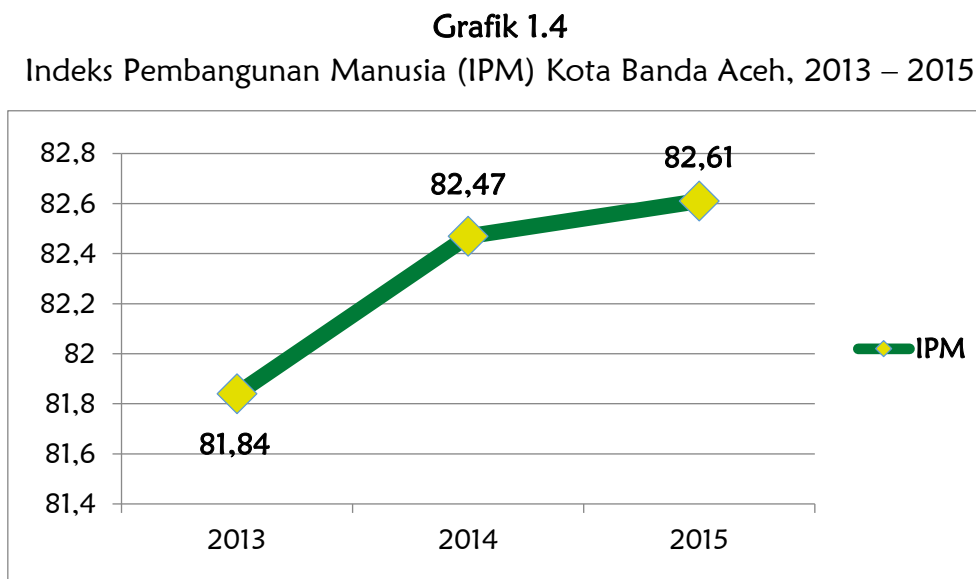
Laju inflasi tahun kalender Kota Banda Aceh berdasarkan perubahan IHK bulan Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015 untuk Kota Banda Aceh adalah sebesar 3,13 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berkisar 1,27 persen. Laju inflasi tertinggi selama tahun 2016 terjadi pada bulan Desember sebesar 3,13 persen. Terjadinya deflasi pada bulan Maret, April, Agustus dan Oktober telah menyebabkan laju inflasi pada empat bulan tersebut menurun. Laju inflasi Kota Banda Aceh Tahun 2016 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Bagian Administrasi Perekonomian Kota Banda Aceh, 2016

E. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu orientasi pembangunan di Kota Banda Aceh adalah pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan dengan cara terus meningkatkan program-program yang terkait dengan peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf, rasio lama sekolah, dan kemampuan daya beli masyarakat serta program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Hasil upaya tersebut digambarkan dalam perolehan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir terus meningkat, seperti terlihat pada grafik berikut :



Sumber : Statistik Banda Aceh, BPS Kota Banda Aceh, 2016

Indeks Pembangunan Manusia Kota Banda Aceh Tahun 2013 hingga tahun 2015 menunjukkan trend peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa taraf hidup masyarakat Kota Banda Aceh sudah semakin baik. Pada tahun 2013 angka IPM Kota Banda Aceh 81,84 persen, tahun 2014 mencapai 82,47 persen dan tahun 2014 meningkat mencapai 82,61 persen.

F. Investasi

Investasi pada hakekatnya merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi merupakan pusat perdagangan di provinsi Aceh, sehingga pertumbuhan investasi di Kota Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya, walaupun tidak terlalu besar, mungkin hal ini dipengaruhi kebijakan dari Pemerintah Pusat yang mengatur bahwa untuk investasi 1 s/d 10 Milyar dikeluarkan izin prinsipnya di Kabupaten/Kota, sementara untuk 10 milyar ke atas dilakukan di Provinsi. Investor dan nilai investasi di Kota Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun terakhir

Tabel 1.9
Jumlah Investor PMDN/PMA dan Nilai Investasi, 2014-2016

Tahun	Investor		Nilai Investasi
	PMDN	PMA	
1	2	3	4
2014	3 Perusahaan	-	2.130.000.000
2015	2 Perusahaan	-	2.000.000.000
2016	11 Perusahaan	-	15.935.000.000

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, 2016

Tabel di atas menunjukkan nilai investasi di Kota Banda Aceh dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dari investor PMDN meningkat baik jumlah investor maupun nilai investasi. Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya menarik investor untuk menanamkan investasinya, melalui :

1. Mempermudah pemberian izin kepada investor melalui pelayanan perizinan satu pintu;
2. Mempromosikan potensi-potensi unggulan daerah; dan
3. Menetapkan regulasi yang mendukung iklim usaha.

1.2.4 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang signifikan terhadap penataan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Berlandaskan Peraturan tersebut Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan penyesuaian kembali terhadap Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memperhatikan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing) berdasarkan beban kerja sesuai dengan kondisi nyata, dan hal ini sejalan dengan prinsip penataan organisasi perangkat daerah yang rasional.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan dengan Qanun Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, dengan asas efisiensi, efektifitas dengan pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas fleksibilitas, urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah sesuai amanah Konstitusi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2016 berjumlah 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah Kota dengan Tipe B;
- b. Sekretariat DPRK dengan Tipe C;
- c. Inspektorat Kota dengan Tipe B;
- d. Dinas Kota, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Satuan Polisi Pamong Prajadan Wilayatul Hisbah dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Syariat Islam;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Kebakaran;
 7. Dinas Sosial dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
 8. Dinas Tenaga Kerja dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Industri;

9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 10. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
 11. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan, dan Keindahan Kota dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 14. Dinas Perhubungan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan (wilayah darat);
 15. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang Persandian;
 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
 18. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan;
 20. Dinas Pariwisata dengan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;
- e. Badan Kota terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan Kota dengan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan; dan
 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian serta fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- f. Badan Penanggulangan Bencana Kota, yang menyelenggarakan Urusan Penanggulangan Bencana.

- g. Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa, yang menyelenggarakan urusan bidang Pelayanan Kesehatan Khusus.
- h. Pemerintah Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Kecamatan Baiturrahman dengan Tipe A;
 2. Kecamatan Kuta Alam dengan Tipe A;
 3. Kecamatan Meuraxa dengan Tipe A;
 4. Kecamatan Syiah Kuala dengan Tipe A;
 5. Kecamatan Lueng Bata dengan Tipe A;
 6. Kecamatan Kuta Raja dengan Tipe A;
 7. Kecamatan Banda Raya dengan Tipe A;
 8. Kecamatan Jaya Baru dengan Tipe A; dan
 9. Kecamatan Ulee Kareng dengan Tipe A.
- i. Perangkat daerah kota yang menyelenggarakan keistimewaan Aceh bidang pelaksanaan Syari'at Islam, Pendidikan, Adat serta Peran Ulama sesuai Qanun Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdiri dari :
 1. Dinas Syari'at Islam, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam;
 2. Dinas Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pembinaan pendidikan Agama Islam;
 3. Dinas Pertanahan, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pelayanan Pertanahan;
 4. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang peran ulama dalam penetapan kebijakan kota;
 5. Sekretariat Majelis Adat Aceh, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
 6. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
 7. Sekretariat Baitul Mal Kota, menyelenggarakan Urusan Pemerintah bidang pengelolaan Zakat, harta wakaf, dan harta agama.

1.2.5 Aparatur Pemerintahan

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh per 31 Desember 2016 sebanyak 5.676 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.879 orang dan perempuan sebanyak 3.797 orang.

Rincian pegawai berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh Keadaan 31 Desember 2016, sebagai berikut :

Tabel 1.10
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Jabatan

Golongan/ Ruang	Eselon					Guru	Kesehatan	Umum	Lainnya	Total
	I	II	III	IV	V					
Gol IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gol IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Gol IV/c	0	21	0	0	0	10	0	1	2	46
Gol IV/b	0	6	35	0	0	440	3	15	26	994
Gol IV/a	0	0	65	31	1	553	27	36	17	1327
Jumlah Gol IV	0	28	100	31	1	1003	30	52	45	1290
Gol III/d	0	0	36	243	2	177	110	180	20	1075
Gol III/c	0	0	1	134	4	163	56	220	4	807
Gol III/b	0	0	0	17	10	132	100	233	5	734
Gol III/a	0	0	0	2	0	231	37	173	4	719
Jumlah Gol III	0	0	37	396	16	703	303	806	34	2295
Gol II/d	0	0	0	0	0	56	41	65	2	263
Gol II/c	0	0	0	0	0	12	31	376	0	462
Gol II/b	0	0	0	0	0	3	6	184	0	202
Gol II/a	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Jumlah Gol II	0	0	0	0	0	71	78	703	2	854
Gol I/d	0	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Gol I/c	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Gol I/b	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Gol I/a	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Jumlah Gol I	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30
Jumlah Total	0	28	137	427	17	1777	411	1591	81	4469

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017

Tabel 1.11
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
Sekolah Dasar	20	
Sekolah Menengah Pertama	47	

Sekolah Menengah Atas	1085	
Diploma I	69	
Diploma II	315	
Diploma III	398	
Diploma IV	65	
S1	2184	
S2	284	
S3	2	

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017

Jumlah pegawai golongan III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh sangat dominan. Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 5.676 orang, dengan rincian golongan III dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 2.806 orang atau 49,43%, sedangkan jumlah pegawai daerah bergolongan IV sebanyak 1906 orang atau 33,58%, ini berarti 83,02% dari seluruh pegawai Pemerintah Kota Banda Aceh terdiri dari golongan III dan IV. Hal ini menunjukkan bahwa klasifikasi pendidikan S1 lebih dominan dibandingkan kualifikasi pendidikan lainnya.

1.3 Sistematika Penyajian

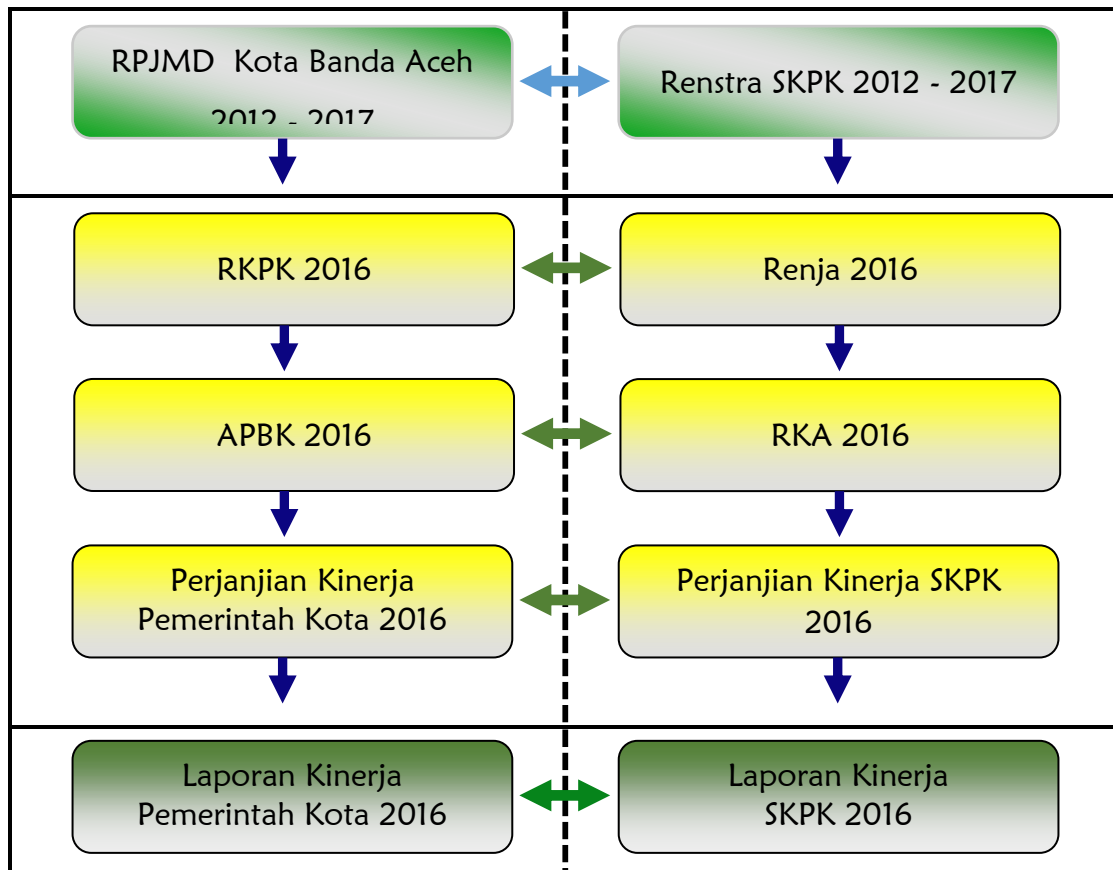
Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan Visi dan Misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Sistematika Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2016 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Alur pikir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2016 dan keterkaitan dengan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Gambar 1.2

Alur Penyusunan LAKIP Kota Banda Aceh Tahun 2016





Adapun sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016 dan ringkasan dari masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menyajikan uraian tentang Latar Belakang, Gambaran Umum Daerah yang terdiri dari : Letak Geografis dan Luas Wilayah, Demografi, Perekonomian Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Aparatur Pemerintahan, dan Sistematika Penyajian.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menyajikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh 2012-2017 dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh 2016.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan kinerja, Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2012-2017.

2.1. Rencana Strategis 2012-2017

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan. Secara hirarki perencanaan secara berjenjang disusun mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sehingga memiliki keterkaitan dan kontinuitas dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Perencanaan strategis Pemerintah Kota Banda Aceh disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Banda Aceh untuk periode 5 tahun, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan.

RPJM Kota Banda Aceh merupakan satu kesatuan bagian dari perencanaan secara menyeluruh, yaitu sistem perencanaan nasional. Oleh karenanya, sebagai bagian yang terintegrasi, RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017 berpedoman pada RPJP Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dengan memperhatikan RPJM Propinsi Aceh 2012 – 2017 untuk mendukung visi dan misi Aceh. Di samping itu, sebagai bagian integrasi nasional, RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017 juga memperhatikan RPJM Nasional, karena terkait dengan agenda-agenda pembangunan nasional secara keseluruhan.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, telah dilakukan revisi untuk menyesuaikan kondisi perkembangan terkini Kota Banda Aceh, serta sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Aceh dan Nasional. Adapun beberapa pertimbangan dilakukannya revisi RPJM Kota Banda Aceh, antara lain :

- a. Menyelaraskan program pembangunan di Kota Banda Aceh dengan program pembangunan atau RPJM Provinsi dan RPJM Nasional yang mengacu atau harus disesuaikan dengan program prioritas Nawa Cita.
- b. Adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara nyata, cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Banda Aceh tahun 2012-2017.

- c. Dalam pelaksanaan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJM pada tahun 2017.
- d. Sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, perlu dilakukan koreksi, penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi antar satuan kerja.
- e. menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan agar memenuhi kriteria yang baik.

Revisi RPJM Kota Banda Aceh periode 2012-2017, ditetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Banda Aceh 2012-2017.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Walikota sebagai Kepala Daerah, RPJM menjadi pijakan bagi perencanaan strategis bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Visi Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 : ***“Banda Aceh Model Kota Madani”***

Kota madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, ditetapkan 7 (tujuh) Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, maka diperlukan adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada ketujuh misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

- I. **Misi** : Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

Tujuan :

1. Menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.
2. Menciptakan masyarakat intelektual islami.

Sasaran :

1. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.
2. Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi.
3. Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel.

- II. **Misi** : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan :

1. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelayanan publik dan pengawasan.
2. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1. Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggungjawab.
2. Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government akuntabel.
3. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif.
4. Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan.
5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
6. Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong.

III. Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan.

Tujuan :

1. Membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian.
2. Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
3. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi.
4. Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian.
5. Meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

IV. Misi : Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tujuan :

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran :

1. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.
2. Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan.

V. Misi : Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.

Tujuan :

1. Meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata islami.

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata.
2. Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.
3. Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan.

VI. Misi : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.

Tujuan :

1. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

VII. Misi : Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan Kota.

Tujuan :

1. Mewujudkan generasi muda yang kreatif dalam membangun Kota.

Sasaran :

1. Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan Kota.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

I. Misi : Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

Strategi :

1. Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

2. Meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran atau paham terselubung/ sesat

3. Meningkatkan syiar Islam.

4. Menyampaikan informasi dan data pengumpulan ZIS kepada publik.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya aliran sesat dan pelanggaran syariat islam.

2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja.

3. Meningkatkan pemahaman tentang syariat islam.

4. Meningkatkan sarana dan prasarana mesjid.

5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS

II. Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi :

1. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang professional.

2. Penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

3. Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK.

4. Meningkatkan kinerja aparatur yang berkualitas dan bertanggungjawab.

5. Seluruh SKPD memiliki dokumen perencanaan.

6. Membuat produk hukum.

7. Meningkatkan petugas dan sarana prasarana linmas.
8. Meningkatkan pemahaman demokrasi di tingkat gampong.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan fungsi Baperjakat.
2. Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada pejabat pelaksana kegiatan SKPD.
3. Melaksanakan pp nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
4. Seluruh SKPD menerapkan pelayanan berbasis TIK.
5. Meningkatkan kinerja aparatur yang berkualitas dan bertanggungjawab.
6. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal Nomor 38 tahun 2010.
7. Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi.
8. Menyusun regulasi yang efektif dan efisien.
9. Merekrut petugas sesuai kualifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana Linmas.
10. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi.

III. Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan

Strategi :

1. Mengoptimalkan fungsi pasar yang sudah ada dan membangun pusat perekonomian baru.
2. Meningkatkan kerjasama pemerintah Kota dengan perbankan.
3. Peningkatan kerjasama dengan investor.
4. Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan.
5. Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan pertanian.
6. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja.
7. Mengurangi permasalahan masalah sosial dan memberikan pelayanan sosial kepada PMKS.

Arah Kebijakan :

1. Membangunsarana dan prasarana perekonomian.
2. Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan.
3. Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah.
4. Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan.
5. Pembinaan terhadap sektor perikanan, peternakan dan pertanian.
6. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.
7. Meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

IV. Misi : Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Strategi :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
2. Meningkatkan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan nasional.

Arah Kebijakan :

1. Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah.
2. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar dan JCI (Joint Community International).
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai SNP.
5. Menyiapkan lulusan yang bermutu di tingkat nasional.
6. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar.
7. Meningkatkan fasilitas perpustakaan yang memadai.

V. Misi : Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.

Strategi :

1. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas.
2. Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.
3. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

Arah Kebijakan :

1. Membangun dan mengembangkan kapasitas infrastruktur.
2. Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.
3. Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan.
4. Mendorong peningkatan pengelolaan persampahan untuk mempertahankan prestasi adipura.
5. Meningkatkan cakupan pelayanan wilayah bencana.
6. Meningkatkan promosi pariwisata dan penataan situs kota.

VI. Misi : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.

Strategi :

1. Meningkatnya program-program pemberdayaan perempuan dan anak.

Arah Kebijakan :

1. Mendorong terwujudnya kota layak anak.

VII. Misi : Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota

Strategi :

1. Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

1. Membina generasi muda yang terampil dan cakap

2.1.4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 407 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kota Banda Aceh. Indikator kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1.	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.	1) Menurunnya jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/ menyimpang	3	0
		2) Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	386	100
2.	Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi	3) Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah	31.20%	98%
		4) Meningkatnya Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi	-	Peringkat 2

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		5) Meningkatnya kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah	10%	100%
		6) Meningkatnya Frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat	43	1505
		7) Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban	9	54
3.	Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	8) Meningkatnya penerimaan ZIS	8,8 M	21,3 M
		9) Meningkatnya Jumlah Muzakki	8.166 org	9.497 org
4.	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab	10) Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan	60%	85%
		11) Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjurangan	32%	85%
		12) Jumlah APIP yang bersertifikasi	20 org	27 org
		13) Menurunnya jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal	2106	600
		14) Menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner	57 org	30 org
5.	Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	15) Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	29 aplikasi	88 aplikasi
6.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	16) Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
		17) Meningkatnya persentase target PAD Kota	54%	20%

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		18) Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	7200 berita	14400 berita
		19) Meningkatnya Jumlah Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	75%	96%
7.	Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	20) Jumlah regulasi yang ditetapkan	19	43
		21) Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	12,9%	75%
8.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	22) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1300	1400
		23) Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong	220	250
9.	Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	24) Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	68.07%	75%
10.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian	25) Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal	84,62%	100%
		26) Jumlah Pasar yang dibangun	12	15
11.	Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	27) Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	14	140
		28) Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	120	180
		29) Jumlah produk yang menunjang program one village one product	7	12
12.	Terciptanya iklim usaha yang kondusif	30) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	-	Rp 25,655 M

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
	dan Kemudahan investasi	31) Jumlah Qanun yang mendukung iklim usaha	17	20
13.	Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	32) Cakupan bina kelompok perikanan	17%	93%
		33) Produksi perikanan	68%	76%
		34) Cakupan bina kelompok petani/ternak	30%	94%
		35) Ketersediaan pangan utama	158,41 kg	744,67 kg
		36) Tingkat pengangguran terbuka	7.17%	7.06%
		37) Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	51%	72%
14.	Meningkatnya penanggulangan PMKS	38) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,83%	2,5%
15.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	39) Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health	0	11
		40) Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/akreditasi	1	6
		41) Model gampong sehat	0	5
16.	Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	42) Jumlah SNP yang tercapai	25%	62.5%
		43) Peringkat Kelulusan Tk. Nasional	-	10 besar
		44) Prestasi di ajang Pekan Olah Raga Pelajar Daerah	Juara Umum	Juara Umum
		45) Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun	6.061 org	16.000 org

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
17.	Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	46) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	85.66%	95%
		47) Persentase penduduk berakses air minum	79.9%	86.88%
		48) Ketaatan terhadap RTRW	53.57%	71,07%
		49) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	72,08%	72.91%
		50) Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi	90.39%	87%
18.	Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	51) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	8,39%	8,62%
		52) Tersedianya terminal angkutan penumpang/ barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%
		53) Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayanan.	100%	100%
19.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	54) Penegakan hukum lingkungan	10%	100%
		55) Meraih Adipura	Berhasil	Berhasil
		56) Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	82%	93%

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		57) Meningkatnya gampong siaga bencana	1 gampong	5 gampong
		58) Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12.22%	85,56%
		59) Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	476.230 org	1.200.000 org
		60) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	17.6%	23.5%
20.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	61) Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak	29.03%	100%
21.	Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	62) Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	30%	60%
		63) Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	25 Organisasi Kepemudaan	85 Organisasi Kepemudaan

2.2. Perjanjian Kinerja 2016

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja.

Penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh periode 2012-2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2016 sebesar Rp. 1.318.153.038.568,- sebagai berikut :

Misi I :

Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah

Sasaran 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat	1.	Jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/menyimpang	0
	2.	Menurunnya jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam	125 kasus

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.099.917.100,-

Sasaran 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi	1.	Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah	97 %
	2.	Meningkatnya prestasi MTQ di tingkat propinsi	Tidak dilaksanakan
	3.	Meningkatnya kemampuan baca tulis arab jawi siswa sekolah	100%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
	4.	Meningkatnya frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat	362 kali
	5.	Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban	9 mesjid

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 2, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 32 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 10.168.038.559,-

Sasaran 3 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	1.	Meningkatnya penerimaan ZIS	Rp. 19.209.350.172
	2.	Meningkatnya jumlah Muzakki	9.195 orang

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 3, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 20.699.572.045,-

Misi II :

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 4 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif,	1.	Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan	80%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
amanah, professional dan bertanggungjawab	2.	Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan	59%
	3.	Jumlah APIP yang bersertifikasi	23 orang
	4.	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal	651 rekomendasi
	5.	Menurunnya jumlah PNS yang indisipliner	40 PNS

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 4, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 16 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.962.615.900,-

Sasaran 5 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	1.	Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	78 aplikasi

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 5, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 5.012.152.460,-

Sasaran 6 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	1.	Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
	2.	Meningkatnya persentase target PAD kota	17%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
	3.	Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	12.960 berita
	4.	Meningkatnya jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	91,76%

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 6, diarahkan melalui pelaksanaan 18 program dan 159 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 28.343.871.718,-

Sasaran 7 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	1.	Jumlah regulasi yang ditetapkan	6 produk hukum
	2.	Jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	60%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 7, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 343.178.900,-

Sasaran 8 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	1.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	1.412 linmas
	2.	Rasio pos Siskamling per jumlah gampong	235 pos

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 8, diarahkan melalui pelaksanaan 7 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.133.205.026,-

Sasaran 9 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	1.	Prosentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	70%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 9, diarahkan melalui pelaksanaan 6 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.564.522.660,-

Misi III :

Memperkuat ekonomi kerakyatan

Sasaran 10 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian	1.	Jumlah pasar yang sudah berfungsi secara optimal	86,67%
	2.	Jumlah pasar yang dibangun	1 pasar

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 10, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 7.035.152.193,-

Sasaran 11 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	1.	Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	120 UKM
	2.	Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	170 IKM
	3.	Jumlah produk yang menunjang program one village one product	11 produk

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 11, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 7 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 9.896.109.650,-

Sasaran 12 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi	1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp. 23.055.000.000
	2.	Jumlah Qanun yang mendukung iklim usaha	1 Qanun

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 12, diarahkan melalui pelaksanaan 5 program dan 12 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.102.307.295,-

Sasaran 13 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	1.	Cakupan bina kelompok perikanan	88%
	2.	Produksi perikanan	75%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
	3.	Cakupan bina kelompok petani/ternak	90%
	4.	Ketersediaan pangan utama	627,13 kg
	5.	Tingkat pengangguran terbuka	7,07%
	6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	68%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 13, diarahkan melalui pelaksanaan 10 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 9.172.525.814,-

Sasaran 14 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya penanggulangan PMKS	1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,32%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 14, diarahkan melalui pelaksanaan 8 program dan 14 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 3.775.641.250,-

Misi IV :

Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya

Sasaran 15 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	1.	Jumlah puskesmas yang sudah menerapkan e-health	11 puskesmas
	2.	Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi	1 puskesmas
	3.	Model gampong sehat	2 gampong

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 15, diarahkan melalui pelaksanaan 12 program dan 34 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 154.370.206.845,-

Sasaran 16 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	1.	Jumlah SNP yang tercapai	50%
	2.	Peringkat kelulusan tingkat nasional	10 besar
	3.	Jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling per tahun	13.000 pengunjung

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 16, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 51 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 59.249.231.758,-

Misi V :

Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami

Sasaran 17 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya Infrastrukur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	1.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	87%
	2.	Persentase penduduk berakses air minum	85.67%
	3.	Ketaatan terhadap RTRW	67,57%
	4.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	72,59%
	5.	Rasio rumah tinggal berakses sanitasi	86%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 17, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 138.234.911.828,-

Sasaran 18 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	8,62%
	2.	Tersedianya terminal angkutan penumpang/ barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%
	3.	Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kota	100%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
		pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 18, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 16.330.434.961,-

Sasaran 19 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	1.	Penegakan hukum lingkungan	20%
	2.	Meraih adipura	Berhasil
	3.	Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	91%
	4.	Meningkatnya gampong siaga bencana	1 gampong
	5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	73,34%
	6.	Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	280.000 wisatawan
	7.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	23,5%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 19, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 22 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 26.608.117.817,-

Misi VI :

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak

Sasaran 20 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	1.	Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak	100%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 20, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.558.199.896,-

Misi VII :

Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota

Sasaran 21 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	1.	Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	50%
	2.	Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	60 OKP

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 21, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 703.902.000,-

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2016

Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Belanja daerah secara garis besar mencakup belanja tidak langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.318.153.038.568,- dengan rincian sbb :

- Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.318.153.038.568,-
- Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.315.853.038.568,-
- Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000,-

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.315.853.038.568,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

No	Uraian	Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	713.144.496.193,-	54,20
2.	Belanja Langsung	602.708.542.375,-	45,80
Jumlah		1.315.853.038.568,-	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2016

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan kinerja, Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banda Aceh 2012-2017.

2.4. Rencana Strategis 2012-2017

Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan prioritas pembangunan. Secara hirarki perencanaan secara berjenjang disusun mulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sehingga memiliki keterkaitan dan kontinuitas dalam pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Perencanaan strategis Pemerintah Kota Banda Aceh disajikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 merupakan kerangka pembangunan strategis Kota Banda Aceh untuk periode 5 tahun, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan.

RPJM Kota Banda Aceh merupakan satu kesatuan bagian dari perencanaan secara menyeluruh, yaitu sistem perencanaan nasional. Oleh karenanya, sebagai bagian yang terintegrasi, RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017 berpedoman pada RPJP Kota Banda Aceh 2007 – 2027 dengan memperhatikan RPJM Propinsi Aceh 2012 – 2017 untuk mendukung visi dan misi Aceh. Di samping itu, sebagai bagian integrasi nasional, RPJM Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017 juga memperhatikan RPJM Nasional, karena terkait dengan agenda-agenda pembangunan nasional secara keseluruhan.

RPJMD Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, telah dilakukan revisi untuk menyesuaikan kondisi perkembangan terkini Kota Banda Aceh, serta sinkronisasi program Pemerintah Provinsi Aceh dan Nasional. Adapun beberapa pertimbangan dilakukannya revisi RPJM Kota Banda Aceh, antara lain :

- f. Menyelaraskan program pembangunan di Kota Banda Aceh dengan program pembangunan atau RPJM Provinsi dan RPJM Nasional yang mengacu atau harus disesuaikan dengan program prioritas Nawa Cita.
- g. Adanya beberapa strategi, kebijakan dan program baru terkait dengan upaya mengatasi berbagai permasalahan yang berkembang secara nyata, cepat serta upaya mempercepat keberhasilan pencapaian visi dan misi Kota Banda Aceh tahun 2012-2017.

- h. Dalam pelaksanaan RPJM Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017 terjadi perubahan beberapa indikator dan target sasaran tahunan dan juga ikut merubah target pencapaian sasaran akhir RPJM pada tahun 2017.
- i. Sasaran yang sulit dicapai dalam rentang waktu yang tersisa, perlu dilakukan koreksi, penajaman, terobosan dan langkah strategis, review efektifitas, identifikasi kelemahan, dan kemungkinan penambahan alokasi anggaran, serta meningkatkan koordinasi antar satuan kerja.
- j. menyeleksi dan menyempurnakan indikator kinerja sebagai pengembangan sistem monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan agar memenuhi kriteria yang baik.

Revisi RPJM Kota Banda Aceh periode 2012-2017, ditetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kota Banda Aceh 2012-2017.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Walikota sebagai Kepala Daerah, RPJM menjadi pijakan bagi perencanaan strategis bagi SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan.

2.4.1. Visi dan Misi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi Pemerintah.

Visi Kota Banda Aceh tahun 2012-2017 : ***“Banda Aceh Model Kota Madani”***

Kota madani adalah sebuah kota yang penduduknya beriman dan berakhlak mulia, menjaga persatuan dan kesatuan, toleran dalam perbedaan, taat hukum, dan memiliki ruang publik yang luas. Disamping itu masyarakatnya ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, inklusif, mampu bekerjasama untuk menggapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Keadaan ini diharapkan melahirkan warga Kota Banda Aceh yang memiliki jati diri yang ramah, taat aturan, damai, sejahtera, harga diri tinggi, berbudaya, dan beradab.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017, ditetapkan 7 (tujuh) Misi, sebagai berikut :

- 8. Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
- 9. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
- 10. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
- 11. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

12. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
13. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.
14. Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi, maka diperlukan adanya kerangka kerja logis yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada ketujuh misi tersebut. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan tersebut akan menjadi arahan dalam pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh, baik yang menyangkut urusan wajib maupun urusan pilihan, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Adapun tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

VIII. Misi : Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

Tujuan :

3. Menata kembali kehidupan masyarakat sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.
4. Menciptakan masyarakat intelektual islami.

Sasaran :

4. Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.
5. Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi.
6. Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel.

IX. Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Tujuan :

3. Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dalam pelayanan publik dan pengawasan.
4. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran :

7. Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggungjawab.
8. Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government akuntabel.
9. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif.
10. Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan.
11. Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.
12. Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong.

X. Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan.

Tujuan :

2. Membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Sasaran :

6. Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian.

7. Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).

8. Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi.

9. Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian.

10. Meningkatnya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

XI. Misi : Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Tujuan :

3. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima.

4. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Sasaran :

3. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.

4. Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan.

XII. Misi : Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.

Tujuan :

2. Meningkatkan infrastruktur Kota Banda Aceh yang mendukung pariwisata islami.

Sasaran :

4. Tersedianya infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata.

5. Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.

6. Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan.

XIII. Misi : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.

Tujuan :

2. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.

Sasaran :

2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat.

XIV. Misi : Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan Kota.

Tujuan :

2. Mewujudkan generasi muda yang kreatif dalam membangun Kota.

Sasaran :

2. Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan Kota.

2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi dan arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

VIII. Misi : Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.

Strategi :

5. Mengoptimalkan peran masyarakat, ulama dan umara untuk melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

6. Meminimalisir pengaruh buruk globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta aliran atau paham terselubung/ sesat

7. Meningkatkan syiar Islam.

8. Menyampaikan informasi dan data pengumpulan ZIS kepada publik.

Arah Kebijakan :

6. Meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap munculnya aliran sesat dan pelanggaran syariat islam.

7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dari orang tua, pendidik, ulama, dan masyarakat, kepada anak-anak dan remaja.

8. Meningkatkan pemahaman tentang syariat islam.

9. Meningkatkan sarana dan prasarana mesjid.

10. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengumpulan dan penyaluran dana ZIS

IX. Misi : Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Strategi :

9. Meningkatkan SDM aparatur pemerintah yang professional.

10. Penerapan PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.

11. Menerapkan sistem pelayanan publik yang berbasis TIK.

12. Meningkatkan kinerja aparatur yang berkualitas dan bertanggungjawab.

13. Seluruh SKPD memiliki dokumen perencanaan.

14. Membuat produk hukum.
15. Meningkatkan petugas dan sarana prasarana linmas.
16. Meningkatkan pemahaman demokrasi di tingkat gampong.

Arah Kebijakan :

11. Meningkatkan fungsi Baperjakat.
12. Meningkatkan frekuensi pembinaan kepada pejabat pelaksana kegiatan SKPD.
13. Melaksanakan pp nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS.
14. Seluruh SKPD menerapkan pelayanan berbasis TIK.
15. Meningkatkan kinerja aparatur yang berkualitas dan bertanggungjawab.
16. Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Camat sesuai dengan Perwal Nomor 38 tahun 2010.
17. Menyusun dokumen perencanaan yang terintegrasi.
18. Menyusun regulasi yang efektif dan efisien.
19. Merekrut petugas sesuai kualifikasi dan menyediakan sarana dan prasarana Linmas.
20. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya berdemokrasi.

X. Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan

Strategi :

8. Mengoptimalkan fungsi pasar yang sudah adadan membangun pusat perekonomian baru.
9. Meningkatkan kerjasama pemerintah Kota dengan perbankan.
10. Peningkatan kerjasama dengan investor.
11. Optimalisasi kinerja pelayanan perizinan.
12. Peningkatan produksi perikanan, peternakan dan pertanian.
13. Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi, kemandirian dan optimalisasi perlindungan tenaga kerja.
14. Mengurangi permasalahan masalah sosial dan memberikan pelayanan sosial kepada PMKS.

Arah Kebijakan :

8. Membangunsarana dan prasarana perekonomian.
9. Memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan kredit lunak perbankan.
10. Mempromosikan peluang dan potensi investasi daerah.
11. Penyederhanaan prosedur perizinan serta optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan perijinan.
12. Pembinaan terhadap sektor perikanan, peternakan dan pertanian.
13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja.

14. Meningkatkan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial.

XI. Misi : Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.

Strategi :

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

4. Meningkatkan standar pelayanan pendidikan yang mengacu pada standar pendidikan nasional.

Arah Kebijakan :

8. Penerapan e-health (pelayanan dasar dan rujukan) secara berjenjang di semua sarana pelayanan kesehatan pemerintah.

9. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar dan JCI (Joint Community International).

10. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan.

11. Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai SNP.

12. Menyiapkan lulusan yang bermutu di tingkat nasional.

13. Meningkatkan prestasi olahraga pelajar.

14. Meningkatkan fasilitas perpustakaan yang memadai.

XII. Misi : Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.

Strategi :

5. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas.

6. Peningkatan sarana, prasarana transportasi dan keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.

7. Pengendalian pencemaran lingkungan melalui pengelolaan persampahan.

8. Peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana.

Arah Kebijakan :

7. Membangun dan mengembangkan kapasitas infrastruktur.

8. Penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

9. Meningkatkan pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan.

10. Mendorong peningkatan pengelolaan persampahan untuk mempertahankan prestasi adipura.

11. Meningkatkan cakupan pelayanan wilayah bencana.

12. Meningkatkan promosi pariwisata dan penataan situs kota.

XIII. Misi : Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak.

Strategi :

2. Meningkatnya program-program pemberdayaan perempuan dan anak.

Arah Kebijakan :

2. Mendorong terwujudnya kota layak anak.

XIV. Misi : Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota

Strategi :

2. Peningkatan kapasitas pemuda dalam pembangunan

Arah Kebijakan :

2. Membina generasi muda yang terampil dan cakap

2.1.4. Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kinerja daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran pembangunan daerah dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran dimaksud.

Indikator kinerja digunakan sebagai tolok ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh ditetapkan melalui Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 407 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Kota Banda Aceh. Indikator kinerja Utama Pemerintah Kota Banda Aceh mengacu pada indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh periode 2012-2017, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Daerah

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
1.	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.	64) Menurunnya jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/ menyimpang	3	0
		65) Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	386	100
2.	Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi	66) Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah	31.20%	98%

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		67) Meningkatnya Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi	-	Peringkat 2
		68) Meningkatnya kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah	10%	100%
		69) Meningkatnya Frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat	43	1505
		70) Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban	9	54
3.	Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	71) Meningkatnya penerimaan ZIS	8,8 M	21,3 M
		72) Meningkatnya Jumlah Muzakki	8.166 org	9.497 org
4.	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab	73) Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan	60%	85%
		74) Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan	32%	85%
		75) Jumlah APIP yang bersertifikasi	20 org	27 org
		76) Menurunnya jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal	2106	600
		77) Menurunnya jumlah PNS yang Indisipliner	57 org	30 org
5.	Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	78) Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	29 aplikasi	88 aplikasi
6.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif,	79) Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
	akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	80) Meningkatnya persentase target PAD Kota	54%	20%
		81) Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	7200 berita	14400 berita
		82) Meningkatnya Jumlah Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	75%	96%
7.	Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	83) Jumlah regulasi yang ditetapkan	19	43
		84) Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	12,9%	75%
8.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	85) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1300	1400
		86) Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong	220	250
9.	Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	87) Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	68.07%	75%
10.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian	88) Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal	84,62%	100%
		89) Jumlah Pasar yang dibangun	12	15
11.	Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	90) Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	14	140
		91) Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	120	180
		92) Jumlah produk yang menunjang program one village one product	7	12

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
12.	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi	93) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	-	Rp 25,655 M
		94) Jumlah Qanun yang mendukung iklim usaha	17	20
13.	Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	95) Cakupan bina kelompok perikanan	17%	93%
		96) Produksi perikanan	68%	76%
		97) Cakupan bina kelompok petani/ternak	30%	94%
		98) Ketersediaan pangan utama	158,41 kg	744,67 kg
		99) Tingkat pengangguran terbuka	7.17%	7.06%
		100) Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	51%	72%
14.	Meningkatnya penanggulangan PMKS	101) Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,83%	2,5%
15.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	102) Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health	0	11
		103) Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/akreditasi	1	6
		104) Model gampong sehat	0	5
16.	Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	105) Jumlah SNP yang tercapai	25%	62.5%
		106) Peringkat Kelulusan Tk. Nasional	-	10 besar
		107) Prestasi di ajang Pekan Olah Raga Pelajar Daerah	Juara Umum	Juara Umum

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		108) Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun	6.061 org	16.000 org
17.	Tersedianya Infrastrukur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	109) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	85.66%	95%
		110) Persentase penduduk berakses air minum	79.9%	86.88%
		111) Ketaatan terhadap RTRW	53.57%	71,07%
		112) Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	72,08%	72.91%
		113) Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi	90.39%	87%
18.	Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	114) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	8,39%	8,62%
		115) Tersedianya terminal angkutan penumpang/ barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%
		116) Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	100%	100%
19.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	117) Penegakan hukum lingkungan	10%	100%
		118) Meraih Adipura	Berhasil	Berhasil
		119) Cakupan pelayanan persampahan	82%	93%

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja	
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir
		(persentase penduduk terlayani)		
		120) Meningkatnya gampong siaga bencana	1 gampong	5 gampong
		121) Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12.22%	85,56%
		122) Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	476.230 org	1.200.000 org
		123) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	17.6%	23.5%
20.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	124) Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak	29.03%	100%
21.	Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	125) Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	30%	60%
		126) Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	25 Organisasi Kepemudaan	85 Organisasi Kepemudaan

2.5. Perjanjian Kinerja 2016

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam pasal 9 disebutkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun lembar/dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran.

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja.

Penyusunan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Perjanjian kinerja ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016 disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh periode 2012-2017, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan memperhatikan program, kegiatan dan anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2016 sebesar Rp. 1.318.153.038.568,- sebagai berikut :

Misi I :

Meningkatkan kualitas pengalaman agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah

Sasaran 1 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat	1.	Jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/menyimpang	0
	2.	Menurunnya jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam	125 kasus

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 1, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.099.917.100,-

Sasaran 2 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi	1.	Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah	97 %
	2.	Meningkatnya prestasi MTQ di tingkat propinsi	Tidak dilaksanakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
	3.	Meningkatnya kemampuan baca tulis arab jawi siswa sekolah	100%
	4.	Meningkatnya frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat	362 kali
	5.	Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban	9 mesjid

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 2, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 32 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 10.168.038.559,-

Sasaran 3 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	1.	Meningkatnya penerimaan ZIS	Rp. 19.209.350.172
	2.	Meningkatnya jumlah Muzakki	9.195 orang

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 3, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 20.699.572.045,-

Misi II :

Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran 4 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggungjawab	1.	Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan	80%
	2.	Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan	59%
	3.	Jumlah APIP yang bersertifikasi	23 orang
	4.	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal	651 rekomendasi
	5.	Menurunnya jumlah PNS yang indisipliner	40 PNS

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 4, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 16 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.962.615.900,-

Sasaran 5 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	1.	Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	78 aplikasi

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 5, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 6 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 5.012.152.460,-

Sasaran 6 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	1.	Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP
	2.	Meningkatnya persentase target PAD kota	17%
	3.	Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	12.960 berita
	4.	Meningkatnya jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	91,76%

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada sasaran strategis 6, diarahkan melalui pelaksanaan 18 program dan 159 kegiatan dengan jumlah anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 28.343.871.718,-

Sasaran 7 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	1.	Jumlah regulasi yang ditetapkan	6 produk hukum
	2.	Jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	60%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 7, diarahkan melalui pelaksanaan 2 program dan 3 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 343.178.900,-

Sasaran 8 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	1.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	1.412 linmas
	2.	Rasio pos Siskamling per jumlah gampong	235 pos

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 8, diarahkan melalui pelaksanaan 7 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.133.205.026,-

Sasaran 9 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	1.	Prosentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	70%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 9, diarahkan melalui pelaksanaan 6 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.564.522.660,-

Misi III :

Memperkuat ekonomi kerakyatan

Sasaran 10 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian	1.	Jumlah pasar yang sudah berfungsi secara optimal	86,67%
	2.	Jumlah pasar yang dibangun	1 pasar

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 10, diarahkan melalui pelaksanaan 3 program dan 5 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 7.035.152.193,-

Sasaran 11 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	1.	Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	120 UKM
	2.	Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	170 IKM
	3.	Jumlah produk yang menunjang program one village one product	11 produk

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 11, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 7 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 9.896.109.650,-

Sasaran 12 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi	1.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp. 23.055.000.000
	2.	Jumlah Qanun yang mendukung iklim usaha	1 Qanun

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 12, diarahkan melalui pelaksanaan 5 program dan 12 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 2.102.307.295,-

Sasaran 13 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	1.	Cakupan bina kelompok perikanan	88%
	2.	Produksi perikanan	75%
	3.	Cakupan bina kelompok petani/ternak	90%
	4.	Ketersediaan pangan utama	627,13 kg
	5.	Tingkat pengangguran terbuka	7,07%
	6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	68%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 13, diarahkan melalui pelaksanaan 10 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 9.172.525.814,-

Sasaran 14 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya penanggulangan PMKS	1.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,32%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 14, diarahkan melalui pelaksanaan 8 program dan 14 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 3.775.641.250,-

Misi IV :

Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya

Sasaran 15 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas.	1.	Jumlah puskesmas yang sudah menerapkan e-health	11 puskesmas
	2.	Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi	1 puskesmas
	3.	Model gampong sehat	2 gampong

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 15, diarahkan melalui pelaksanaan 12 program dan 34 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 154.370.206.845,-

Sasaran 16 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	1.	Jumlah SNP yang tercapai	50%
	2.	Peringkat kelulusan tingkat nasional	10 besar
	3.	Jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling per tahun	13.000 pengunjung

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 16, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 51 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 59.249.231.758,-

Misi V :

Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami

Sasaran 17 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Tersedianya Infrastrukur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	1.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	87%
	2.	Persentase penduduk berakses air minum	85.67%
	3.	Ketaatan terhadap RTRW	67,57%
	4.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	72,59%
	5.	Rasio rumah tinggal berakses sanitasi	86%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 17, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 15 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 138.234.911.828,-

Sasaran 18 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	8,62%
	2.	Tersedianya terminal angkutan penumpang/ barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%
	3.	Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam kota	100%

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
		pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 18, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 16.330.434.961,-

Sasaran 19 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	1.	Penegakan hukum lingkungan	20%
	2.	Meraih adipura	Berhasil
	3.	Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	91%
	4.	Meningkatnya gampong siaga bencana	1 gampong
	5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	73,34%
	6.	Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	280.000 wisatawan
	7.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	23,5%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 19, diarahkan melalui pelaksanaan 11 program dan 22 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 26.608.117.817,-

Misi VI :

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah publik dan perlindungan anak

Sasaran 20 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	1.	Tercapainya 31 indikator Kota layak Anak	100%

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 20, diarahkan melalui pelaksanaan 4 program dan 11 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 1.558.199.896,-

Misi VII :

Meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota

Sasaran 21 :

Sasaran	No	Indikator Kinerja	
		Uraian	Target
Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	1.	Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	50%
	2.	Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	60 OKP

Untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan pada sasaran strategis 21, diarahkan melalui pelaksanaan 1 program dan 4 kegiatan dengan jumlah anggaran direncanakan sebesar Rp. 703.902.000,-

2.6. Rencana Anggaran Tahun 2016

Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup pendapatan asli daerah, pendapatan dari dana perimbangan pusat-daerah, dan lain-lain sumber pendapatan yang sah. Belanja daerah secara garis besar mencakup belanja tidak langsung dan belanja tidak langsung. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.318.153.038.568,- dengan rincian sbb :

- Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.318.153.038.568,-
- Belanja daerah direncanakan sebesar Rp. 1.315.853.038.568,-
- Pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp. 2.300.000.000,-

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp. 1.315.853.038.568,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.2

Belanja Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016

No	Uraian	Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Tidak Langsung	713.144.496.193,-	54,20
2.	Belanja Langsung	602.708.542.375,-	45,80
Jumlah		1.315.853.038.568,-	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2016

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pemerintah Kota Banda Aceh selaku pengemban amanah masyarakat, memiliki kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut yang salah satunya melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Banda Aceh yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD periode 2012-2017. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai kinerja, baik keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Banda Aceh.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja pada tingkat sasaran digunakan skala pengukuran dengan nilai disertai makna dari nilai tersebut. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja yang digunakan dalam penyusunan LAKIP ini.

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Skala Nilai Realisasi Kinerja	Kategori Penilaian Realisasi Kinerja
1.	Lebih dari 85	Sangat Baik
2.	70 sampai dengan 85	Baik
3.	55 sampai dengan 69	Cukup
4.	Kurang dari 55	Kurang

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja tahun 2016 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Pemerintah Kota Banda Aceh. Pengukuran dilakukan terhadap kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahun 2016 dan

target dalam dokumen perjanjian Kinerja tahun 2016 dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh periode 2012-2017.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berpedoman pada indikator kinerja pada tingkat sasaran strategis, artinya IKU Kota Banda Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 407 Tahun 2014 sepenuhnya merupakan indikator kinerja sasaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh 2012-2017.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja melalui revisi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Banda Aceh. Selain itu, revisi dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas pembangunan daerah sesuai dengan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam program prioritas Nawa Cita.

Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis. Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2016 dan atau tahun-tahun selanjutnya (*performance improvement*).

Kriteria penilaian seperti yang diuraikan dalam tabel 3.1 selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016. Pencapaian IKU Pemerintah Kota Banda Aceh secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Pencapaian IKU

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat				
1.	Menurunnya jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/menyimpang	0 aliran sesat	0 aliran sesat	100%
2.	Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	125 kasus	95 kasus	131,58%
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi				
3.	Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah	97%	97%	100%
4.	Meningkatnya Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	-

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
5.	Meningkatnya kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah	100%	97%	97%
6.	Meningkatnya Frekwensi kegiatan Syiar dan Dakwah di Masyarakat	362 kali	600 kali	165,75%
7.	Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban	9 mesjid	9 mesjid	100%
Sasaran Strategis 3 : Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel				
8.	Meningkatnya penerimaan ZIS	19.209.350.172	19.481.191.339	101,42%
9.	Meningkatnya Jumlah Muzakki	9.195 orang	9.054 orang	98,47%
Sasaran Strategis 4 : Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab				
10.	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan (The right man on the right place)	80%	85%	106%
11.	Persentase Penempatan Pejabat yang sesuai dengan Latar Diklat Penjurangan	59%	75%	127,19%
12.	Jumlah APIP yang bersertifikasi	23 orang	23 orang	100%
13.	Menurunnya jumlah temuan hasil Pemeriksaan dan Pengawasan internal dan eksternal	651 rekomendasi	281 rekomendasi	231,68%
14.	Menurunnya Jumlah PNS yang Indisipliner	40 PNS	32 PNS	125%
Sasaran Strategis 5 : Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government				
15.	Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	78 aplikasi	88 aplikasi	112,82%
Sasaran Strategis 6 : Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif				
16.	Perolehan Opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	100%
17.	Meningkatnya persentase target PAD Kota	17%	19,03%	111,94%
18.	Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	12.960 berita	13.680 berita	105,56%
19.	Meningkatnya Jumlah Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	91,76%	87,57%	95,43%
Sasaran Strategis 7 : Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan				
20.	Jumlah regulasi yang ditetapkan	6 produk hukum	6 produk hukum	100%
21.	Jumlah Rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	60%	65%	108,34%
Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat				
22.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	1.412 orang	1.412 orang	100%
23.	Rasio Pos Siskamling per jumlah gampong	235 pos	227 pos	96,56%

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
Sasaran Strategis 9 : Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong				
24.	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	70%	59,65%	85,21%
Sasaran Strategis 10 : Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian				
25.	Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal	86,67%	86,67%	100%
26.	Jumlah Pasar yang dibangun	1 pasar	1 pasar	100%
Sasaran Strategis 11 : Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)				
27.	Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	120 UKM	120 UKM	100%
28.	Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	170 IKM	128 IKM	75,29%
29.	Jumlah produk yang menunjang program one village one product	11 produk	10 produk	90,90%
Sasaran Strategis 12 : Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan investasi				
30.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	23.055.000.000	15.935.000.000	69,12%
31.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	1 qanun	-	0%
Sasaran Strategis 13 : Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian				
32.	Cakupan bina kelompok perikanan	88%	88%	100%
33.	Produksi perikanan	75%	75,6%	100%
34.	Cakupan bina kelompok petani/ternak	90%	90%	100%
35.	Ketersediaan pangan utama	627,13 kg	623,58%	99,43%
36.	Tingkat pengangguran terbuka	7,07%	11,55%	61,21%
37.	Besaran Pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	68%	46,10%	67,79%
Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya penanggulangan PMKS				
38.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	2,32%	2,32%	100%
Sasaran Strategis 15 : Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas				
39.	Jumlah Puskesmas yang sudah menerapkan e-health	11 puskesmas	11 puskesmas	100%
40.	Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi	1 puskesmas	1 puskesmas	100%
41.	Model gampong sehat	2 gampong	3 gampong	150%
Sasaran Strategis 16 : Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan				
42.	Jumlah SNP yang tercapai	50%	50%	100%
43.	Peringkat Kelulusan Tk. Nasional	10 besar	-	-
44.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan dan Perpustakaan Keliling Per Tahun	13.000 pengunjung	13.357 pengunjung	102,75%
Sasaran Strategis 17 : Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata				

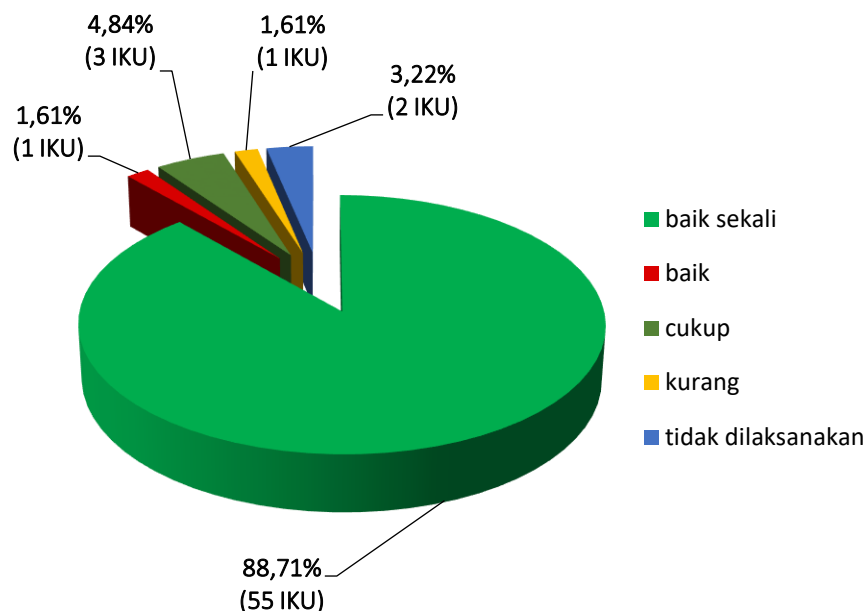
No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
45.	Proporsi Panjang jalan dalam Kondisi baik	87%	87,06%	100%
46.	Persentase penduduk berakses air minum	85,67%	85,67%	100%
47.	Ketaatan terhadap RTRW	67,57%	67,76%	100%
48.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	72,59%	72,59%	99,85%
49.	Rasio Rumah Tinggal berakses sanitasi	86%	91,71%	106,65%
Sasaran Strategis 18 : Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa				
50.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	8,62%	8,62%	100%
51.	Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	100%
52.	Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.	100%	100%	100%
Sasaran Strategis 19 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan				
53.	Penegakan hukum lingkungan	20%	20%	100%
54.	Meraih Adipura	Berhasil	Berhasil	100%
55.	Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	91%	88,17%	96,89%
56.	Meningkatnya gampong siaga bencana	1 gampong	1 gampong	100%
57.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	73,34%	73,34%	100%
58.	Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	280.000 orang	287.109 orang	102,54%
59.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	23,5%	46,55%	189,08%
Sasaran Strategis 20 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat				
60.	Tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak	100%	87,09%	87,09%
Sasaran Strategis 21 : Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota				
61.	Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	50%	50%	100%
62.	Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	60 OKP	68 OKP	113,34%

Hasil analisis pencapaian terhadap 62 (enam puluh dua) Indikator Kinerja Utama, menunjukkan bahwa 55 (lima puluh lima) IKU telah memenuhi kriteria sangat baik, bahkan 17 (tujuh belas) IKU capaian kinerja lebih dari 100% dari target yang ditetapkan. Sementara 1 (satu) IKU lainnya masuk kategori baik, 3 (tiga) IKU masuk kategori cukup

dan 1 (satu) IKU masuk dalam kategori kurang, sedangkan 2 (dua) IKU lainnya tidak dilakukan. Persentase capaian IKU dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik 3.1

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama



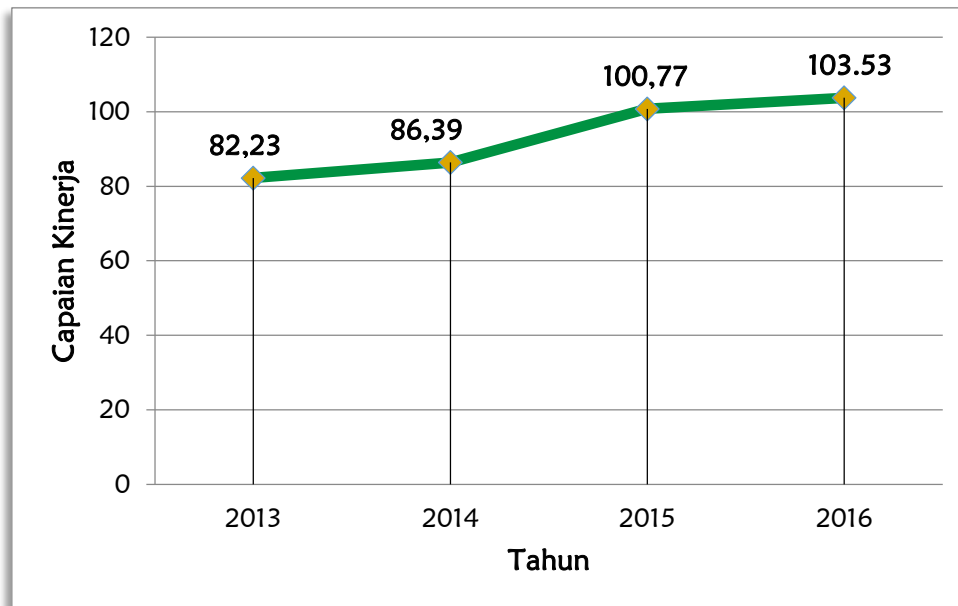
Capaian kinerja pada 1 (satu) IKU yang termasuk kategori “kurang” atau belum mencapai target seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dan 2 (satu) IKU yang tidak dilakukan perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Prestasi MTQ di Tingkat Propinsi dengan persentase capaian “0%”. Hal ini karena pada tahun 2016 tidak ada penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi (IKU Nomor 4 pada tabel 3.2).
2. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha dengan persentase capaian “0%”. Belum disahkannya qanun oleh pihak legislatif menjadi kendala pencapaian IKU ini. Pihak eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengajukan rancangan qanun ke pihak legislatif pada tahun 2016. Diharapkan pada tahun 2017 rancangan qanun ini bisa disahkan menjadi qanun (IKU nomor 31 pada tabel 3.2).
3. Peringkat Kelulusan Tk. Nasional tidak dilakukan perhitungan capaian kinerja disebabkan adanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus perangkingan hasil ujian nasional secara nasional (IKU nomor 43 pada tabel 3.2).

Berdasarkan uraian diatas, rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2016 adalah sebesar 103,74% atau kriteria sangat baik. Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 sebesar 100,77%, mengalami kenaikan sejalan dengan meningkatnya kinerja satuan kerja untuk mencapai target akhir RPJMD periode 2012-2017. Perbandingan capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh dari tahun 2013-2016 secara detail dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2

Perbandingan Capaian Kinerja, 2013 - 2016



Penjelasan atas setiap capaian kinerja dan target IKU yang telah ditentukan seperti tertuang pada sub bab 3.1.1 berikut ini.

3.1.1. Analisis Capaian Kinerja

Bagian ini akan menguraikan analisis capaian sasaran strategis yang menjelaskan capaian kinerja atas target IKU sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis.

Sasaran Strategis I

Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat.

Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan sesuai UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kekhususan tersebut dijabarkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu kekhususan yang dimiliki adalah kewenangan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang aqidah, syar'iyah dan akhlak yang meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.

Kota Banda Aceh memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan syariat islam, sebagai ibukota propinsi otomatis Kota Banda Aceh menjadi barometer dan sorotan terhadap pelaksanaan syariat islam. Kota Banda Aceh yang memiliki penduduk heterogen, merupakan tempat berkumpulnya orang dengan suku, adat istiadat, budaya, dan

agama berbeda sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh negatif seperti prilaku dan aliran menyimpang.

Salah satu sasaran Pemerintah Kota Banda Aceh adalah mewujudkan pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dalam kehidupan masyarakat. Aspek penting dari sasaran tersebut dapat dilihat antara lain melalui tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan norma-norma yang berlaku dalam hukum islam, yang secara tidak langsung dapat menekan angka pelanggaran qanun syariat islam dan penangkalan aliran-aliran yang merusak aqidah islam.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 115,79%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Menurunnya jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/ menyimpang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Menurunnya jumlah kelompok aliran yang diduga sesat/ menyimpang	Kelompok	0	0	100%

Tidak berkembangnya aliran sesat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembinaan aqidah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh. Kegiatan pengawasan terhadap individu atau kelompok asing yang terindikasi membawa pengaruh sesat terhadap aqidah masyarakat, ditingkatkan dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat mulai dari aparat gampong sampai Forkopimda.

Pada kasus-kasus sebelumnya di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh menemukan bahwa kelompok remaja yang paling rentan terpengaruh oleh ajaran atau aliran menyimpang/sesat seperti yang ditemukan pada kasus kelompok aliran sesat Milata Abraham dan Gafatar pada tahun-tahun sebelumnya. Menyadari hal tersebut, kegiatan pembinaan aqidah telah dimulai sejak dini melalui kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang meluncurkan program pendidikan diniyah pada sekolah umum untuk semua jenjang pendidikan dari tingkat SD sampai SMA dengan memberikan materi pendidikan tentang pengetahuan agama Islam yang mencakup secara keseluruhan di luar kurikulum pendidikan nasional serta ditambah pelaksanaan kajian Islam dan dakwah umum rutin bagi siswa dan guru. Pendidikan Diniyah ini dilaksanakan dua kali seminggu pada sore hari dengan pembiayaan melalui APBK Kota Banda Aceh.

Tindakan hukum melalui Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang mengeluarkan fatwa sesat atau menyimpang terhadap kelompok sempalan juga berdampak dengan sadarnya pengikut aliran tersebut untuk kembali kepada ajaran islam yang benar sesuai tuntunan al-quran dan hadist.

Selain itu, Sosialisasi pengaruh negatif aliran sesat menjadi fokus Pemerintah Kota Banda Aceh selama tahun 2016, termasuk meningkatkan dakwah dan ceramah-

ceramah keagamaan di setiap gampong guna mengantisipasi masuk dan berkembangnya kembali aliran yang diduga sesat/ menyimpang di Kota Banda Aceh. Hasil positif dari berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh, terlihat selama tahun 2016 tidak ditemukannya kasus kelompok yang terindikasi menjalankan atau menyebarkan aliran yang diduga sesat atau menyimpang dari aqidah Islam di Kota Banda Aceh.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan 3 tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Menurunnya kelompok aliran yang diduga sesat/menyimpang	3 aliran	2 aliran	3 aliran	2 aliran	0 aliran	0 aliran	100%

Dari tabel diatas terlihat target kinerja RPJMD telah tercapai atau dengan kata lain upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan Kota Banda Aceh bersih dari aliran sesat pada tahun 2017 telah dapat dicapai 100% pada tahun 2016.

Indikator 2 : Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	Kasus	125	95	131,58%

Sebagai propinsi di Indonesia yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus dalam penerapan syariat islam, melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Aceh, diterbitkan payung hukum yang mengatur terhadap pelanggaran syariat islam dalam bentuk Qanun/Perda, yaitu:

1. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
2. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
3. Qanun Nomor 14 Tahun 2004 tentang khalwat (mesum)

Keseriusan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menerapkan Qanun tersebut melalui ranah Wilayahul Hisbah (petugas penegakan syariat islam) dapat dilihat dari pencapaian Indikator Kinerja berupa penyelesaian kasus pelanggaran syariat islam.

Capain indikator kinerja menunjukkan jumlah kasus pelanggaran qanun syariat islam pada tahun 2016 sebanyak 95 kasus, jumlah ini lebih rendah dari perkiraan

terhadap tindakan pelanggaran Qanun Syariat Islam sebanyak 125 kasus atau capaian kinerja sebesar 131,58%. Hal ini menunjukkan hasil positif dari sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dibandingkan tahun 2015 jumlah kasus pelanggaran Qanun Syariat Islam pada tahun 2016 jauh menurun mencapai 24%. Jumlah pelanggaran Qanun Syariat Islam ditangani selama tahun 2016, seperti ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam Yang Ditangani Tahun 2016

No	Jenis Kasus pelanggaran	Jumlah Kasus	Ket
1.	Minuman Khamar	4	dituntaskan
2.	Maisir (Perjudian)	7	dituntaskan
3.	Khalwat (Mesum)	84	dituntaskan
Jumlah		95	

Sumber : Satpol PP dan WH, 2017

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Menurunnya jumlah Pelanggaran Qanun Syariat Islam	386 kasus	218 kasus	139 kasus	125 kasus	95 kasus	100 kasus	105,26%

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang ditangani selama tahun 2016 sebanyak 95 kasus, jumlah ini telah melebihi dari target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD sebanyak 100 kasus atau capaian kinerja 105,26%. Penegakan Qanun Syariat Islam menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Banda Aceh, untuk menekan seminimal mungkin angka pelanggaran syariat islam melalui penerapan kebijakan, sosialisasi, penegakan hukum sesuai Qanun syariat islam serta membangun komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Sasaran Strategis 2

Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi.

Masyarakat Kota Banda Aceh yang memiliki pondasi agama dan kultur sosial budaya yang kuat serta mengakar dihadapkan pada tantangan era globalisasi yang membawa perubahan-perubahan yang cukup drastis dalam kehidupan masyarakat.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi disertai masuknya budaya asing membawa dampak yang cukup signifikan mencakup kehidupan sosial dan budaya masyarakat.

Sebagai pengambil dan pelaksana kebijakan, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya membentengi pengaruh negatif yang berkembang dari efek globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan budaya masyarakat. Namun, kebijakan yang diterapkan tidak serta merta menutup diri dari modernisasi, hal ini terlihat dari sasaran Kota Banda Aceh untuk menciptakan masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi. Upaya yang dilakukan lebih diarahkan untuk menyeimbangkan iptek dan imtaq. Berbagai langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menguatkan nilai imtaq terutama bagi generasi muda yang rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi dapat terlihat dari capaian indikator kinerja berikut yang dapat menjadi gambaran pencapaian dari sasaran terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi.

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 115,68%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah.	%	97	97	100%

Dari tabel diatas dapat diketahui indikator meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah, target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2016 sama seperti pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 97% dan dapat dicapai sebesar 97% atau mencapai 100%. Hasil evaluasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, bahwa pelaksanaan program pendidikan diniyah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah pada angka 97% dari seluruh siswa muslim yang menempuh pendidikan jenjang sekolah menengah sebelum penerapan pendidikan diniyah.

Secara umum seluruh jenjang pendidikan di Kota Banda Aceh telah melaksanakan kurikulum yang berbasis islami melalui kompetensi inti, yang terdiri dari aspek sikap spiritual (aspek ketuhanan) dan aspek sikap sosial. Sebagai daerah yang memiliki kekhususan terkait penerapan syariat islam, Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan kebijakan pendidikan diniyah yang merupakan program untuk meningkatkan pengetahuan agama bagi generasi muda guna memperkuat akidah sesuai dengan ajaran islam yang benar.

Melalui program pendidikan diniyah tersebut, pada tahun ini ada 10 siswa-siswi yang lulus SMA dengan kemampuan menghafal Al-Quran 30 juz. Selain itu pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh mengembangkan program Hafiz (Penghafal) Al-Quran di bangku sekolah, dengan model percontohan pada SMPN 4 Kota Banda Aceh.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2016 dengan 3 tahun sebelumnya dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah	31,20%	87%	93%	97%	97%	98%	98,97%

Dari tabel diatas terlihat tidak terjadi peningkatan persentase kemampuan baca Al-quran siswa tingkat sekolah menengah dari tahun sebelumnya. Capaian kinerja sampai tahun 2016 dari target akhir RPJMD telah tercapai 98,97%. Jika melihat capaian tersebut, maka target akhir RPJMD sebesar 98% akan dapat dicapai, tentunya hal ini didukung dengan prioritas pembangunan Kota Banda Aceh bidang pendidikan yang diarahkan untuk mewujudkan pendidikan berkarakter islami disertai peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing murid di tingkat nasional.

Indikator 2 : Meningkatnya prestasi MTQ di tingkat propinsi.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya prestasi MTQ di tingkat propinsi	peringkat	Tidak dilaksanakan	Tidak dilaksanakan	0%

Indikator Meningkatnya prestasi MTQ di tingkat propinsi tidak ditetapkan target kinerja karena pada tahun 2016 tidak ada penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi.

Indikator 3 : Meningkatnya kemampuan baca tulis arab jawi siswa sekolah.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Meningkatnya kemampuan baca tulis arab jawi siswa sekolah	%	100	97%	97%

Pendidikan diniyah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama islam

baik formal, non-formal maupun informal. Para siswa diajarkan berbagai materi agama islam meliputi ilmu ketauhidan, Al-quran, budi pekerti, dan pemahaman hukum-hukum islam (fikih) serta kemampuan untuk baca tulis arab jawi. Sepanjang pelaksanaan program diniyah sampai tahun 2016, telah mampu meningkatkan kemampuan baca tulis arab jawi secara baik dikalangan siswa sekolah menengah yang mencapai 97% dari total jumlah siswa sekolah menengah beragama islam di Kota Banda Aceh. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 sebesar 95%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya kemampuan baca Tulis Arab Jawi siswa sekolah menengah	0%	75%	88%	95%	97%	100%	97%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah siswa sekolah menengah yang mampu baca tulis arab jawi. Capaian sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir tahun RPJMD telah tercapai 97%. Diharapkan target siswa sekolah menengah yang mampu baca tulis arab jawi sebesar 100% pada akhir tahun RPJMD dapat dicapai, melalui pelaksanaan program pendidikan diniyah bagi siswa sekolah di Kota Banda Aceh.

Indikator 4 : Meningkatkan frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
4.	Meningkatnya frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat	kali	362	600	165,75%

Dalam mendukung terwujudnya visi Banda Aceh sebagai model kota madani, Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan pemahaman dan pengamalan syariat islam sebagai prioritas pembangunan pada tahun 2016, yang diarahkan untuk mewujudkan tatanan kerja birokrasi pemerintah dan kehidupan masyarakat dalam bingkai aturan syariat Islam. Salah satu upaya yang dilaksanakan adalah syiar dan dakwah di masyarakat. Dakwah dan syiar juga merupakan bagian dari sosialisasi Syariat Islam bagi seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Dinamisasi dan globalisasi dunia saat ini menuntut terus menghidupkan dakwah dan syiar dalam berbagai aspek kehidupan. Selama tahun 2016, dilaksanakan kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja meningkatnya frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat, sebagai berikut :

1. Safari Dakwah Malam Ahad (Safda Ahad)

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 48 kali, yang diarahkan dalam upaya memakmurkan mesjid dan menghidupkan shalat berjamaah yang dilaksanakan setiap minggu di mesjid-mesjid dalam wilayah Kota Banda Aceh

2. Dakwah Umum Jum'atan

Pemerintah Kota Banda Aceh secara rutin melaksanakan dakwah umum jum'atan yang dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali pada jum'at pagi bertempat di Taman Bustanul Salatin (Taman Sari). Dakwah umum Jum'atan ini diikuti oleh seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh dan masyarakat umum yang bertujuan meningkatkan pemahaman syariat islam bagi seluruh warga Kota Banda Aceh. Dalam kegiatan ini penceramah yang diundang dari berbagai daerah di Aceh dan Nasional untuk memberikan pencerahan dan menambah pemahaman islam secara lebih mendalam kepada warga Kota Banda Aceh

3. Safari Da'iyah

Kegiatan ini dilaksanakan dilaksanakan 44 kali yang dibagi dalam 2 Tim, masing-masing Tim terdiri dari 10 Orang Da'l yang langsung melaksanakan dakwah ditengah masyarakat. Kegiatan bertujuan untuk Melakukan Syiar dan Dakwah kepada masyarakat.

4. Kajian Bagi Pejabat Pemko dan Masyarakat

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 11 kali setiap bulan bagi para pejabat struktural dan seluruh elemen masyarakat yang dilaksanakan setiap ba'da maghrib di mesjid-mesjid Kota Banda Aceh. Kegiatan ini bertujuan menambah wawasan keagamaan bagi pejabat dan masyarakat Pemerintah Kota.

5. Safari Sekolah

Safari dakwah di sekolah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dengan mendatangi sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh khusus hari Jumat, pada tahun 2016 dilaksanakan sebanyak 11 kali. Kegiatan ini diisi dengan ceramah agama dengan menghadirkan dai-dai yang memiliki kompetensi.

6. Ceramah Penyejuk Hati Bulan Ramadhan

Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 300 kali bekerjasama dengan 10 radio dan TV lokal di Kota Banda Aceh.

7. Dakwah Da'iyah Ramadhan

Kegiatan ini dilaksanakan pada 90 gampong di wilayah Kota Banda Aceh dalam Bulan Ramadhan, dengan tujuan bertujuan untuk meningkatkan amalan dan pemahaman umat islam di Kota Banda Aceh.

8. Dakwah Gampong

Dakwah gampong merupakan ajang silaturahmi dalam memperkuat nilai ukhuwah islamiyah ditengah masyarakat. Kegiatan ini merupakan safari tim dakwah Kota Banda Aceh keseluruh atau 90 gampong di Kota Banda Aceh.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya frekwensi kegiatan syiar dan dakwah di masyarakat	43 kali	102 kali	299 kali	337 kali	600 kali	1505 kali	88,90%

Dari tabel di atas dapat dilihat peningkatan jumlah syiar dan dakwah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahunnya. Peningkatan ini merupakan upaya dalam mewujudkan visi Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. Jumlah kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 mengalami peningkatan 78,04% dan sampai dengan tahun 2016 telah dilaksanakan 1338 kegiatan syiar dan dakwah dari target 1505 kali yang direncanakan pada akhir tahun RPJMD atau telah tercapai 88,90%.

Indikator 5 : Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
5.	Meningkatnya jumlah masjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban	Mesjid	9	9	100%

Untuk mengoptimalkan masjid sebagai pusat pembinaan umat Islam, Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Syariat Islam melaksanakan pembinaan pengurus mesjid mengenai tata kelola mesjid secara professional. Pembinaan yang dilakukan meliputi : imarah, idharah, riayah dan aspek-aspek pendukung kemakmuran mesjid lainnya. Secara bertahap pengelolaan mesjid di Kota Banda Aceh menuju tata kelola professional, dari segi manajemen dan kelembagaan sehingga perannya dapat berjalan optimal. Peningkatan sarana dan prasarana mesjid terus dilakukan setiap tahunnya melalui anggaran APBK Kota Banda Aceh untuk peningkatan standar kebersihan dan ketertiban mesjid.

Tahun 2016 fokus pembinaan pada 9 (sembilan) mesjid untuk peningkatan standar standar kebersihan dan ketertiban, antara lain :

1. Mesjid Al-Abrar, gampong Lamdingin
2. Mesjid Baitul Al-Muqarrabin, gampong Punge Blang Cut
3. Mesjid Al-Istiqamah, gampong Sukaramai
4. Mesjid Nurul Huda, gampong Penyeurat
5. Mesjid Babun Najah, gampong Surien
6. Mesjid Tgk. Dianjong, gampong Peulanghahan

7. Mesjid Ar-Rahman, gampong Panteriek
8. Mesjid Sabilil Jannah, gampong Doy
9. Mesjid Syuhada, gampong Lamgugop

Peningkatan standar kebersihan dan ketertiban mesjid, meliputi aspek :

1. Bidang Imarah (pelaksanaan ibadah), item yang dinilai :
 - Pelaksanaan shalat fardhu lima waktu berjamaah
 - Tertib pelaksanaan shalat jumát
 - Tertib pelaksanaan ibadah sosial
2. Bidang Idharah
 - Tertib administrasi mesjid (diutamakan ketersediaan struktur kepengurusan mesjid)
3. Bidang Riáyah
 - Pemeliharaan bangunan mesjid
 - Pemeliharaan halaman dan lingkungan mesjid

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya jumlah mesjid yang memenuhi standar kebersihan dan ketertiban	9 mesjid	9 mesjid	9 mesjid	9 mesjid	9 mesjid	54 mesjid	83,33%

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel diatas, Jumlah mesjid yang memenuhi standar Kebersihan dan ketertiban setiap tahunnya meningkat. Sampai dengan tahun 2016 jumlah mesjid yang telah meningkatkan standar kebersihan dan ketertiban sebanyak 45 mesjid dari 54 mesjid yang ditargetkan pada akhir tahun RPJMD atau telah tercapai 83,33%.

Sasaran Strategis 3

Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel.

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai implementasi UU Nomor 11 Tahun 2006, dimana Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal. Lewat Qanun Kota Banda Aceh 5 Tahun 2010, dibentuk struktur organisasi lembaga keistimewaan, termasuk salah satunya struktur organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kota Banda Aceh yang dikuatkan dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010.

Baitul Mal Kota Banda Aceh merupakan lembaga independen yang bertugas mengelola ZIS mulai dari memungut, menyimpan, dan mendistribusikan harta zakat

sehingga pengelolaan zakat dapat dikelola secara profesional dan terorganisir. Untuk mewujudkan manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel, selain terdapat pengurus juga dibentuk dewan pengawas melalui Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 34 Tahun 2011 tentang Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Banda Aceh.

Dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal telah mengadopsi fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Informasi pengelolaan ZIS juga dapat langsung diakses oleh masyarakat melalui <http://baitulmal.bandaacehkota.go.id/>. Melalui situs tersebut masyarakat dapat langsung mengawasi kinerja dan penyaluran zakat oleh Baitul Mal.

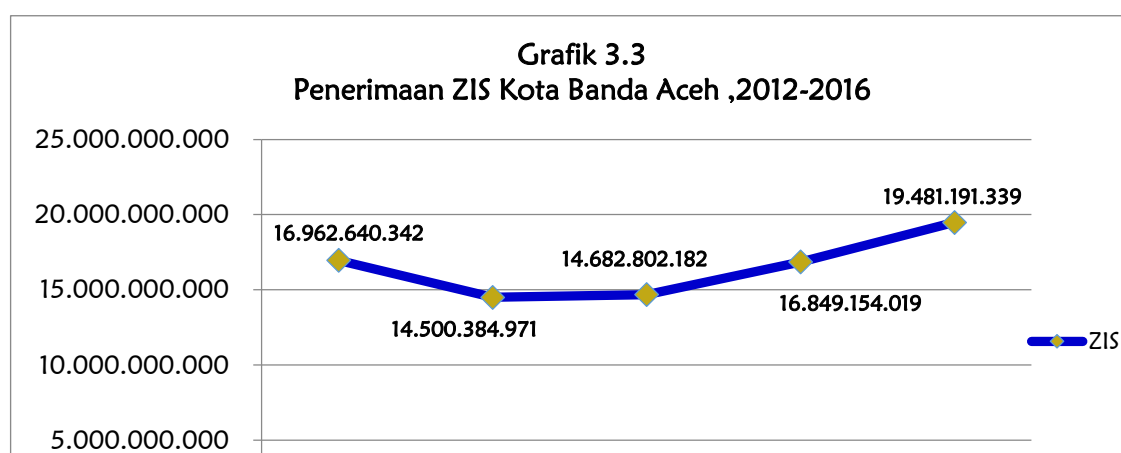
Kinerja utama dari capaian sasaran terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel, dapat terlihat dari meningkatnya jumlah muzakki yang berdampak pada meningkatnya penerimaan ZIS. Keterkaitan ini terletak pada tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap lembaga Baitul Mal.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 99,95%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Meningkatnya penerimaan Zakat, Infaq dan Sedakah (ZIS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya penerimaan Zakat, Infaq dan Sedakah (ZIS)	Rupiah	19.209.350.172	19.481.191.339	101,42%

Indikator kinerja meningkatnya penerimaan Zakat, Infaq dan Sedakah (ZIS) diukur dari selisih penerimaan ZIS tahun 2016 dibandingkan penerimaan ZIS tahun 2015. Dari tabel diatas terlihat target penerimaan ZIS tahun 2016 sebesar Rp. 19.209.350.172,- dan berhasil terealisasi melebihi target sebesar Rp. 19.481.191.339,- sehingga capaiannya sebesar 101,42%. Capaian kinerja atas indikator mengalami kenaikan sebesar 15,62% dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2015 realisasi indikator kinerja ini sebesar 16.489.154.019,-. Penerimaan ZIS di Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2012-2016, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Baitul Mal Kota Banda Aceh, 2017

Peningkatan penerimaan ZIS, tidak terlepas dari kegiatan yang dilakukan, antara lain :

- Pembinaan dan penyuluhan kepada calon muzakki agar dapat menyalurkan ZIS pada Baitul Mall Kota Banda Aceh.
- Transparansi pengelolaan ZIS yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website : baitulmal.bandaacehkota.go.id dan dipublikasikan lewat surat kabar.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya penerimaan Zakat, Infaq dan Sedakah (ZIS)	Rp. 16.962.640.342	Rp. 14.500.384.971	Rp. 14.682.802.182	Rp. 16.849.154.019	Rp. 19.481.191.339	Rp. 21.300.000.000	91,46%

Jumlah Penerimaan ZIS semakin meningkat dari tahun ke tahun dan selalu melebihi target yang ditetapkan. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh optimis dapat mencapai target akhir RPJMD sebesar 21.300.000.000,-. Jika membandingkan capaian kinerja sampai tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD telah tercapai 82,78%.

Indikator 2 : Meningkatnya jumlah Muzakki

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya jumlah Muzakki	Orang	9.195	9.054	98,47

Indikator kinerja meningkatnya jumlah Muzakki diukur dari selisih jumlah Muzakki tahun 2016 dibandingkan jumlah Muzakki tahun 2015. Dari tabel diatas

terlihat indikator kinerja tidak mencapai target. Realisasi jumlah Muzakki tahun 2016 sebanyak 9.054 orang dari target sebanyak 9.195 orang, sehingga capaiannya sebesar 98,47%. Jumlah mengalami penurunan sebesar 1,51% dibandingkan dengan capaian tahun 2015. Pada tahun 2015 realisasi indikator kinerja ini mencapai 9.193 orang Muzakki.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya jumlah Muzakki	8.166	8.705	8.851	9.193	9.054	9.497	95,34%

Dari tabel diatas terlihat capaian indikator jumlah muzakki tahun 2016 sebanyak 9.054 orang, menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 9.193 orang. Jika dibandingkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dengan target kinerja akhir periode RPJMD sebanyak 9.497, maka capaian kinerja telah mencapai 95,34%.

Sasaran Strategis 4

Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggungjawab

Salah satu tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas birokrasi pemerintah. Melalui penataan manajemen SDM aparatur diharapkan aparatur pemerintah memiliki kompetensi handal dan profesional dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Manifestasi tersebut mengisyaratkan bahwa pembinaan dan pengembangan SDM aparatur perlu terus mendapat perhatian, berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pelayanan publik. Dipahami bahwa kualitas aparatur itu sendiri tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit. Membentuk sosok SDM aparatur memang memerlukan waktu dan proses serta upaya yang tidak boleh berhenti.

Berpijak dari hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan yaitu Banda Aceh Academy (BAA) untuk peningkatan kemampuan atau kompetensi aparatur melalui kebijakan penerapan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Banda Aceh Academy (BAA) merupakan wadah pengembangan kapasitas bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh khususnya pelatihan bersifat teknis dan fungsional. Pelatihan yang diberikan oleh BAA merupakan respon atas kebutuhan PNS dalam meningkatkan ketrampilan pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dimiliki, yang pada akhirnya akan menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten dan professional. BAA menyusun kalender pendidikan dan pelatihan berdasarkan program prioritas yang dianggap penting dan mendesak bagi kebutuhan organisasi serta usulan dan permintaan dari SKPD.

Selain itu *Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan kesempatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang ingin melanjutkan pendidikan baik melalui jalur tugas belajar maupun izin belajar. Hal ini tercermin dari penyediaan beasiswa dan bantuan pendidikan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan.*

Dalam Membentuk aparatur pemerintahan yang kompetensi, kompetitif, amanah, professional dan bertanggungjawab, Pemerintah Kota Banda Aceh mewajibkan aparatur pemerintahan membuat dan menandatangani pakta integritas dan perjanjian kinerja yang memuat target kinerja yang harus dicapai oleh ybs.

Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 137,94%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan	%	80	85	106%

Penempatan pejabat sesuai disiplin ilmu merupakan upaya mempercepat proses pelaksanaan kegiatan secara benar dan tepat. Melalui penempatan sesuai latar belakang pendidikan, para pemangku jabatan tersebut dapat mengaplikasikan ilmu yang dimiliki terhadap bidang tugas yang ditangani.

Menurut hasil pemetaan terhadap tingkat pendidikan para pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun 2016, jumlah pejabat struktural yang ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan sebanyak 565 orang atau mencapai 85,48% dari 662 jumlah jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Tahun 2017 pengisian jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh akan berdasarkan hasil penataan organisasi perangkat daerah sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Khusus untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) akan menggunakan seleksi terbuka sesuai amanah UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan sistem kompetisi ini diharapkan akan didapatkan pemangku jabatan yang memiliki kompetensi dan berintegritas tinggi.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan	60%	60%	70%	85%	85%	85%	100%

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar belakang pendidikan sampai tahun 2016 terhadap target kinerja akhir RPJMD telah tercapai 100%. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penempatan PNS dengan pola the right man on the right place.

Indikator 2 : Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan	%	59	75	127,19%

Pengangkatan pejabat struktural idealnya pejabat tersebut memiliki kompetensi dan kualifikasi sesuai bidang jabatan serta telah mengikuti diklat perjenjangan walaupun diklat tersebut dapat diikuti setelah pejabat tersebut menduduki jabatan. Diklat perjenjangan wajib diikuti oleh pejabat struktural sesuai tingkatan eselonoring dari jabatan yang diduduki.

Jumlah pejabat struktural dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memenuhi kualifikasi ideal diklat perjenjangan sesuai jabatan mencapai 75% atau sebanyak 497 orang dari 661 pejabat struktural. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 77%, hal ini karena adanya pergantian jabatan yang disebabkan pejabat lama yang memasuki usia pensiun dan promosi jenjang jabatan yang lebih tinggi dan pejabat yang bersangkutan belum mengikuti diklat perjenjangan untuk jenjang jabatan tersebut.

Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran sehingga Pemerintah Kota Banda Aceh hanya menyelenggarakan satu angkatan diklat perjenjangan setiap tahunnya.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan	32%	38%	49%	77,34 %	75%	85%	88,23%

Dari tabel diatas, terlihat jumlah pejabat struktural yang telah lulus diklat perjenjangan sesuai jenjang jabatan setiap tahunnya terus meningkat. Sampai tahun 2016, persentase penempatan pejabat yang sesuai dengan latar diklat penjenjangan telah mencapai 88,23% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 85%.

Indikator 3 : Jumlah APIP yang bersertifikasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Jumlah APIP yang bersertifikasi	orang	23	23	100%

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian internal adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini sejalan dengan peran dan fungsi pengawas internal untuk membantu pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkannya melalui pendekatan yang sistematis dan terarah dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*), pengendalian (*control*), dan proses tata kelola pemerintahan (*governance process*). APIP juga mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam mengemban tugas tersebut dibutuhkan personil APIP yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai. Upaya peningkatan SDM APIP salah satunya melalui pendidikan dan latihan yang terukur dan berkelanjutan. Mengingat pentingnya peran APIP dan masih kurangnya APIP dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga peningkatan jumlah APIP yang bersertifikasi dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh.

Sampai tahun 2016 jumlah auditor dan P2UPD (Pengawas Pemerintah Untuk Urusan Pemerintah Daerah) dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah bersertifikasi berjumlah 23 orang atau capaian indikator kinerja 100% dari target yang ditetapkan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 17 orang, artinya pada tahun 2016 bertambah 5 orang yang lulus sertifikasi kualifikasi sebagai APIP.

Kendala utama yang dihadapi terkait peningkatan tenaga APIP adalah kurangnya SDM yang memiliki kualifikasi untuk mengikuti sertifikasi sebagai APIP dan beberapa APIP yang dipromosikan ke jenjang jabatan struktural yang secara otomatis berdampak berkurangnya tenaga APIP.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah APIP yang bersertifikasi	20 orang	15 orang	13 orang	17 orang	23 orang	27 orang	85,19%

Dari tabel diatas, terlihat jumlah APIP yang bersertifikasi terus meningkat, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Sampai tahun 2016, persentase jumlah APIP yang bersertifikasi mencapai 85,19% atau 23 orang jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 27 orang.

Indikator 4 : Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
4.	Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal	rekomendasi	651	281	231,68%

Aspek pengendalian internal yang dilaksanakan menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyalarsan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Menurut hasil laporan Inspektorat Kota Banda Aceh sebagai aparat pengawas internal pemerintah, sampai dengan bulan Desember 2016 telah dilakukan pemeriksaan reguler dan pengukuran kinerja instansi atas pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2015 terhadap 39 SKPD dan sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hasil dari pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal tahun 2016 terdapat 281 temuan yang direkomendasikan untuk ditindak lanjuti. Jumlah ini jauh menurun dari temuan tahun 2015 sebanyak 541 temuan.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal	2106 rekomendasi	921 rekomendasi	805 rekomendasi	541 rekomendasi	281 rekomendasi	600 rekomendasi	213,52%

Dari tabel diatas terlihat, dibandingkan dengan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti tahun 2015 sebanyak 541 rekomendasi, maka capaian kinerja tahun 2016 sebanyak 281 rekomendasi yang dikeluarkan menunjukkan hasil positif, artinya pembinaan dan pengawasan berkesinambungan terhadap SKPD berjalan baik dimana angka penyimpangan khususnya terhadap pengelolaan keuangan dapat ditekan seminimal mungkin. Jika melihat realisasi sampai tahun 2016, maka capaian kinerja akhir RPJMD menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan dan pengawasan internal dan eksternal telah melebihi dari target yang ditetapkan atau mencapai 213,52%.

Indikator 5 : Menurunnya jumlah PNS yang indisipliner

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
5.	Menurunnya jumlah PNS yang indisipliner	PNS	40	32	125%

Upaya penegakan disiplin dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dilakukan melalui monitoring/sidak dan pembinaan secara langsung pada SKPD oleh Tim

Pembinaan, Pemeriksaan dan Penegakan Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh yang dibentuk dengan Keputusan Walikota Banda Aceh.

Penilaian indikator kinerja menurunnya jumlah PNS yang indisipliner diukur melalui kasus pelanggaran disiplin tingkat ringan, sedang dan berat yang diproses oleh tim penegakan disiplin Pemerintah Kota Banda Aceh.

Pada tahun 2016 jumlah angka pelanggaran disiplin PNS yang dikenakan sanksi sesuai PP 53 Tahun 2010 sebanyak 32 kasus, jauh menurun dibandingkan angka pelanggaran tahun 2015 sebanyak 50 kasus. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebanyak 40 kasus pelanggaran disiplin maka capaian kinerja tahun 2016 mencapai 125%. Keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh menekan angka pelanggaran disiplin dikarenakan tingkat kesadaran PNS yang semakin tinggi terhadap tugas dan kewajiban serta memperkuat regulasi di internal Pemerintah Kota Banda Aceh terkait penerapan absensi kehadiran dan pengukuran kinerja pegawai.

Penetapan hukuman disiplin dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan oleh tim penegakan disiplin yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, dengan rincian sebagai berikut ::

- 2 orang dijatuhi hukuman disiplin berat
- 3 orang dijatuhi hukuman disiplin sedang
- 27 orang dijatuhi hukuman disiplin ringan

Bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin ringan, tahapan penjatuhan hukuman disiplin dilaksanakan oleh pimpinan SKPD.

Dalam upaya penegakan disiplin, Pemerintah Kota Banda Aceh telah membangun aplikasi e-disiplin. Sistem ini berupa aplikasi absensi online yang bertujuan merekam tingkat kehadiran PNS secara online dan memudahkan pembinaan PNS sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai.

Aplikasi ini dapat menjadi sebuah alat deteksi dini bagi pegawai terhadap disiplin kerja dan bagi atasan langsung. Pimpinan SKPD serta pejabat pembina kepegawaian dapat menggunakannya sebagai sarana monitoring dan evaluasi dalam memantau tingkat kehadiran pegawai dan meminimalisir pelanggaran/sanksi yang terjadi. Melalui aplikasi e-disiplin, atasan langsung dan pejabat pembina kepegawaian dapat menerima secara otomatis notifikasi terhadap tahapan pelanggaran yang telah dilakukan oleh seorang pegawai.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Menurunnya jumlah PNS yang indisipliner	57 PNS	69 PNS	60 PNS	50 PNS	32 PNS	30 PNS	93,75%

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat pelanggaran disiplin terus menurun setiap tahunnya. Ini merupakan hasil dari pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Tim Pembinaan, Pemeriksaan dan Penegakan Disiplin Aparatur Pemerintah Kota Banda Aceh. Sampai tahun 2016, angka kasus PNS yang indisipliner dapat ditekan hingga 32 PNS, jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yang ditargetkan pelanggaran indisipliner pada angka 30 PNS maka persentase capaian sebesar 93,75%.

Sasaran Strategis 5

Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government

Pemanfaatan teknologi saat ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari, karena kebutuhan informasi yang sangat cepat dan tepat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Keberadaan teknologi merupakan jawaban untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Pembangunan pemerintahan berbasis e-government di Kota Banda Aceh mulai menjadi perhatian serius pasca tsunami, dimana Pemerintah Kota Banda Aceh banyak mendapatkan bantuan terutama dari lembaga-lembaga donor yang konsen terhadap peningkatan kapasitas pemerintahan. Hal ini tercermin dari terbentuknya Municipalities Information Manajemen System (MIMS) untuk memfasilitasi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengembangkan Teknologi Komunikasi (TIK) dengan tujuan mengembangkan sebuah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Kota yang berbasis elektronik dan terintegrasi secara menyeluruh sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh demi meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik, khususnya di Kota Banda Aceh.

MIMS merupakan proyek kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan GTZ – SLGSR dan diresmikan pada tahun 2009. sistem tersebut merupakan cikal-bakal mewujudkan Banda Aceh sebagai cyber city. Salah satu program cyber city yang telah berjalan adalah dengan memfasilitasi dan memberikan layanan kawasan internet gratis (hotspot) di daerah publik seperti taman bermain dan warung kopi.

Selain itu, seluruh SKPK dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh telah terkoneksi jaringan internet dan memiliki website tersendiri serta terintegrasi dengan website resmi Pemerintah Kota Banda Aceh : www.bandaacehkota.go.id. Saat ini Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengadopsi teknologi informasi sebagai infrastruktur utama pelayanan publik, ini dapat terlihat dari pembangunan berbagai aplikasi pelayanan berbasis e-government baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti yang diuraikan pada Indikator Kinerja sasaran strategis berikut ini :

Indikator 1 : Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	Aplikasi	78	88	112,82%

Meningkatnya pembangunan aplikasi berbasis e-government dimaksudkan sebagai indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan pemerintahan yang berbasis e-government. Pembangunan pemerintahan yang berbasis e-government telah dimulai sejak tahun 2012, yang diwujudkan dengan pengembangan berbagai aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan masyarakat. Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan ada yang bersifat terbuka/publik dan bersifat tertutup/privat. Aplikasi ini melengkapi keberadaan website Pemerintah Kota Banda Aceh dan website 39 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Saat ini keseluruhan aplikasi yang telah dibangun di Kota Banda Aceh berjumlah 88 Aplikasi, termasuk 11 aplikasi yang dibangun pada tahun 2016. Keseluruhan aplikasi yang dibangun dan dikelola tersebut dapat diakses melalui portal <http://layanan.bandaacehkota.go.id>.

Pemerintah Kota Banda Aceh saat ini sedang berusaha mewujudkan Banda Aceh sebagai smart city. Pembangunan kualitas masyarakat Kota Banda Aceh yang cerdas dan melek teknologi merupakan bagian dari mewujudkan Banda Aceh sebagai smart city. Hal tersebut diimplementasikan dengan kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh bersama PT. Telkom dalam pembangunan infrastruktur jaringan digital berupa pemasangan fiber optik dan jaringan 4G-nya serta sejumlah free hot spot di berbagai titik Kota Banda Aceh selama tahun 2016.

Selain itu, Keterbukaan informasi dan data berbagai kebijakan dan program pembangunan di Kota Banda Aceh merupakan komitmen pemerintah Kota Banda Aceh untuk mendukung tata kelola keterbukaan pemerintah. Hal itu diwujudkan dengan pengembangan aplikasi open data yang pada tahun 2016, telah 50 % SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh terintegrasi dalam Open Data Labs yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Pada tahun 2017 ditargetkan seluruh SKPD telah terintegrasi dalam program Open Data.

Pada tahun 2016, Kota Banda Aceh menjadi salah satu pilot project Open Government Indonesia (OGI) yang merupakan salah satu program prioritas presiden Jokowi. Hal ini tentunya membuktikan kesungguhan Pemerintah Kota Banda Aceh menuju keterbukaan informasi publik dan pelibatan kontribusi masyarakat dalam program pembangunan.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya jumlah pembangunan aplikasi berbasis e-government	29 aplikasi	47 aplikasi	57 aplikasi	77 aplikasi	88 aplikasi	88 aplikasi	100%

Dari tabel diatas, terlihat pembangunan aplikasi berbasis e-government sampai dengan tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah mencapai 100%. Tentunya hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan sasaran terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government.

Sasaran Strategis 6

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Target Pemko Banda Aceh dalam reformasi birokrasi mengacu pada target dan indikator reformasi nasional yakni pemerintahan yang bersih, perbaikan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan kapasitas dan performa akuntabilitas birokrasi. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan reformasi birokrasi disetiap aspek Pemerintahan Kota Banda Aceh. Upaya strategis yang dilakukan antara lain menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2015-2019 yang memuat langkah-langkas strategis dalam mempercepat terwujudnya Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Strategi dan program yang dijalankan menuju *good governance* meliputi sektor organisasi dan manajemen, dimana sejak 2007 Pemko Banda Aceh memberlakukan moratorium penerimaan PNS dari formasi umum sampai dengan saat ini. Seiring dengan itu, juga dilaksanakan efisiensi kelembagaan menuju struktur organisasi miskin struktur kaya fungsi melalui pengurangan posisi jabatan struktural dari 806 menjadi 661. Menciptakan budaya kerja yang kompetitif serta positif melalui penerapan aplikasi e-kinerja dan e-disiplin. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap sektor pelayanan publik serta melakukan supervisi atau pengawasan tata kelola keuangan dan akuntabilitas.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif merupakan tekad Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mereformasi pemerintahan menuju kearah yang lebih baik. Sasaran ini diindikasikan dengan 4 Indikator Kinerja, dari hasil pengukuran yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata sasaran strategis sebesar 103,27 %. Uraian masing-masing capaian IKU adalah sebagai berikut :

Indikator 1 : Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	Predikat	WTP	WTP	100%

Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016 kembali berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah tahun 2015. Opini WTP tersebut diserahkan langsung Ketua BPK RI Perwakilan Aceh di Gedung BPK RI Perwakilan Aceh. Dengan keberhasilan ini, Pemerintah Kota Banda Aceh telah mendapatkan predikat WTP selama 8 (delapan) kali berturut-turut sejak tahun 2007.

WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2016 sangat istimewa karena audit Laporan Keuangan Pemerintah dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk langsung oleh BPK Pusat. Kota Banda Aceh merupakan satu-satunya daerah di Propinsi Aceh yang auditnya dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain diaudit oleh KAP, Tahun 2016 merupakan pertama kalinya Pemerintah Kota Banda Aceh menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Perolehan opini dari BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

Dari tabel diatas, terlihat capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh untuk tahun 2013-2016 telah tercapai 100%.

Indikator 2 : Meningkatnya persentase target PAD kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya persentase target PAD kota	%	17	19,03	111,94%

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Jumlah PAD Kota Banda Aceh tahun 2016 dapat direalisasikan sebesar 260.662.660.456,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 233.904.889.113 atau melebihi dari target yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 17% dapat direalisasikan 19,03% atas PAD tahun 2015, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4

Realisasi PAD Kota Banda Aceh Tahun 2016

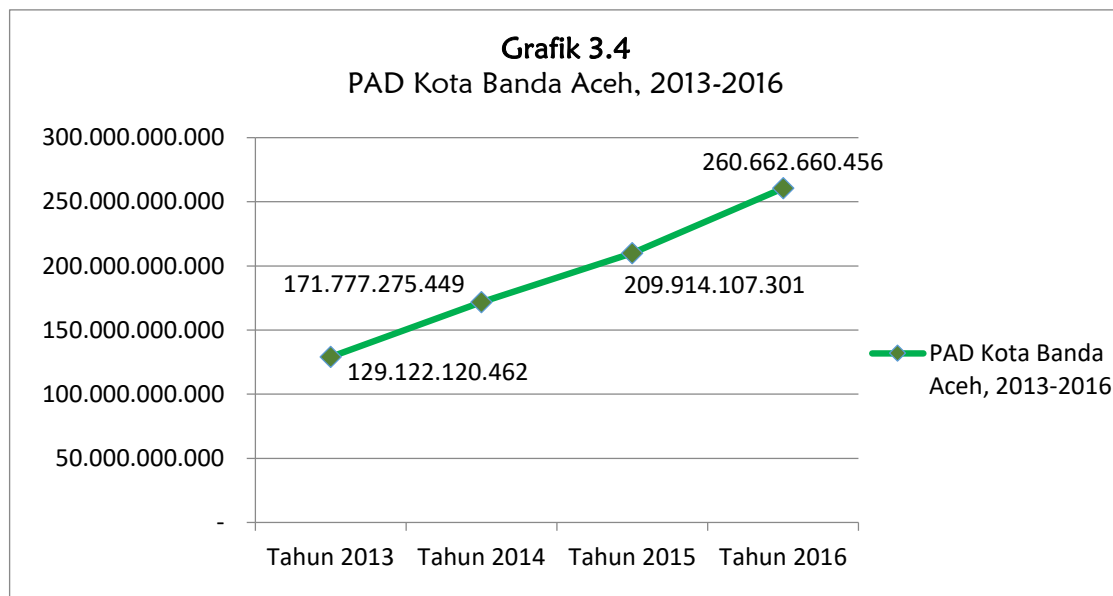
Uraian	Realisasi PAD	Ket
Pendapatan Asli Daerah	260.662.660.456	
▪ Pajak Daerah	68.859.556.607	
▪ Retribusi Daerah	21.557.377.272	
▪ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.047.405.108	
▪ Zakat	19.481.191.339	
▪ Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang Sah	149.717.130.130	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota, 2017

Peningkatan PAD ini tidak terlepas dari kebijakan yang diterapkan Pemerintah Kota Banda Aceh, antara lain :

1. Intensifikasi penerimaan pendapatan dengan optimalisasi penagihan pajak dan retribusi.
2. Ekstensifikasi pajak dan retribusi dengan menjaring wajib pajak baru
3. Intensifikasi PBB dan BPHTB dengan melakukan validasi NJOP PBB.
4. Sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah.
5. Pendataan dan pemetaan sumber-sumber potensi baru.

6. Optimalisasi kinerja petugas pemungut pajak dan retribusi.
7. Membentuk sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota, 2017

Dari grafik 3.3 diatas terlihat realisasi PAD Pemerintah Kota Banda Aceh selama kurun waktu 2013-2016 mengalami peningkatan.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya persentase target PAD kota	54%	18%	35%	14,39%	19,03	20%	95,15%

Dari tabel diatas, terlihat persentase target PAD kota setiap tahunnya terus meningkat. Sampai tahun 2016, persentase target PAD kota telah mencapai 95,15% jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

Indikator 3 : Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	Berita	12.960	13.680	105,56%

Pemerintah berkewajiban melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara di sisi lain, media massa bisa bertindak sebagai pengawas sekaligus penyampai aspirasi masyarakat. Dengan demikian, program pembangunan yang dicanangkan pemerintah bisa terlaksana dengan baik.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Kota Banda Aceh tidak dapat berjalan sendiri, khususnya dalam penyebaran informasi program pembangunan kepada masyarakat. Peran media massa baik cetak maupun online dengan segala kelebihan, dapat mendukung program pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah Kota Banda Aceh untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Penyebarluasan informasi agar masyarakat mengetahui kebijakan dan program pembangunan pemerintah sehingga diharapkan ada timbal balik dari masyarakat untuk ikut berperan dan mengawal program pembangunan agar berjalan dengan baik.

Indikator meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online) dimaksudkan untuk melihat sejauh mana respon stakeholder terhadap berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berjalan di Kota Banda Aceh. Pemberitaan yang dimuat pada media lokal dan nasional terkait pelaksanaan pembangunan Kota Banda Aceh Pada tahun 2016 mencapai 13.680 berita. Jumlah ini mencapai 105,56% atau melebihi dari perkiraan sebanyak 12.960 berita.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online)	7200 berita	8.640 berita	10.800 berita	12.855 berita	13.860 berita	14.400 berita	96,25%

Persentase pemberitaan positif mengenai program pembangunan Kota Banda Aceh dimedia lokal dan nasional (cetak dan online) menunjukkan arah yang positif setiap tahunnya meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun awal pelaksanaan RPJMD (2012) hanya 7.200 berita meningkat hingga 13.860 berita di tahun 2016 dengan capaian kinerja terhadap target akhir RPJMD telah tercapai 96,25%.

Pencapaian ini merupakan keberhasilan dalam menjalankan kegiatan media relations yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menjalin hubungan dengan wartawan. Kepercayaan dari wartawan adalah salah satu aset praktisi Humas Pemerintah Kota Banda Aceh yang paling penting.

Indikator 4 : Meningkatnya jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
4.	Meningkatnya jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	%	91,76	87,57	95,43%

Berdasarkan Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lampiran 1 dinyatakan bahwa salah satu indikator bidang urusan perencanaan pembangunan adalah penjabaran program RPJMD ke dalam RKPK.

Indikator kinerja Meningkatnya jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPD diukur melalui jumlah program yang terdapat dalam RPJM Kota Banda Aceh periode 201-2017 dibandingkan dengan jumlah program yang terdapat dalam RKPD.

Pemerintah Kota Banda Aceh telah melakukan revisi dokumen RPJMD periode 2012-2017 melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 13 Tahun 2016. Program RPJMD yang tertuang dalam RKPD sampai tahun 2016 berjumlah 87,57%, jumlah ini tidak mencapai target dari yang ditetapkan sebesar 91,76% atau capaian kinerja sebesar 95,60%. Jika dijabarkan jumlah program yang tertuang dalam RKPK pada tahun 2016 sebanyak 148 program dari 169 program yang terdapat dalam RPJM Kota Banda Aceh 2012-2017.

Terbatasnya program RPJMD yang tertuang dalam RKPD disebabkan keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah Kota Banda Aceh. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penyusunan APBK setiap tahunnya membuat prioritas program dan anggaran yang melibatkan program-program yang langsung menyentuh urusan dasar masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya jumlah program RPJMD yang tertuang dalam RKPD	75%	77,84%	83,81%	85,80%	87,57%	95,74%	91,47%

Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD ini meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun awal pelaksanaan RPJMD (2012) hanya 77,84% yang tercantum dalam RKPD dan Realisasi pada tahun 2016 telah mencapai 87,57%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015, realisasi tahun 2016 meningkat 2,06%. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 91,47%.

Sasaran Strategis 7

Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan

Salah satu upaya dalam menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien adalah menetapkan peraturan atau kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Peraturan atau kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh merupakan landasan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang salah satu tujuannya meningkatkan dan mengoptimalkan birokrasi pelayanan publik.

Sasaran ini diindikasikan dengan 2 IKU, dari hasil pengukuran yang dilakukan diperoleh nilai rata-rata sasaran strategis sebesar 104,17 %. Uraian masing-masing capaian IKU sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah regulasi yang ditetapkan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah regulasi yang ditetapkan	Produk Hukum	6	6	100%

Permasalahan utama dalam birokrasi pelayanan adalah berkaitan dengan peningkatan pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek salah satunya adalah bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan. Proses dan produk pelayanan itu sendiri harus

memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para *stakeholder*. Setiap penyelenggaraan pelayanan publik juga harus memiliki standar pelayanan yang dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima layanan.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam periode 5 (lima) tahun pemerintahan saat ini menargetkan dapat melahirkan atau merevisi peraturan menyangkut aspek birokrasi pelayanan, yang bertujuan menyederhanakan, mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Tahun 2016 jumlah regulasi terkait langsung birokrasi pelayanan yang ditetapkan sebanyak 6 produk hukum dalam bentuk Peraturan Walikota. Jumlah ini sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 6 regulasi atau mencapai 100%. Adapun Peraturan Walikota yang ditetapkan, sebagai berikut :

Tabel 3.5

Peraturan Walikota Terkait Pelayanan Birokrasi Tahun 2016

No	Judul Qanun	Nomor Qanun	Ket
1	Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh	6 Tahun 2016	
2	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa Kota Banda Aceh	7 Tahun 2016	
3	Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Banda Aceh	14 Tahun 2016	
4	Standar Operasional Prosedur pada Inspektorat Kota Banda Aceh	15 Tahun 2016	
5	SPerubahan Keenam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh	24 Tahun 2016	
6	Standar Operasional Prosedur Perizinan Online pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh	73 Tahun 2016	

Sumber : Bagian Hukum Setda, 2017

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		

Jumlah regulasi yang ditetapkan	19 produk hukum	30 produk hukum	36 produk hukum	39 produk hukum	45 produk hukum	43 produk hukum	104,65%
---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------

Dari tabel diatas terlihat produk hukum daerah yang ditetapkan dalam upaya mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2016 telah ditetapkan 6 produk hukum yang umumnya terkait Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah Kota Banda Aceh untuk mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas sesuai harapan masyarakat.

Capaian indikator kinerja jumlah regulasi yang ditetapkan sampai dengan tahun 2016 telah mencapai 45 produk hukum dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2012-2017 sebanyak 43 produk hukum, maka persentase capaian kinerja telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 104,65 %.

Indikator 2 : Jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	%	60	65	108,34%

Pada tahun 2016 jumlah rancangan peraturan daerah atau qanun yang masuk menjadi program legislasi daerah sebanyak 20 rancangan qanun. Sampai akhir tahun 2016, rancangan qanun yang disahkan menjadi qanun daerah oleh pihak legislatif sebanyak 13 qanun, seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2016

No	Judul Qanun	Nomor Qanun	Tanggal Diundangkan
1	Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Noor 2 Tahun 2008 tentang SOTK Perangkat Daerah Kota Banda Aceh	1 Tahun 2016	21 Januari 2016
2	SOTK Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kota Banda Aceh	2 Tahun 2016	21 Januari 2016
3	SOTK Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh	3 Tahun 2016	21 Januari 2016
4	Penambahan Penyertaan Modal Pemko Banda Aceh pada PT. Bank Aceh	4 Tahun 2016	21 Januari 2016
5	Kawasan Tanpa Rokok	5 Tahun 2016	21 Januari 2016

6	Retribusi Rumah Potong Hewan	6 Tahun 2016	7 Juni 2016
7	Retribusi Tempat Pelelangan Hewan Ternak	7 Tahun 2016	7 Juni 2016
8	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2015	8 Tahun 2016	24 Agustus 2016
9	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh	9 Tahun 2016	12 Oktober 2016
10	Perubahan Anggran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2016	10 Tahun 2016	25 Oktober 2016
11	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh	11 Tahun 2016	28 Nopember 2016
12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2017	12 Tahun 2016	30 Desember 2016
13	Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017	13 Tahun 2016	13 Pebruari 2017

Sumber : *Bagian Hukum Setda, 2017*

Dari data diatas diketahui secara persentase capaian kinerja indikator kinerja Jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun mencapai 65% dari target yang ditetapkan sebesar 60% atau sebesar 108,34%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun	12,9%	21,43%	75%	59%	65%	75%	86,67%

Dari tabel diatas terlihat persentase jumlah rancangan qanun yang disahkan menjadi qanun dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun persentase menjadi lebih rendah dibandingkan tahun 2014. Hal ini lebih disebabkan masa awal tugas anggota DPRK Kota Banda Aceh hasil Pemilu tahun 2014 yang sebagian besar merupakan wajah baru.

Melihat capaian indikator kinerja jumlah rancangan Qanun yang disahkan menjadi Qanun sampai tahun 2016 mencapai 65% dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 75%, maka persentase capaian kinerja yang telah tercapai sebesar 86,67 %. Indikator kinerja ini dapat terealisasi karena adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai pihak eksekutif dengan DPRK sebagai pihak legislatif.

Sasaran Strategis 8

Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat

Kota Banda Aceh sebagai ibukota propinsi memiliki masyarakat dengan kultur budaya berbeda yang dipengaruhi oleh banyaknya pendatang dari luar daerah. Umumnya hal ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi dimana ibukota propinsi dianggap lebih memberikan kesempatan dan lapangan kerja yang lebih besar. Selain faktor mencari kerja, terdapat sebagian orang yang memanfaatkan situasi dengan mengambil kesempatan melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Tingkat kesenjangan sosial menjadi faktor dominan yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mengantisipasi dan menjaga lingkungan dari gangguan ketertiban dan keamanan, merekrut Satuan Perlindungan Masyarakat dari setiap gampong yang bertugas membantu kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, di setiap gampong dibangun pos Siskamling yang merupakan salah satu usaha dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat. Sistem Keamanan Lingkungan atau Siskamling melibatkan unsur masyarakat, untuk melakukan pengawasan, terhadap keamanan dilingkungannya dengan mengutamakan upaya-upaya pencegahan dan menangkal bentuk-bentuk ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 98,28%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	orang	1.412	1.412	100%

Pemerataan anggota satuan linmas merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan ketentraman masyarakat. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Rasio jumlah linmas menggambarkan kapasitas partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat guna terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif.

Dari tabel diatas, terlihat jumlah anggota Linmas di Kota Banda Aceh sebanyak 1.412 orang atau dapat direalisasikan 100% dari target yang ditetapkan dan jumlah ini sama dengan jumlah anggota Linmas pada tahun 2015 dengan kata lain tidak terjadi penambahan atau pengurangan anggota Linmas. Dengan jumlah penduduk Kota Banda Aceh 273.951 orang, artinya rasio anggota satuan Linmas Kota Banda Aceh tahun 2016 mencapai 51,56 : 10.000 penduduk. Untuk jumlah Anggota Linmas setiap kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Jumlah Anggota Linmas per Kecamatan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Linmas	Ket
1.	Kuta Alam	229 orang	
2.	Baiturrahman	184 orang	
3.	Syiah Kuala	178 orang	
4.	Meuraxa	156 orang	
5.	Kuta Raja	82 orang	
6.	Lueng Bata	143 orang	
7.	Ulee Kareng	153 orang	
8.	Jaya Baru	139 orang	
9.	Banda Raya	148 orang	

Sumber : Satpol PP dan WH, 2017

Keberadaan Satuan Linmas di Kota Banda Aceh masih bersifat temporer atau hanya direkrut saat penyelenggaraan Pemilu Legislatif/ Pemilu Kepala Daerah dan belum ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan Permendagri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		

Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk	1.300 orang	1.320 orang	1.360 orang	1.412 orang	1.412 orang	1.400 orang	100,89%
------------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

Dari tabel diatas terlihat jumlah anggota Satuan Linmas pada tahun 2016 dan 2015 tidak mengalami perubahan atau sebanyak 1.412 orang, namun Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD 2012-2017 sebanyak 1.400 anggota satuan linmas, maka capaian kinerja telah melebihi dari target yang ditetapkan atau mencapai 100,89%.

Indikator 2 : Rasio pos Siskamling per jumlah gampong

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Rasio pos Siskamling per jumlah gampong	Pos	235	227	96,56%

Jumlah pos siskamling di wilayah Kota Banda Aceh yang direalisasikan pada tahun 2016 sebanyak 227 pos Siskamling yang tersebar pada 90 gampong di wilayah Kota Banda Aceh. Jumlah ini lebih rendah dari target yang ditetapkan pada tahun 2016 sebanyak 235 pos Siskamling atau hanya mencapai 96,56%. Rasio Jumlah pos Siskamling perkecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Rasio Jumlah Pos Siskamling Per Kecamatan di Kota Banda Aceh Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Pos Siskamling	Jumlah Desa	Rasio
1	Kuta Alam	43	11	3,9
2	Meuraxa	29	16	1,8
3	Baiturrahman	35	10	3,5
4	Banda Raya	20	10	2,0
5	Kutaraja	15	6	2,5
6	Ulee Kareng	12	9	1,3
7	Lueng Bata	18	9	2,0
8	Syiah Kuala	32	10	3,2
9	Jaya Baru	23	9	2,5
Jumlah		227	90	2,5

Sumber : Satpol PP dan WH, 2017

Kendala yang ditemui dilapangan sehingga tidak tercapainya target kinerja jumlah pos Siskamling, antara lain :

- a. Minimnya kesadaran masyarakat untuk mendirikan poskamling dan berpartisipasi dalam kegiatan jaga malam/ronda malam.
- b. Penggunaan Pos Siskamling hanya berfungsi pada saat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
- c. Tidak terpenuhinya tempat/lahan untuk Pos Siskamling di beberapa Gampong.
- d. anggapan masyarakat bahwa patroli polisi /pos polisi sudah cukup untuk mencegah terjadinya pelanggaran kejahatan.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Rasio pos Siskamling per jumlah gampong	220 Pos	220 Pos	220 Pos	220 Pos	227 Pos	250 Pos	90,80%

Dari tabel di atas terlihat jumlah pos Siskamling pada tahun 2016 sebanyak 227 pos. jumlah ini meningkat dari tahun 2015 sebanyak 220 pos atau meningkat 3,18%. Jika melihat realisasi sampai dengan tahun 2016 sebanyak 227 pos, maka capaian kinerja akhir RPJMD jumlah pos Siskamling telah mencapai 90,80%.

Sasaran Strategis 9

Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong

Pemerintahan gampong merupakan amanah dari UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dimana kelurahan dihapus dan dibentuk gampong. Keluarnya payung hukum pembentukan gampong di Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong, secara otomatis menghapus jabatan lurah dan digantikan oleh keuchik (kepala desa) yang akan memimpin pemerintahan gampong.

Pemilihan Keuchik secara langsung merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat gampong, dan melalui pemilihan keuchik secara langsung masyarakat dapat berpartisipasi langsung dan berperan aktif dalam tahapan pemilihan. Hal ini sejalan dengan sasaran terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong yang dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung), sebagai berikut :

Indikator 1 : Prosentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Prosentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	%	70	59,65	85,21

Pemilihan jabatan keuchik atau Kepala Desa dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil oleh masyarakat gampong untuk masa jabatan 6 tahun, seperti yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung) pada 14 (empat belas) gampong dalam wilayah Kota Banda Aceh. Tahapan penyelenggaraan Pilchiksung tidak jauh berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu. Salah satu indikator suksesnya penyelenggaraan pesta demokrasi digampong dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada hari pemilihan.

Prosentase partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) dihitung dengan membandingkan jumlah pemilih dengan Jumlah DPT dikali 100 %. Pada tahun 2016, tingkat partisipasi pemilih mencapai 59,65%, dihitung dari jumlah pemilih sebanyak 13.627 orang dibagi jumlah DPT sebanyak 22.844 orang. Jumlah ini masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 70% partisipasi pemilih atau capaian kinerja sebesar 85,21%. Daftar Prosentase Partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9

Prosentase Partisipasi masyarakat dalam Pilchiksung Tahun 2016

No	Gampong	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Prosentase Partisipasi (%)
1	Ulee Lheue	307	277	90,23
2	Punge Jurong	1.820	1.254	68,90
3	Ie Masen Kayee Adang	2.084	1.369	65,69
4	Deah Raya	490	463	94,49
5	Kuta Alam	1.764	923	52,32
6	Bandar Baru	3.670	1.843	50,22
7	Laksana	2.786	1.445	51,87
8	Kota Baru	1.097	571	52,05
9	Keuramat	2.025	1.187	58,62

10	Mulia	2.100	1.500	71,43
11	Lampaloh	330	275	83,33
12	Peulanggahan	1.739	690	39,68
13	Keudah	732	652	89,07
14	Lhong Raya	1.900	1,178	62,00
Jumlah		22.844	13.627	59,65

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, 2017

Kurangnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik lebih disebabkan menurunnya kepedulian warga gampong untuk memenuhi undangan yang disebarkan P2K (Panitia Pemilihan Keuchik), selain karena kegiatan Pemilihan Keuchik Langsung dilakukan pada hari libur dimana masyarakat lebih memilih untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Prosentase partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Keuchik Langsung (Pilchiksung)	68,07%	59,03%	57,55%	57,59%	59,65%	75%	79,53%

Dari tabel diatas terlihat tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) setiap tahunnya terus meningkat walaupun persentasenya tidak terlalu tinggi. Capaian kinerja tahun 2016 sebesar 59,65% lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya sebesar 57,59%. Jika dilihat dari prosentase pada akhir tahun RPJMD sebesar 75% maka capaian kinerja sampai tahun 2016 menunjukkan angka 79,53%. Walaupun masih jauh dari target yang ditetapkan pada akhir tahun RPJMD, namun Pemerintah Kota Banda Aceh optimis dapat mencapai target.

Untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat mengikuti pemilihan keuchik langsung (pilchiksung) Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Gampong terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat termasuk membuat tahapan-tahapan pemilihan keuchik melalui penyampaian visi dan misi serta kampanye yang menghadirkan masyarakat secara langsung.

Sasaran Strategis 10

Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi kesatuan dari pembangunan Kota Banda Aceh, menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian dan mendukung daya saing daerah. Dukungan sarana dan prasarana terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh terutama pembangunan berbagai sektor diwujudkan dalam peran pembangunan dan pengembangan jaringan transportasi, komunikasi, dan informatika yang memungkinkan orang, barang, dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana juga diwujudkan dalam peran sumber daya air, listrik, serta pembangunan dan pengembangan pusat perdagangan. Hal itu juga menjadi masukan penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi unggulan di Kota Banda Aceh seperti perdagangan dan industri kecil.

Penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkualitas khususnya pembangunan dan pengelolaan pusat perdagangan menjadi prioritas Pemerintah Kota Banda Aceh pasca bencana gempa dan tsunami. Hal ini tertuang dalam kerangka kebijakan regulasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pasar.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 100%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal	%	86,67	86,67	100%

Jumlah Pasar yang berfungsi secara optimal diukur dari jumlah pasar yang berfungsi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bangunan pasar di Kota Banda Aceh. Keberadaan pasar di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 berjumlah 15 unit, namun belum seluruhnya berfungsi optimal. Jumlah pasar yang telah berfungsi secara optimal sampai akhir tahun 2016 sebanyak 13 pasar, antara lain : Pasar Atjeh, Pasar Gampong Baru, Pasar Seutui, Pasar Kartini, Pasar Peuniti, Pasar Ikan, Pasar Daging, Pasar Bumbu, Pasar Unggas, Pasar Nasabe, Pasar Rex, Pasar Ulee Kareng, Pasar Newton.

Sedangkan masih terdapat 2 pasar yang masih belum berfungsi optimal, sebagai berikut :

1. Pasar Pusat Kuliner dan Souvenir (dibangun tahun 2015), belum berfungsi optimal.
2. Pasar Terpadu Lampulo (dibangun tahun 2016), sedang dilakukan pembangunan sarana pendukung seperti mushalla, tower air dan saluran IPAL.

Berdasarkan data diatas, capaian kinerja untuk indikator Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal terealisasi 86,67% dari target yang ditetapkan 86,67% atau mencapai target 100%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal	84,62%	84,62%	84,62%	78,57%	86,67%	100%	86,67%

Dari tabel diatas terlihat Jumlah Pasar yang sudah berfungsi secara optimal pada tahun 2016 meningkat menjadi 86,67% dibandingkan tahun 2015 sebesar 78,57%. Jika melihat target akhir RPJMD, Pemerintah Kota Banda Aceh optimis target 100% dapat direalisasikan dengan selesainya pembangunan sarana pendukung pada 2 (dua) pasar yang sedang dalam tahap pengerjaan di tahun 2017.

Indikator 2 : Jumlah pasar yang dibangun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Jumlah pasar yang dibangun	unit	1	1	100%

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh membangun 1 (satu) unit pasar Terpadu Lampulo melalui dana tugas pembantuan Kementerian Perdagangan RI (anggaran APBN). Pasar ini merupakan pasar tradisional dengan konsep pengelolaan modern. Pembangunan pasar Terpadu Lampulo dilakukan secara bertahap dan untuk bangunan pasar utama telah selesai dilaksanakan tahun 2016, sedangkan tahun 2017 dilakukan pembangunan sarana pendukung seperti mushalla, tower air dan saluran IPAL.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah Pasar yang dibangun	13 unit	-	-	14 unit	15 unit	15 unit	100%

Dari tabel diatas terlihat, 15 unit pasar yang menjadi target akhir RPJMD telah dapat tercapai 100% sampai tahun 2016.

Sasaran Strategis 11

Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)

Pembangunan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Perkembangan dan pertumbuhan pelaku *Usaha* Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi di Kota Banda Aceh sangat signifikan, dan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.

Saat ini terdapat 6.825 Unit Usaha Kecil Menengah (UKM) dan 2.127 Unit Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Banda Aceh atau 3,27 persen dari jumlah populasi penduduk Kota Banda Aceh. Sektor UKM memiliki kontribusi yang nyata bagi pengatasan masalah pengangguran dan masalah perekonomian di Kota Banda Aceh. Salah satu kendala utama yang dihadapi para pelaku UKM dalam pengembangan dan meningkatkan daya saing umumnya masalah ketersediaan modal.

Melalui Visi Banda Aceh Model Kota Madani, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya mendorong keberadaan dan perkembangan UKM melalui berbagai kebijakan dan program baik secara simultan dan lintas sektoral, mengingat keberadaan UKM merupakan salah satu pendorong perekonomian Kota Banda Aceh. Hal ini sesuai misi Pemerintah Kota Banda Aceh untuk memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh dengan memfasilitasi adanya akses perbankan dan lembaga penjaminan kredit daerah untuk mengatasi permasalahan penguatan modal bagi para pelaku UKM. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adanya stimulan melalui bantuan pembiayaan, ditargetkan UKM dapat mengembangkan produk unggulan yang berdaya saing, sesuai dengan program pemerintah melalui pendekatan *One Village One Product (OVOP)*.

Untuk melihat tingkat capaian sasaran tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) digambarkan melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja. Pengukuran

terhadap 3 (tiga) indikator kinerja ini didapat capaian kinerja sasaran sebesar 88,73%. Uraian masing-masing capaian indikator kinerja, sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	UKM	120	120	100%

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh bekerjasama dengan 4 lembaga perbankan yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Mandiri, Bank Aceh dan Bank Bukopin, memberikan bantuan permodalan kepada pelaku 120 UKM dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). Bantuan diberikan kepada UKM yang bergerak diberbagai bidang usaha produktif. Peran Pemerintah Kota Banda Aceh disini adalah mendorong pihak perbankan dalam memfasilitasi permodalan kepada UKM.

Melalui bantuan tersebut diharapkan UKM dapat berkembang dan mandiri sehingga mampu meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam kegiatan ekonomi untuk mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah usaha kecil menengah yang mendapatkan bantuan perbankan	14 UKM	-	-	19 UKM	120 UKM	140 UKM	85,71%

Dari tabel diatas terlihat jumlah UKM yang difasilitasi mendapatkan bantuan perbankan pada tahun 2016 mencapai 120 UKM, jumlah ini meningkat drastis dibandingkan tahun 2015 sebanyak 19 UKM. Sampai dengan tahun 2016 jumlah UKM yang telah difasilitasi mendapatkan bantuan perbankan sebanyak 120 UKM atau mencapai 85,71% dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 140 UKM.

Indikator 2 : Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	IKM	170	128	75,29%

Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan perhatian serius dalam pembinaan dan memberdayakan Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai pilar ekonomi lokal. Perhatian tersebut diwujudkan dengan membekali pelatihan kepada pelaku IKM. Pada tahun 2016 telah dilakukan pelatihan dengan melibatkan 128 IKM. Pelatihan ini bertujuan agar setiap IKM mampu meningkatkan kualitas hasil produksi sehingga mampu bersaing dalam pemasaran hasil produksi. Umumnya IKM yang telah mampu memasarkan komoditi bergerak pada produksi pengolahan ikan, dendeng sapi, kain sarung, komoditi border dan souvenir Aceh dan kue tradisional.

Berikut pelatihan dan pemberian bantuan packing/labeling yang dilaksanakan pada tahun 2016 :

1. Pelatihan bagi IKM

- Pelatihan batik bagi 48 perajin
- Pelatihan border bagi 50 perajin
- Pelatihan olahan kedelai bagi 30 perajin

2. Bantuan Packing/Labeling bagi IKM

- Bantuan 1.250 lembar packing/labeling kepada perajin kue kering
- Bantuan 1.250 lembar packing/labeling kepada perajin kue basah

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah IKM yang mampu melakukan pemasaran komoditi	120 IKM	120 IKM	130 IKM	150 IKM	128 IKM	180 IKM	71,11%

Dari tabel diatas terlihat, jumlah IKM yang mendapatkan pelatihan pada tahun 2016 sebanyak 128 IKM, menurun dibandingkan tahun 2015 sebanyak 150 IKM. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian kinerja mencapai 71,11%.

Indikator 3 : Jumlah produk yang menunjang program one village one produk

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Jumlah produk yang menunjang program one village one product	produk	11	10	90,90%

Pembangunan ekonomi kota berbasis kreativitas dan inovasi merupakan program Pemerintah Kota Banda Aceh. Program ini sejalan dengan pencaanangan one village one product sebagai salah satu program mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah Kota mendorong setiap gampong menghasilkan produk unggulan dengan memanfaatkan potensi yang ada di gampong masing-masing. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2007, dan kini perkembangannya semakin baik. Semua kelompok di gampong dibina dengan melibatkan lintas sektor baik pemerintah maupun swasta.

Tahun 2016 Kota Banda Aceh telah memiliki 10 produk unggulan yang telah memiliki standar one village one product, antara lain :

- Pengolahan kopi
- Pengolahan ikan
- Kerajinan border
- Kue tradisional
- Batik
- Tenun
- Anyaman rotan
- Produk sabun cuci
- Produk peci border
- Produk minuman Juice Nozy

Jika melihat target tahun 2016 sebanyak 11 produk dan terealisasi 10 produk, maka capaian kinerja sebesar 90,90%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah produk yang menunjang program one village one product	7 produk	7 produk	7 produk	10 produk	10 produk	12 produk	83,33%

Dari tabel diatas terlihat, Jumlah produk yang menunjang program one village one product pada tahun 2016 sebanyak 10 produk, jumlah ini tidak mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 sebanyak 10 produk. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, maka capaian kinerja mencapai 83,33%.

Sasaran Strategis 12

Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan kemudahan investasi

Salah satu faktor berjalannya pembangunan adalah tersedianya modal. Hal ini menjadikan pengelolaan penanaman modal menjadi salah satu bidang penting pelayanan publik dalam menjaring datangnya modal dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan Kota Banda Aceh. Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak hanya bagi investor, tapi juga bagi pertumbuhan perekonomian di Kota Banda Aceh..

Semakin banyak nilai realisasi investasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan semakin menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan.

Terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 34,56%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Rupiah	23.055.000.000	15.935.000.000	69,12%

Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) di Kota banda Aceh tahun 2016 yang terealisasi sampai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 15.935.000.000,- jumlah ini lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 23.055.000.000 atau tidak capaian kinerja sebesar 69,12%. Nilai investasi ini berasal dari 11 perusahaan yang dikeluarkan izin prinsip penanaman modal sepanjang tahun 2016. Namun capaian tahun ini jauh meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 yang hanya terealisasi 2.000.000.000,-

Rendahnya realisasi Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN) dari target yang ditetapkan disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Belum selesainya Qanun Penyelenggaraan di Bidang Penanaman Modal.
2. Belum selesainya Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang akan dijadikan acuan perencanaan seluruh sektor yang dapat berdampak pada penanaman modal dan perencanaan kegiatan penanaman modal oleh pihak swasta dan mendorong pertumbuhan penanaman modal di Kota Banda Aceh.
3. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengatur nilai investasi diatas 10 milyar izin prinsipnya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, sedangkan 1 s/d 10 milyar menjadi kewenangan kabupaten/kota untuk mengeluarkan izin prinsip.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	-	16.175.000.000	2.130.000.000	2.000.000.000	15.935.000.000	25.655.000.000	62,11%

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja tahun 2016 jauh meningkat dibandingkan tahun 2015, walaupun belum mencapai target yang ditetapkan. Jika melihat nilai investasi yang ditargetkan hingga akhir RPJMD Rp. 25.655.000.000,- maka capaian kinerja sebesar 62,11%. Hal ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Banda Aceh untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan dengan mempercepat penyelesaian Qanun dan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) untuk kemudahan berinvestasi di Kota Banda Aceh.

Indikator 2 : Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	Qanun	1	-	0%

Indikator kinerja Perda/Qanun yang mendukung iklim usaha belum dapat direalisasi pada tahun 2016. Belum disahkannya Qanun Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, sehingga capaian kinerja 0%

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD				Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)	
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015			Realisasi 2016
Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha	17 Qanun	-	-	-	-	20 Qanun	0%

Dari tabel diatas terlihat, sampai dengan tahun 2016 capaian kinerja masih 0%, hal ini menjadi perhatian khusus Pemerintah Kota Banda Aceh untuk lebih intens melakukan pendekatan dengan pihak legislatif, sehingga tahun 2017 rancangan Qanun dapat segera dibahas dan disahkan menjadi Qanun karena menyangkut promosi investasi daerah.

Sasaran Strategis 13

Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian

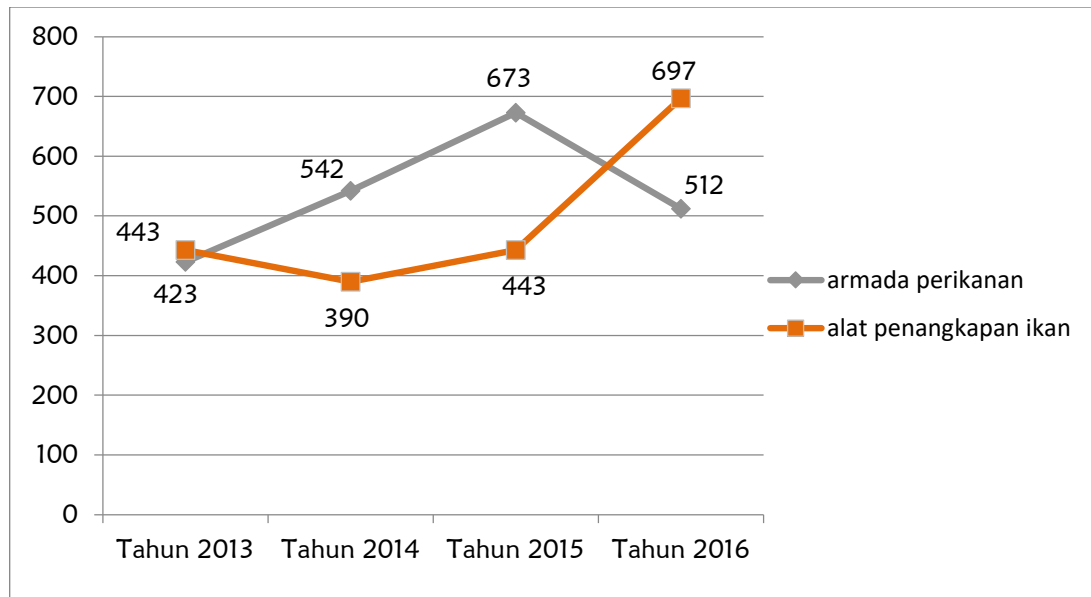
Secara geografis letak wilayah Kota Banda Aceh dikelilingi oleh lautan dan dengan luas wilayah yang kecil hanya sebesar $\pm 61,36 \text{ km}^2$, mayoritas peruntukan wilayahnya lebih diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa yang merupakan ciri wilayah perkotaan.

Kondisi geografis yang kurang mendukung tersebut membuat sektor pertanian dan perkebunan tidak menjadi sektor unggulan. Pengembangan lahan pertanian lebih diarahkan pada pemanfaatan lahan pekarangan untuk pengembangan pangan disetiap gampong dengan tujuan pemenuhan gizi keluarga secara mandiri dan berfungsinya lahan perkarangan secara optimal sehingga akan menambah pendapatan masyarakat. Luas area yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan $\pm 106 \text{ Ha}$, yang mayoritas ditanami sayur-sayuran dan buah-buahan.

Menilik dari kondisi geografis tersebut potensi kelautan menjadi sektor unggulan terutama sektor perikanan tangkap dan budidaya perikanan. Sektor perikanan tersebut merupakan salah satu sektor penyerap tenaga kerja yang cukup besar yang mencapai 1.547 orang yang terdiri dari 960 nelayan dan 587 petani perikanan. Secara statistik pengembangan sektor perikanan ditandai dengan peningkatan sarana penangkapan ikan di Kota Banda Aceh, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.5

Sarana Penangkapan Ikan di Kota Banda Aceh



sumber : BPS Kota Banda Aceh, Statistik Banda Aceh 2016

Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 88,07%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Cakupan bina kelompok perikanan	%	88	88	100%

Cakupan bina kelompok nelayan digunakan untuk melihat persentase jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah terhadap jumlah kelompok nelayan seluruhnya. Tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh memberikan bantuan dan pembinaan kepada 145 kelompok atau 88% dari total 164 kelompok perikanan.

Pembinaan dan pengembangan kelompok perikanan bertujuan untuk memberikan dukungan agro input bagi kelompok pembudidaya ikan sehingga terbina dan berkembangnya usaha budidaya ikan dan meningkatkan produktifitas pembudidaya ikan di Kota Banda Aceh. Selain itu pembinaan yang dilakukan melalui pemberian pelatihan dan bantuan sarana dan prasarana penangkapan dan pemasaran hasil perikanan serta pendampingan oleh petugas teknis dalam meningkatkan kelembagaan dan produktifitas usaha.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Cakupan bina kelompok perikanan	40%	52%	66%	77%	88%	93%	94,62%

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah kelompok perikanan yang menjadi kelompok binaan Pemerintah Kota Banda Aceh terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Kelompok yang mendapatkan pembinaan sebanyak 127 kelompok meningkat menjadi 145 kelompok pada tahun 2016. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 94,62%.

Indikator 2 : Produksi perikanan

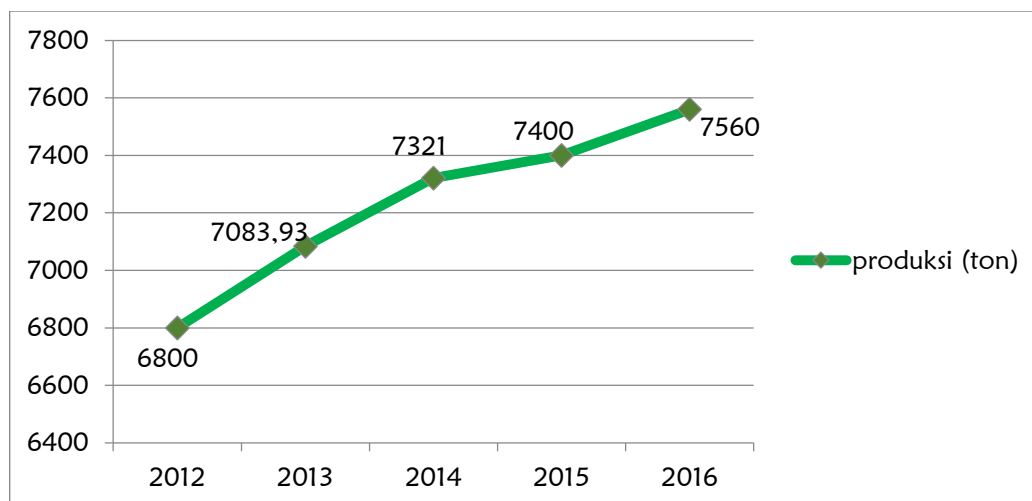
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Produksi perikanan	%	75	75,6	100%

Kota Banda Aceh merupakan sentra terbesar pendaratan ikan yang terdapat di Provinsi Aceh. Hampir seluruh armada dengan berbagai jenis komoditi perikanan didaratkan di Kota Banda Aceh. Sebagai salah satu sentra penghasil ikan tangkap terbesar di Aceh. Kota Banda Aceh didukung pelabuhan perikanan samudera (PPS) yang terdapat di Lampulo, yang dilengkapi cold storage. Dengan tambahan pemrosesan hasil perikanan tangkap dan tersedianya cold storage yang memadai, menjadi salah satu penunjang bisnis perikanan sehingga berpengaruh terhadap gairah sektor perikanan khususnya perikanan tangkap yang dengan sendirinya meningkatkan produksi. Selain sebagai sentra perikanan tangkap, Pemerintah Kota Banda Aceh juga mengembangkan kawasan Ulee Lheue, Alue Naga dan Meuraxa sebagai kawasan produksi ikan budidaya.

Produksi perikanan Kota Banda Aceh tahun 2016 mencapai 7560 ton. Jumlah ini mencapai 75,60% dari target daerah sebesar 10.000 ton. Jumlah ini meningkat 2,16% dari tahun sebelumnya sebesar 7400 ton. Jika melihat dari target produksi perikanan yang ditetapkan tahun 2016, maka dapat direalisasikan 100%.

Grafik 3.6

Produksi Perikanan tahun 2012-2016



sumber : Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, 2016

Peningkatan produksi perikanan sangat berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, faktor utama peningkatan produksi perikanan disebabkan semakin banyaknya nelayan dan pembudidaya ikan yang memanfaatkan teknologi dalam operasional penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan serta kebijakan Pemerintah untuk memberantas illegal fishing. Selain faktor tersebut pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi motor penggerak peningkatan produksi perikanan di Kota Banda Aceh.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Produksi perikanan	68%	71%	73%	74%	75,6%	76%	99,43%

Dari tabel diatas terlihat produksi perikanan di Kota Banda Aceh memiliki trend yang positif, artinya bahwa produksi perikanan selalu meningkat setiap tahunnya. Dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD terhadap capaian sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 99,43%.

Indikator 3 : Cakupan bina kelompok petani/ternak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Cakupan bina kelompok petani/ternak	%	90	90	100%

Kelompok petani/ternak yang diberikan pembinaan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh sebanyak 150 kelompok atau 90% dari total 167 jumlah kelompok petani/ternak di Kota Banda Aceh. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2015 yang berjumlah 141 kelompok. Pembinaan yang diberikan meliputi pemanfaatan lahan perkarangan untuk pengembangan pangan dengan memberikan bantuan benih sayur-sayuran, pupuk NPK dan polybag serta alat-alat pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan gizi keluarga secara mandiri dan berfungsinya lahan perkarangan secara optimal sehingga akan meningkatkan hasil produksi dan pendapatan masyarakat.

Selain itu, juga dilakukan penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian/perkebunan yang akan dipasarkan, dan pendistribusian bibit ternak kepada kelompok masyarakat.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Cakupan bina kelompok petani/ternak	30%	46%	71%	84%	90%	94%	99,43%

Dari tabel diatas terlihat jumlah kelompok petani/petenak yang diberikan pembinaan setiap tahunnya meningkat. Walaupun sktor pertanian dan peternakan dikembangkan hanya dalam skala kecil seperti pemanfaatan lahan perkarangan dan hasil produksi hanya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Hal ini disebabkan minimnya ketersediaan lahan untuk dikembangkan. Jika dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 99,43%.

Indikator 4 : Ketersediaan pangan utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
4.	Ketersediaan pangan utama	Kg	627.13	623.58	99,43%

Kebutuhan pangan di Kota Banda Aceh dengan jumlah penduduk yang terus bertambah tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan untuk tanaman khususnya pertanian yang menghasilkan makanan pokok seperti beras, jadi bisa dikatakan kebutuhan beras tidak mencukupi jika hanya mengandalkan produksi dari lahan pertanian di Kota Banda Aceh.

Ketersediaan pangan di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebesar 623.581 kg. Jumlah ini berdasarkan perhitungan jumlah produksi beras di Kota Banda Aceh yang mencapai 334.750 kg ditambah dengan jumlah cadangan pangan di Kota Banda Aceh yang mencapai 288.831 kg. Realisasi terhadap target ketersediaan pangan utama tidak dapat dipenuhi atau hanya mencapai 99,43%, hal ini disebabkan menurunnya hasil panen padi di Kota Banda Aceh.

Produksi beras yang dihasilkan dari luas lahan panen padi di Kota Banda Aceh sebesar 94 Ha menghasilkan 515 ton Gabah Kering Panen (GKP). Dari total 515 ton GKP setelah diolah rata-rata menghasilkan 334.750 kg beras. Sedangkan kebutuhan beras di Kota Banda Aceh mencapai 34.879.872 kg. Untuk menutupi kekurangan beras tersebut, maka dipasok dari luar daerah sebanyak 34.545.122 kg.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Ketersediaan pangan utama	158.41 kg	274,50 kg	392,04 kg	503,69 kg	623,58 kg	744,67 kg	83,73%

Pada tahun 2015, ketersediaan pangan utama mencapai 503,69 kg, jumlah ini meningkat pada tahun 2016 yang menjadi 623,58 kg. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebesar 744,67 kg maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 83,73%. Ketersediaan pangan dalam hal ini beras di Kota Banda Aceh sangat rendah sehingga tidak mampu menutupi kebutuhan beras bagi masyarakat setiap tahunnya. Faktor pertambahan laju penduduk bertolak belakang dengan semakin sempitnya lahan untuk tanaman makanan pokok. Salah satu upaya mengantisipasi kekurangan tersebut melalui pasokan dari luar daerah.

Indikator 5 : Tingkat pengangguran terbuka

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
5.	Tingkat pengangguran terbuka	%	7,07	11,55	61,21%

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mendorong terciptanya lapangan kerja yang memadai. Istilah memadai dalam hal ini adalah terciptanya lapangan kerja yang mampu menyerap pertumbuhan “angkatan kerja” seiring dengan bertambahnya

jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Pemutusan hubungan kerja dan daya serap yang menurun karena peningkatan jumlah angkatan kerja menjadi dua faktor utama yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh.

Dari data yang dirilis BPS, Kota Banda Aceh Memiliki angkatan kerja mencapai 119.485 orang dengan angka pengangguran berjumlah 13.804 orang atau mencapai 11,55%. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 12%, maka tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh tahun 2016 menurun sebesar 3,75%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Tingkat pengangguran terbuka	-	7,17%	10,24%	12%	11,55%	7,06%	63,86%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat angka tingkat pengangguran terbuka di Kota Banda Aceh tahun 2016 sebesar 11,55%, menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 12%. Capaian sampai dengan tahun 2016 dibanding target akhir RPJMD mencapai 63,86%.

Indikator 6 : Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
6.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	%	68	46,10	67,79%

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif diukur dengan jumlah yang terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan dibandingkan dengan jumlah seluruh buruh/pekerja di Kota Band Aceh. Pada tahun 2016 jumlah buruh/pekerja di Kota banda Aceh sebanyak 16.424 orang yang bekerja pada 1.636 perusahaan. Dari jumlah tersebut yang telah terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.571 orang atau mencapai 46,10%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 65% atau 5.877 orang yang terdaftar pada BPJS ketenagakerjaan, maka menurunnya persentase capaian kinerja tahun 2016 lebih disebabkan karena meningkatnya jumlah pekerja di Kota Banda Aceh. Sedangkan jumlah Pekerja yang terdaftar pada BPJS tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek/BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan aktif	51%	57%	61%	65%	46,10%	72%	64,03%

Berdasarkan tabel diatas, terlihat target capaian kinerja akhir RPJMD masih sebesar 64,03%. Walaupun tingkat capaiannya masih rendah, namun Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya meningkatkan persentase pekerja/buruh yang terdaftar menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan melalui kebijakan yang mewajibkan setiap perusahaan melampirkan bukti keikutsertaan BPJS saat memperbaharui izin.

Sasaran Strategis 14

Meningkatnya penanggulangan PMKS

Program bantuan sosial adalah upaya pelayanan pemerintah kepada masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Program Bantuan Sosial menjadi salah satu komponen Program Jaminan Sosial yang menjadi bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Banda Aceh terhadap kondisi masyarakat yang miskin, terlantar, cacat, ketunaan sosial serta korban bencana di Kota Banda Aceh. Tanggungjawab ini dituangkan menjadi salah satu sasaran utama dalam Rencana Pembangunan Kota Banda Aceh periode ini.

Meningkatnya penanggulangan PMKS diukur melalui pencapaian indikator kinerja Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan tingkat pencapaian tahun 2016 sebesar 100%, seperti yang diuraikan dibawah ini :

Indikator 1 : Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial

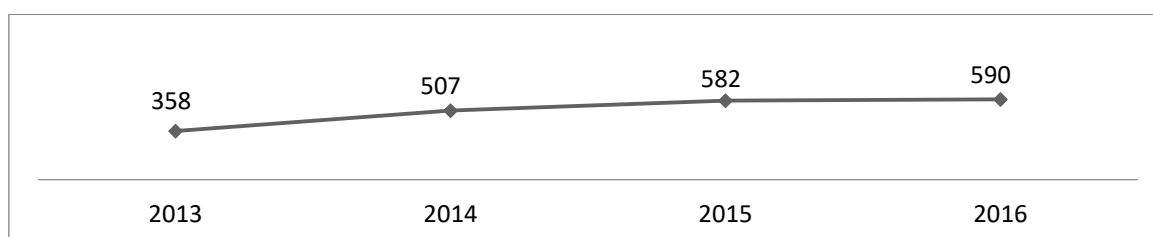
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
----	-------------------	--------	------------

			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	2,32	2,32	100%

Selama tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh telah menangani 590 orang PMKS, jumlah tersebut mencapai 2,32% dari total jumlah PMKS yang terdata sebanyak 25.410 orang. Berdasarkan data Pemerintah Kota Banda Aceh, umumnya PMKS tersebut berasal dari luar Kota Banda Aceh. Selama ini pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh hanya diperuntukan bagi PMKS yang memiliki KTP Banda Aceh, sedangkan bagi PMKS yang berdomisili dari luar daerah, dipulangkan kembali ke daerah asal dengan pembiayaan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Grafik 3.7

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial



Sumber : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 2017

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh, terkait masih rendahnya jumlah penanganan PMKS, sebagai berikut :

1. Anggaran yang terbatas dibandingkan jumlah PMKS yang harus dilakukan pembinaan.
2. Pemerintah Kota Banda Aceh belum memiliki tempat penampungan sementara untuk pembinaan para PMKS dan harus bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi.
3. Database PKH ditentukan oleh pusat, tidak semua masyarakat miskin dapat menerima manfaat dari program PKH.
4. Ketidakpedulian Pemerintah daerah asal PMKS, karena umumnya PMKS di Kota Banda Aceh berasal dari kabupaten/kota lain di Aceh.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	0,83%	1,33%	1,91%	2,24%	2,32%	2,50%	92,80
----------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Pemerintah Kota Banda Aceh setiap tahun meningkatkan anggaran untuk pembinaan PMKS di Kota Banda Aceh. Dari tabel diatas dapat dilihat, jumlah penanganan dan pembinaan PMKS terus meningkat setiap tahunnya walaupun masih sangat kecil dibandingkan jumlah total PMKS yang terdata. Jika melihat target akhir RPJMD sebesar 2,50 % PMKS yang dibina dari jumlah keseluruhan PMKS yang terdata, maka capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 sebesar 92,80%.

Sasaran Strategis 15

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas

Salah satu kebijakan pembangunan daerah adalah peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu faktor penting yang perlu ditempuh untuk mencapai hal tersebut melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.

Sektor Kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Banda Aceh pada tahun 2016, prioritas ini diarahkan untuk memberi jaminan pelayanan kesehatan masyarakat secara lebih baik, dengan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas SDM bidang kesehatan. Pembangunan sektor kesehatan antara lain bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Kota Banda Aceh saat ini telah tersedia atau tersebar di setiap kecamatan. Melalui upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan yang lebih baik. Kota Banda Aceh saat ini telah memiliki 11 puskesmas dan 60 puskesmas/polindes/poskesdes yang tersebar di 9 kecamatan dan 90 gampong serta 1 Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) Meuraxa tipe B milik Pemerintah Kota Banda Aceh.

Berikut jumlah fasilitas kesehatan milik Pemerintah maupun Swasta di Kota Banda Aceh :

Tabel 3.10

Fasilitas Kesehatan Kota Banda Aceh

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit (umum + swasta)	14
2	Puskesmas	11
3	Puskesmas pembantu	26
4	Polindes/poskesdes	34
5	Posyandu	114

6	Klinik/ Balai Kesehatan	32
7	Puskesmas keliling	7

Sumber : Statistik Banda Aceh 2016, BPS Kota Banda Aceh

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah fasilitas kesehatan di Kota Banda Aceh telah cukup memadai, selain diperuntukan bagi masyarakat Kota Banda Aceh, fasilitas kesehatan tersebut juga menjadi rujukan dari masyarakat di daerah kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Rasio puskesmas dibanding jumlah penduduk Kota Banda Aceh tahun 2016 sebesar 1 : 21.631 jiwa. Pelayanan puskesmas idealnya adalah satu puskesmas melayani 20.000 masyarakat, namun keadaan ini dapat dianggap sudah memenuhi standar.

Tabel 3.11

Jumlah Puskesmas, Pustu, Polindes/poskesdes menurut Kecamatan Kota Banda Aceh Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Puskesmas	Jumlah Pustu	Jumlah Polindes/ Poskesdes
1	Kecamatan Baiturrahman	37.794	1	2	3
2	Kecamatan Kuta Alam	53.495	2	3	1
3	Kecamatan Meuraxa	21.026	1	5	5
4	Kecamatan Syiah Kuala	39.649	2	4	5
5	Kecamatan Lueng Bata	27.448	1	2	3
6	Kecamatan Kuta Raja	14.230	1	2	-
7	Kecamatan Banda Raya	24.735	1	2	6
8	Kecamatan Jaya Baru	27.257	1	4	3
9	Kecamatan Ulee Kareng	27.168	1	2	8
Jumlah		273.951	11	26	34

Sumber : Statistik Banda Aceh 2016, BPS Kota Banda Aceh

Pencapaian sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas lebih diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitas kesehatan seperti yang tergambar dari indikator kinerja. Terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 116,67%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah puskesmas yang sudah menerapkan e-health

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
----	-------------------	--------	------------

			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Jumlah puskesmas yang sudah menerapkan e-health	unit	11 puskesmas	11 puskesmas	100%

Layanan puskesmas yang semakin hari semakin berkembang, sudah sepatutnya informasi layanan kesehatan dapat dirasakan kepada masyarakat disekitarnya dengan cara memberikan informasi mengenai profil, layanan kesehatan, galeri, agenda Puskesmas, maupun konsultasi online melalui halaman web. Dimulai tahun 2013 Pemerintah Kota Banda Aceh telah merintis pembangunan jaringan e-health dan tahun 2014 mulai direalisasikan program penerapan fasilitas kesehatan secara digital atau *e-health* secara bertahap di puskesmas Kota Banda Aceh. Program ini bertujuan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta penyediaan informasi kesehatan bagi masyarakat.

Saat ini e-health telah berjalan pada 11 Puskesmas yang artinya seluruh Puskesmas di Kota Banda Aceh telah menerapkan e-health. Program e-health juga telah terintegrasi dengan program lainnya seperti : e-puskesmas, P-care, dan SIMPUS.

Untuk tahun 2016, indikator kinerja puskesmas yang sudah menerapkan e-health diukur melalui upaya peningkatan jaringan e-health seluruh Puskesmas terkoneksi sepenuhnya pada Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan indikator ini dapat direalisasikan mencapai 100%, artinya saat ini jaringan e-health pada 11 Puskesmas telah terkoneksi seluruhnya pada Dinas Kesehatan. Hal ini bertujuan agar Dinas Kesehatan dapat memonitor dan mengawasi pelayanan kesehatan masyarakat yang dilaksanakan Puskesmas.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah puskesmas yang sudah menerapkan e-health	-	-	3 puskesmas	8 puskesmas	11 puskesmas	11 puskesmas	100%

Capaian indikator kinerja jumlah puskesmas yang sudah menerapkan e-health pada tahun 2016 diukur dengan target terkoneksi jaringan e-health 11 puskesmas pada Dinas Kesehatan dan target ini dapat direalisasikan 100%. Seperti terlihat pada tabel diatas, penerapan e-health telah terealisasi pada seluruh puskesmas di Kota Banda Aceh, artinya dari 11 puskesmas yang ditargetkan menerapkan e-health pada akhir tahun

RPJMD, telah dapat direalisasikan seluruhnya pada tahun 2015 atau capaian kinerja RPJMD telah terealisasi 100%.

Indikator 2 : Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/ akreditasi	unit	1 puskesmas	1 puskesmas	100%

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dan bermutu merupakan suatu keharusan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sasaran terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas seperti yang tertuang dalam RPJMD Kota Banda Aceh 2012-2017, merupakan wujud perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, yang salah satunya melalui program sertifikasi ISO bagi puskesmas di Kota Banda Aceh.

Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi masyarakat agar memperoleh derajat kesehatan optimal. Puskesmas saat ini dituntut menjadi institusi pelayanan kesehatan profesional yaitu Puskesmas yang berorientasi pada kualitas layanan yang kompeten, penuh inovasi, berorientasi kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Sertifikasi ISO merupakan salah satu upaya Puskesmas meningkatkan mutu layanan kesehatan berstandar internasional.

Tahun 2016 terdapat 1 (satu) Puskesmas memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008 menyangkut penerapan standar sistem manajemen mutu yaitu Puskesmas Ulee Kareng. Penilaian yang dilakukan mencakup kriteria, antara lain mutu pelayanan harus dinilai secara Standar Operasional Prosedur (SOP), alur pelayanan yang jelas, mengembangkan mekanisme komplain seperti menyediakan kotak pengaduan di puskesmas tersebut.

Saat ini telah 5 (lima) Puskesmas di Kota Banda Aceh yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2008, terdiri dari :

1. Puskesmas Kopelma Darussalam (Tahun 2012)
2. Puskesmas Baiturrahman (Tahun 2013)
3. Puskesmas Kuta Alam (Tahun 2014)
4. Puskesmas Banda Raya (Tahun 2015)
5. Puskesmas Ulee Kareng (Tahun 2016)

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		

	RPJMD (2012)						
Puskesmas yang sudah bersertifikasi ISO/akreditasi	1 puskesmas	1 puskesmas	1 puskesmas	1 puskesmas	1 puskesmas	6 puskesmas	80%

Dari tabel diatas terlihat, sampai dengan tahun 2016 jumlah Puskesmas yang telah bersertifikasi ISO sebanyak 5 puskesmas atau mencapai 80% dibandingkan dengan target akhir RPJMD sebanyak 6 Puskesmas. Pemerintah Kota Banda Aceh secara bertahap terus berupaya agar seluruh Puskesmas di Kota Banda Aceh bersertifikasi ISO. Hal ini menjadi komitmen Pemko Banda Aceh guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat.

Indikator 3 : Model gampong sehat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Model gampong sehat	gampong	2	3	150%

Program model gampong sehat merupakan salah satu terobosan Pemerintah Kota Banda Aceh untuk meningkatkan derajat kesehatan warga di Banda Aceh. Melalui model gampong masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan terutama menyangkut aspek aspek promotif dan preventif (pencegahan). Karena selama ini selama ini fokus pembangunan kesehatan hanya pada aspek kuratif (pengobatan) sehingga dirasa kurang efektif.

Program ini mulai diwacanakan pada tahun 2014, yang diawali proses penyusunan regulasi dan sosialisasi. Pada tahun 2015 dilaksanakan kegiatan monitoring, pembinaan dan penilaian terhadap 9 gampong pilihan yang merupakan perwakilan 9 kecamatan di Kota Banda Aceh, antara lain :

1. Kota Baru : kegiatan mengenai program kesehatan reproduksi remaja
2. Lueng Bata : pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
3. Seutui : gerakan masyarakat sadar sehat (PHBS)
4. Blang Oi : posbindu
5. Kampung Pineung : makanan sehat dan halal
6. Lhong Raya : masalah DBD
7. Lamteumen Timur : kesehatan balita (imunisasi)
8. Lamteh : kesehatan usila
9. Lampaseh Kota

Pada tahun 2016 dilanjutkan tahapan evaluasi hasil pembinaan dan pemaparan hasil penilaian. Setelah melalui berbagai tahapan, terpilih 3 gampong yang akan menjadi percontohan (*pilot project*) model gampong sehat di Kota Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Gampong Kota Baru Kecamatan Kuta Alam.
2. Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman.
3. Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Model gampong sehat	-	-	-	-	3 gampong	5 gampong	60%

Dari tabel diatas, terlihat Model Gampong Sehat ditetapkan sebanyak 3 gampong pada tahun 2016, setelah melalui tahapan penilaian. Jumlah ini mencapai 60% dari jumlah 5 gampong yang ditargetkan menjadi model gampong sehat pada periode akhir RPJMD.

Sasaran Strategis 16

Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan

Komponen penting dalam pembangunan pendidikan adalah peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan menjadi kunci untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ihandal, berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan sektor pendidikan sebagai prioritas pembangunan tahun 2016, yang diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, daya saing murid di tingkat nasional, dan meningkatkan peran generasi muda dalam visi Banda Aceh Model Kota Madani. Hal ini diikuti dengan penetapan sasaran strategis tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan sebagai penanda upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Sasaran ini menegaskan bahwa pemerintah akan mengembangkan kebijakan, program dan kegiatan untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan akses terhadap standar pendidikan yang bermutu.

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk sasaran ini ditandai oleh 3 indikator kinerja, namun untuk indikator kinerja peringkat kelulusan tingkat nasional tidak dimasukan kedalam perhitungan karena adanya kebijakan dari Kementrerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus perangkan hasil ujian nasional secara nasional, maka hasil pengukuran terhadap 2 indikator kinerja didapat nilai rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 101,37% seperti yang diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Jumlah SNP yang tercapai

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Jumlah SNP yang tercapai	unit	50%	50%	100%

Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di penyelenggara dan/atau satuan pendidikan Kota Banda Aceh sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 4 SNP (50%) dari 8 SNP yang harus dipenuhi. Realisasi indikator kinerja ini mencapai 100% dalam artian target yang ditetapkan yaitu tercapainya 50% SNP pada tahun 2016 telah dapat dipenuhi. Adapun 4 SNP yang tercapai tersebut adalah :

1. Standar Penilaian;
2. Standar Kompetensi Kelulusan;
3. Standar isi; dan
4. Standar Proses.

Secara bertahap Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya agar penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di Kota Banda Aceh dapat memenuhi 8 poin SNP.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah SNP yang tercapai	25%	37,5%	37,5%	50%	50%	62,5%	80%

Jika melihat tabel diatas, ditargetkan sampai akhir periode RPJMD akan tercapai 5 SNP. Sampai dengan tahun 2016 telah tercapai 4 SNP, artinya untuk tahun 2017 masih harus dipenuhi 1 SNP. Pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD telah tercapai 80%.

Indikator 2 : Peringkat kelulusan tingkat nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Peringkat kelulusan tingkat nasional	peringkat	10 besar	-	0,00%

Pencapaian indikator Peringkat Kelulusan Tingkat Nasional tidak dimasukkan dalam pengukuran capaian kinerja mulai tahun 2016, dikarenakan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghapus perangkingan hasil ujian nasional secara nasional, namun saat ini memakai istilah indeks integritas sekolah.

Indikator 3 : Jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling per tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling per tahun	pengunjung	13.000	13.357	102,75%

Dari tabel di atas terlihat jumlah pengunjung perpustakaan dan perpustakaan keliling pada tahun 2016 mencapai 13.357 pengunjung dari yang ditargetkan sebanyak 13.000 pengunjung atau realisasi kinerja 102,75%. Selama tahun 2016 jumlah kunjungan didominasi oleh pengunjung perpustakaan keliling sebanyak 13.142 orang dan pengunjung perpustakaan umum sebanyak 215 orang.

Hal tersebut tak lepas dari kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh yang melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan keliling bagi siswa di sekolah-sekolah dan tempat pengajian Al-Qur'an menggunakan mobil perpustakaan keliling sesuai jadwal yang telah disosialisasikan ke sekolah. Selain itu juga diberikan pembinaan dan bantuan buku-buku bacaan kepada perpustakaan gampong.

Rendahnya tingkat kunjungan pada perpustakaan umum disebabkan sarana dan prasarana perpustakaan yang dimiliki belum memadai dan belum memenuhi syarat perpustakaan yang ideal sesuai Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Untuk menarik minat pengunjung perpustakaan, terus diupayakan peningkatan jumlah jenis buku perpustakaan serta prasarana pendukung melalui anggaran yang bersumber dari APBK Banda Aceh dan bantuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Aceh serta Perpustakaan Nasional RI.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Jumlah pengunjung perpustakaan dan	6.061 pengunjung	7.311 pengunjung	8.562 pengunjung	10.274 pengunjung	13.357 pengunjung	16.000 pengunjung	83,48%

perpustakaan keliling per tahun							
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2016 terjadi peningkatan 30%. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja akhir RPJMD telah mencapai 83,48%.

Sasaran Strategis 17

Tersedianya Infrastrukur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata

Perkembangan pembangunan Kota Banda Aceh yang sangat cepat, baik secara sosial ekonomi maupun perwujudannya dalam bentuk fisik menuntut adanya aturan tata ruang yang merupakan pedoman dalam mengawasi dan mengendalikan pertumbuhan kota. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 merupakan suatu pedoman dalam perencanaan dan pengendalian perkembangan Kota Banda Aceh. Sesuai dengan strategi pengembangan Kota Banda Aceh yang memadukan antara pengembangan "multi-center" dan "linear-growth", rencana struktur ruang Kota Banda Aceh dikembangkan dalam 4 Wilayah Pengembangan (WP), yaitu :

a. WP Pusat Kota Lama

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Baiturrahman, Kuta Alam dan Kuta Raja, dengan pusat di Kawasan Pasar Aceh dan Peunayong.

b. WP Pusat Kota Baru

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Banda Raya dan Lueng Bata, dengan pusat di Batoh dan Lamdom.

c. WP Keutapang

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Meuraxa dan Jaya Baru, dengan pusat di Keutapang.

d. WP Ulee Kareng

WP ini terdiri dari wilayah Kecamatan Syiah Kuala dan Ulee Kareng, dengan pusat di Ulee Kareng.

Untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut perlu didukung infrastruktur berkualitas dan merata. Prioritas pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2016 sektor Infrastruktur perkotaan berbasis bencana dan lingkungan hidup diarahkan untuk meningkatkan kualitas jaringan berbagai infrastruktur kota yang mendukung seluruh aktifitas sosial ekonomi masyarakat secara efisien, efektif dan ekonomis.

Terdapat 6 (enam) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 101,3%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	%	87	87,06	100%

Jalan kondisi baik adalah semua ruas jalan dimana permukaan perkerasan, bahu jalan dan saluran samping dalam kondisi baik menurut kriteria teknis, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar sesuai dengan kecepatan dan tidak ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi jalan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kota Banda Aceh mutlak diperlukan, mengingat peran dan kontribusinya terhadap pertumbuhan dan perkembangan Kota.

Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Banda Aceh sampai tahun 2016 mencapai 87,06% atau mencapai 615.39 km dari total panjang jalan 707.34 km. Kondisi ini merupakan hasil dari serangkaian program yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun 2016, yaitu : program pembangunan jalan dan jembatan, dan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	85,66%	82,05%	77,81%	87%	87,06%	95%	91,64%

Dari tabel diatas terlihat perkembangan kondisi jalan dalam kondisi baik di Kota Banda Aceh tahun 2016 mengalami peningkatan 0,6% dibandingkan tahun 2015. Capaian kinerja Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 91,64% jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada akhir periode RPJMD sebesar 95%.

Indikator 2 : Persentase penduduk berakses air minum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Persentase penduduk berakses air minum	%	85,67	85,67	100%

Kebutuhan air bersih saat ini semakin meningkat sejalan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan kegiatan ekonomi dan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya air minum higienis. Mengingat pentingnya akses air bersih bagi masyarakat, Pemerintah Kota Banda Aceh terus berupaya meningkatkan kapasitas produksi dan pengembangan jaringan pipa distribusi air minum serta pembangunan water treatment di beberapa titik seputaran kota.

Meskipun tingkat kebocoran (waterloss) air bersih masih cukup tinggi, akan tetapi cakupan pelayanan air bersih terus meningkat setiap tahunnya. Sampai tahun 2016 jumlah penduduk berakses air bersih mencapai 85,67% dari total penduduk Kota Banda Aceh.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Persentase penduduk berakses air minum	79,90%	83,37%	83,39%	84,44%	85,67%	86,88%	98,61%

Selama 2 tahun terakhir, persentase penduduk berakses air minum terus meningkat dari 84,44% pada tahun 2015 menjadi 85,67% pada tahun 2016 atau meningkat 1,46% jumlah penduduk Kota Banda Aceh yang memiliki akses air minum. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target akhir RPJMD telah tercapai 98,61%.

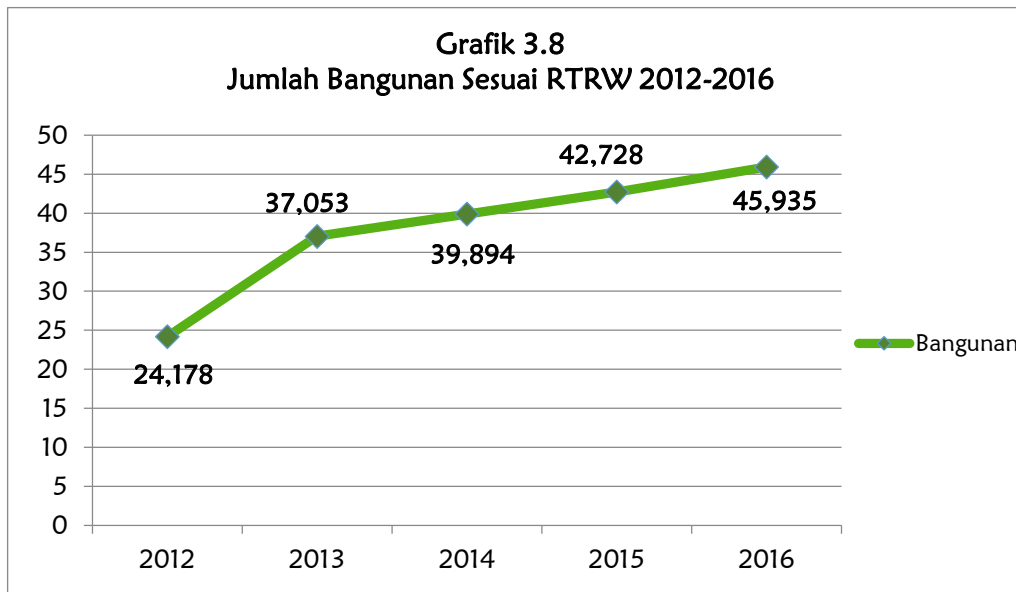
Indikator 3 : Ketaatan terhadap RTRW

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Ketaatan terhadap RTRW	%	67,57	67,76	100%

Undang–Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Berdasarkan undang-undang tersebut, maka Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah melakukan Penataan Ruang yang didasarkan pada kondisi dan potensi wilayah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan dalam Qanun (Perda) Nomor 4 Tahun 2009 tentang RTRW Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029.

Pembangunan yang dilaksanakan dalam pengembangan Kota Banda Aceh didasarkan pada Qanun tersebut seperti penyesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan

pola ruang dan struktur ruang yang ada dalam Qanun RTRW Kota Banda Aceh. Ketaatan terhadap RTRW ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat tentang tata ruang yang ada serta keterbukaan informasi tentang tata ruang.



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

Berdasarkan grafik diatas jumlah bangunan sesuai RTRW setiap tahunnya terus meningkat. Indikator Ketaatan terhadap RTRW diukur dari jumlah bangunan yang sesuai RTRW dibandingkan jumlah bangunan seluruhnya. Pada tahun 2016 jumlah bangunan yang sesuai RTRW mencapai 45.935 bangunan dari total 67.790 bangunan di Kota Banda Aceh atau mencapai 67,76% dari target yang ditetapkan sebesar 67,57% atau realisasi mencapai 100%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Ketaatan terhadap RTRW	53,57%	57,07%	60,57%	64,06%	67,76%	71,07%	95,34%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah bangunan sesuai RTRW dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah bangunan sesuai RTRW tahun 2016 terjadi peningkatan 5,77%. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap target kinerja akhir periode RPJMD telah tercapai 95,34%.

Indikator 4 : Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan

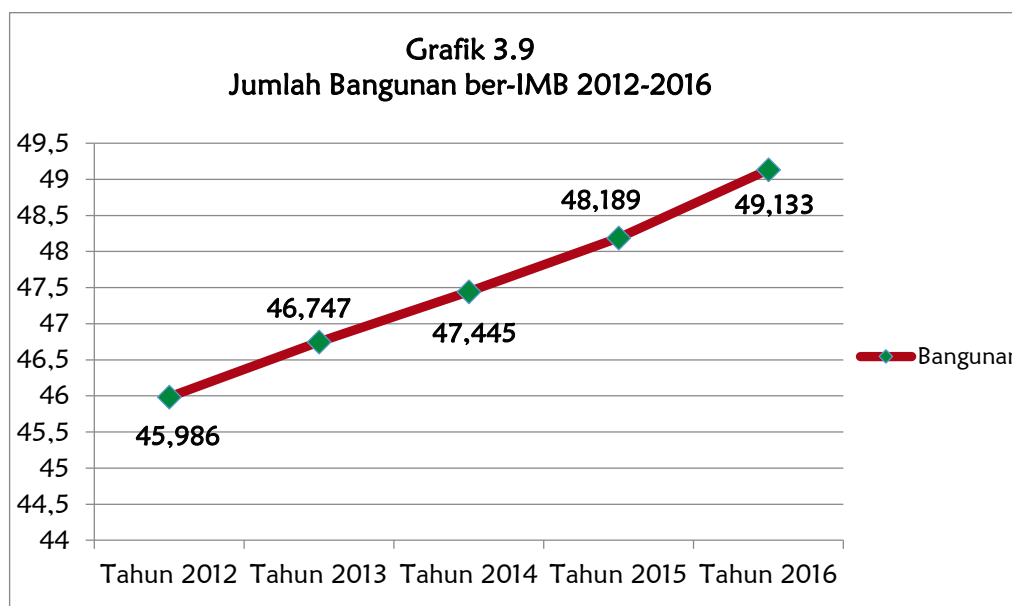
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
4.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	%	72,59	72,48	99,85

Indikator rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan digunakan untuk melihat jumlah bangunan yang memiliki IMB dibandingkan jumlah keseluruhan bangunan. Sebuah bangunan berfungsi untuk memberikan ruang bagi aktifitas kegiatan manusia. Pendirian suatu bangunan harus memperhatikan konsep keruangan baik tata bangun, tata letak, ketinggian, garis sempadan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), dan Koefisien Luas Bangunan (KLB). Untuk menjaga agar setiap bangunan dapat memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan tersebut diperlukan adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pada tahun 2016 target rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan yang ditetapkan sebesar 72,59% dengan realisasi 72,48% sehingga capaian kinerja dihitung sebesar 99,85%. Jumlah ini dihitung dari bangunan ber-IMB sebanyak 49.133 unit bangunan dibandingkan total 67.790 unit bangunan di Kota Banda Aceh.

Capaian ini mengalami penurunan dari tahun 2015 dengan hasil 72,59%. Hal ini disebabkan semakin tingginya penambahan jumlah bangunan, namun kesadaran pemilik untuk mengurus IMB masih kurang. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sosialisasi Pemanfaatan Ruang
2. Pengawasan Pemanfaatan Ruang



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2017

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	72,08%	72%	72,05%	72,59%	72,48%	72,91%	99,41%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan jumlah bangunan ber-IMB dari tahun ke tahun. Dibandingkan dengan tahun 2015, jumlah bangunan ber-IMB tahun 2016 mengalami penurunan 0,15%. Sedangkan capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dibandingkan target kinerja akhir periode RPJMD telah tercapai 99,41%.

Indikator 5 : Rasio rumah tinggal berakses sanitasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
5.	Rasio rumah tinggal berakses sanitasi	%	86	91,71	106,65%

Sektor sanitasi yang mencakup bidang air limbah, persampahan dan drainase merupakan salah satu sektor pelayanan publik yang memiliki kaitan erat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas sanitasi menjadi salah satu faktor menurunnya derajat kesehatan masyarakat. Strategi Sanitasi Kota (SSK) merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam pengelolaan sanitasi secara komprehensif, berkelanjutan, dan partisipatif di Kota Banda Aceh untuk mencapai target layanan sektor sanitasi yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM).

Pengembangan sanitasi Kota Banda Aceh bertujuan untuk meningkatkan kondisi infrastruktur serta layanan sanitasi menyeluruh sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Rumah tinggal (hunian) di Kota Banda Aceh dikategorikan baik jika telah memiliki fasilitas air bersih, WC/toilet dan *septic tank*. *Septic tank* ini harus ber kondisi kedap air dan anti rembes agar tidak mencemari tanah.

Capaian Indikator kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa realisasi rumah tinggal berakses sanitasi melebihi target yang ditetapkan. Realisasi rumah tinggal berakses sanitasi mencapai 91,71% dari target yang ditetapkan 86% atau mencapai 106,65%. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dan sehat sudah baik.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Rasio rumah tinggal berakses sanitasi	90,39%	84,59%	84,69%	86%	91,71%	87%	105,41%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan rasio rumah tinggal berakses sanitasi tahun 2016 mengalami peningkatan 6,64% dibandingkan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 87%, maka capaian kinerja telah melebihi dari target yang ditetapkan atau mencapai 105,41%.

Sasaran Strategis 18

Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengamatkan bahwa terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.

Kebijakan penyediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai difokuskan pada kenyamanan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas transportasi baik angkutan darat maupun angkutan laut. Hal ini sejalan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 100%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah	%	8,62	8,62	100%

tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota				
---------------------------------------------------	--	--	--	--

Pada tahun 2016 target tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota yang ditetapkan sebesar 8,62% dengan realisasi 8,62% sehingga capaian kinerja dihitung sebesar 100%. Capaian ini terjadi peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015 dengan hasil yaitu 8,60%.

Kerangka jalan Kota Banda Aceh dibentuk oleh 3 sistem poros utama sebagai sistem jaringan jalan primer kota, yaitu poros timur (Jl. T. Daud Beureueh – Jl. T. Nyak Arief) , poros selatan (Jl. Teungku Imum Leung Bata atau dikenal sebagai Jalan Raya Banda Aceh – Medan lintas timur), dan poros barat (Jl. T. Umar – Jl. Cut Nyak Dhien).

Perkembangan sistem jaringan jalan lokal lebih banyak dipengaruhi oleh kerangka utama kota, sehingga pola jalan cenderung membentuk grid mengikuti sistem jaringan jalan utama yang membentang cukup panjang. Sistem jaringan jalan internal Kota Banda Aceh untuk jalur pergerakan utama sudah cukup memadai, namun saat ini tidak ditunjang oleh jaringan sekunder yang berfungsi sebagai pembagi arus lalu lintas atau pengumpul (kolektor) pergerakan kendaraan, sehingga pada ruas-ruas jalan tertentu yang menghubungkan antara pusat-pusat kegiatan kota menghubungkan antara jalan primer sering timbul kemacetan lalu lintas cukup parah pada saat jam sibuk (peak hour).

Layanan angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Banda Aceh antara lain : bus trans kutaraja (sarana angkutan massal), mobil penumpang umum (labi-labi), taksi dan becak motor. Angkutan Umum tersebut melayani seluruh wilayah dalam Kota Banda Aceh yang telah memiliki jaringan jalan. Sebagai angkutan kota, mobil penumpang umum (labi-labi) dan bus trans kutaraja menjadi sarana angkutan umum yang memiliki rute tetap.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota	8,39%	8,39%	8,16%	8,60%	8,62%	8,62%	100%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota tahun 2016 mengalami

peningkatan 0,23% dibandingkan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 8,62%, maka realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan atau mencapai 100%.

Indikator 2 : Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	%	100	100	100%

Indikator kinerja tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek diukur melalui jumlah terminal angkutan penumpang/barang yang dilalui angkutan umum dibagi jumlah seluruh terminal angkutan penumpang/barang yang berfungsi di Kota Banda Aceh.

Seluruh terminal angkutan di Kota Banda Aceh telah terlayani rute angkutan umum perkotaan, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses keberadaan terminal. Hal ini dipengaruhi keberadaan terminal angkutan penumpang/barang yang berada didekat kawasan pusat kota. Berdasarkan hal tersebut, realisasi terhadap target yang ditetapkan tahun 2016 untuk indikator tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek mencapai 100%. Jumlah terminal di Kota Banda Aceh saat ini sebanyak 4 terminal, yaitu :

1. Terminal pelayanan tipe A (terminal batho) yang melayani angkutan antar provinsi, dilayani angkutan umum seperti : taksi dan becak motor.
2. Terminal Pelayanan Tipe B (terminal L-300 Lueng Bata) yang melayani angkutan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dilayani angkutan umum seperti : mobil penumpang umum (labi-labi), taksi dan becak motor.
3. Terminal pelayanan tipe C (terminal APK Keudah) yang melayani angkutan dalam kota, dilayani angkutan umum seperti : bus trans kutaraja (sarana angkutan massal), mobil penumpang umum (labi-labi), taksi dan becak motor
4. Terminal mobil barang (terminal santan), dilayani angkutan umum seperti : mobil penumpang umum (labi-labi), taksi dan becak motor.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Tersedianya terminal angkutan penumpang/barang di Kota Banda Aceh yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat peningkatan angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kota tahun 2016 mengalami peningkatan 0,23% dibandingkan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 8,62%, maka realisasi kinerja telah mencapai target yang ditetapkan atau mencapai 100%.

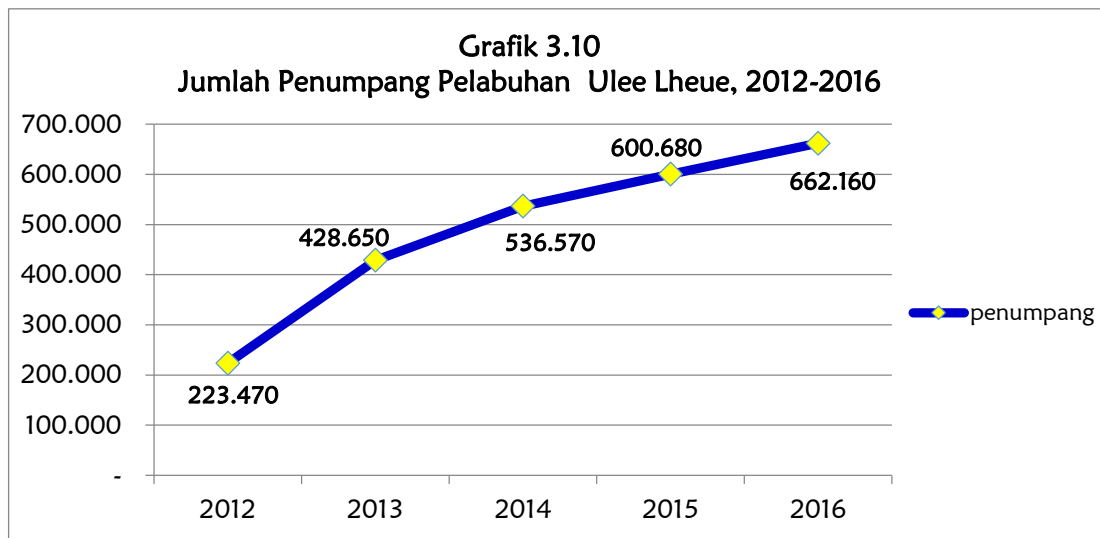
Indikator 3 : Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	%	100	100	100%

Pengukuran indikator kinerja tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dilihat dari berfungsinya pelabuhan penyeberangan secara optimal.

Kota Banda Aceh saat ini memiliki 1 pelabuhan penyeberangan laut yaitu pelabuhan ulee lheue yang melayani angkutan penumpang dan barang rute lintasan Banda Aceh – Sabang dan Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar yang dilayani oleh 3 kapal ro-ro dan 3 kapal ekspres. Pelabuhan Ulee Lheue memiliki luas yaitu sekitar 8 Ha dengan pembagian lahan untuk terminal penumpang sebagai bangunan utama, lahan parkir,

dermaga kapal cepat, dermaga kapal lambat (ferry), kolam pelabuhan, dan lain-lain. Tingkat pertumbuhan penumpang selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 16,56%., seperti terlihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, 2017

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Tersedianya pelabuhan penyeberangan yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat, jumlah pelabuhan penyeberangan di Kota Banda Aceh berjumlah 1 (satu) buah. Keberadaan pelabuhan tersebut telah cukup memadai untuk melayani jalur penyebrangan laut antar pulau disekitar wilayah Kota Banda Aceh. Sampai akhir periode RPJMD direncanakan tidak ada penambahan pelabuhan baru di Kota Banda Aceh.

Sasaran Strategis 19

Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan

Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yaitu pro poor, pro growth, proenvironment dan pro gender.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini dengan rata-rata capaian kinerja sasaran di tahun 2016 sebesar 113,93%. Uraian masing-masing capaian indikator, sebagai berikut :

Indikator 1 : Penegakan hukum lingkungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Penegakan hukum lingkungan	%	20	20	100%

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamatkan bahwa salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Penegakan hukum melibatkan partisipasi masyarakat melalui pengaduan maupun gugatan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan kerugian sebagai akibat dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Selama tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh menangani 3 kasus terkait permasalahan lingkungan. Dari 3 kasus yang ditangani, 2 kasus merupakan laporan masyarakat. Seluruh kasus tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Adapun kasus permasalahan lingkungan yang ditangani, sebagai berikut :

1. Bengkel Las
Kebisingan dari usaha bengkel (pengaduan masyarakat).
2. Pabrik Tahu
Pencemaran air sungai dan bau limbah pabrik.
3. KFC Lamnyong
Pencemaran saluran pembuangan/parit yang menyebabkan bau menyengat (pengaduan masyarakat).



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, 2017

Dari grafik diatas, terlihat selama kurun waktu tahun 2012 – 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh telah menangani 12 kasus permasalahan lingkungan, baik yang yang berasal dari laporan/pengaduan masyarakat ataupun hasil temuan tim pengawas lingkungan Kota Banda Aceh. Seluruh permasalahan lingkungan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Penegakan hukum lingkungan	10%	10%	20%	20%	20%	100%	70%

Dari tabel diatas terlihat persentase capaian indikator kinerja penegakan hukum lingkungan dibandingkan target akhir periode RPJMD mencapai 70%.

Indikator 2 : Meraih adipura

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Meraih adipura	predikat	berhasil	berhasil	100%

Pengukuran indikator kinerja meraih adipura didefinisikan berhasil atau tidaknya Kota Banda Aceh mendapatkan piala adipura. Pada tahun 2016, Kota Banda Aceh kembali berhasil memperoleh penghargaan adipura kirana yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI. Penghargaan ini merupakan piala adipura ke-8 kali diterima Kota Banda Aceh.

Keberhasilan meraih adipura tidak terlepas dari kerjasama berbagai pihak/stakeholder yang menciptakan lingkungan bersih dan indah di Kota Banda Aceh. Terdapat 1.259 indikator fisik yang dinilai oleh tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Dari hasil penilaian Kota Banda Aceh mendapatkan nilai 75,9 untuk faktor fisik dan 80,47 untuk kelengkapan non fisik. Selain lulus berdasarkan passing grade yang ditetapkan, penilaian Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sangat menentukan, dengan nilai rata-rata 76,11, melebihi nilai grade kelulusan TPA sebesar 76.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meraih adipura	berhasil	berhasil	berhasil	Tidak berhasil	berhasil	100%	60%

Dari tabel diatas terlihat, bahwa pada tahun 2016 Kota Banda Aceh berhasil kembali meraih penghargaan adipura. Setelah pada tahun 2015, Kota Banda Aceh gagal mendapatkan piala adipura yang disebabkan kurang pada hasil penilaian TPA karena sedang dilaksanakan pembangunan jalan akses tanjakan TPA dan adanya pemasangan jaringan pengumpulan gas methan. Akibat aktifitas kegiatan tersebut, kondisi TPA sedikit terbuka, karena serakan sampah pada saat penggalian pondasi jalan dan juga penanaman pipa gas methan.

Indikator 3 : Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
3.	Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	%	91	88,17	96,89%

Persentase cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani) diukur melalui jumlah penduduk yang terlayani sampahnya dibandingkan jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2016, target yang ditetapkan untuk Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani) sebesar 91% dan dapat direalisasikan 88,17% atau tidak mencapai target, sehingga capaian kinerja dihitung sebesar 96,89%. Jumlah ini dihitung dari 241.540 orang telah terlayani pengangkutan sampah dibandingkan jumlah penduduk Kota Banda Aceh sebanyak 273.951 (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh tahun 2017).

Pelayanan persampahan di Kota Banda Aceh terdiri dari 2 (dua) sistem yaitu sistem “door to door” dan sistem container. Pelayanan sistem door to door mencakup wilayah komersil dan perumahan, sedangkan pelayanan sistem kontainer mencakup wilayah perkampungan, dimana container sampah diletakan pada jalan umum.

Rendahnya capaian target indikator kinerja disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan volume sampah rata-rata sebesar 180 ton/hari, tidak sebanding dengan sampah rata-rata yang terangkut sebesar 165 ton/hari.
 - Terbatasnya jumlah kontainer dan alat pengangkutan sampah.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani)	82%	84%	87%	87,80%	88,17%	93%	94,81%

Dari tabel diatas terlihat cakupan pelayanan persampahan (persentase penduduk terlayani) pada tahun 2016 mengalami peningkatan 0,42% dibandingkan tahun 2015. Jika dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD sebesar 93%, maka realisasi kinerja telah mencapai 94,81%. Untuk mencapai target akhir RPJMD, Pemerintah Kota Banda Aceh akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Penambahan armada compactor dan tong sampah komunal berukuran 0,66 m³ menggunakan sisten Waste Collecting Point (WCP) yang akan diletakan di setiap gampong dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.
- Evaluasi rute pelayanan persampahan.
- Penyegaran personil kebersihan.

Indikator 4 : Meningkatnya gampong siaga bencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
4.	Meningkatnya gampong siaga bencana	gampong	4	4	100%

Indikator kinerja meningkatnya gampong siaga bencana diukur dari jumlah gampong yang mendapatkan arahan dan bimbingan untuk menghadapi bencana. Dari

tabel diatas terlihat jumlah gampong siaga bencana di Kota Banda Aceh pada tahun 2016 sebanyak 4 gampong dari target yang ditetapkan sebanyak 4 gampong sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

Banda Aceh merupakan salah satu kawasan rawan bencana khususnya gempa yang beresiko mengakibatkan tsunami. Untuk itu kesiapsiagaan semua sektor menjadi penting khususnya masyarakat yang mendiami daerah rawan bencana. Program Gampong Siaga Bencana merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Banda Aceh meningkatkan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dalam kawasan rawan bencana.

Pembentukan Gampong Siaga Bencana di lakukan secara bertahap pada gampong yang terletak di kawasan pantai yang berpotensi bencana. Sampai tahun 2016 jumlah gampong yang ditetapkan sebagai Gampong Siaga Bencana sebanyak 4 gampong, yaitu :

1. Gampong Tibang Kecamatan Syiah Kuala.
2. Gampong Lampulo Kecamatan Kuta Raja.
3. Gampong Jawa Kecamatan Kuta Raja.
4. Gampong Alue Deah Teungoh Kecamatan Meuraxa.

Gampong tersebut diatas merupakan kawasan yang mengalami kerusakan sangat parah pada kejadian Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya gampong siaga bencana	-	3 gampong	-	-	4 gampong	5 gampong	80%

Capaian indikator kinerja meningkatnya gampong siaga bencana sampai tahun 2016 dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD telah terealisasi 80%. Untuk memenuhi target akhir RPJMD, Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan menetapkan 1 (satu) gampong siaga bencana pada tahun 2017.

Indikator 5 : Cakupan pelayanan bencana kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
5.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	%	73,34	73,34	100%

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11/Kpts/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan, disebutkan bahwa perencanaan lokasi pos pemadam kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK). WMK ditentukan berdasarkan standar waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah tersebut. Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran untuk kondisi di Indonesia tidak lebih dari 15 (lima belas) menit.

Indikator kinerja cakupan pelayanan bencana kebakaran diukur dari luas wilayah manajemen kebakaran dikali waktu tempuh dibandingkan dengan luas wilayah potensi kebakaran. Dari tabel diatas terlihat target cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2016 sebesar 73,34% dan direalisasikan sebesar 73,34% sehingga capaiannya 100%. Capaian ini dihitung berdasarkan 6 WMK dikali 7,5 menit waktu perjalanan setiap WMK dibagi luas wilayah Kota Banda Aceh ±61,34 km².

Berdasarkan perhitungan diatas cakupan pelayanan kebakaran telah mencakup 73,34% dari luas wilayah Kota Banda Aceh, dengan 6 WMK, sebagai berikut :

1. Pos induk Geuceu Meunara.
2. Pos Asoe Nanggroe.
3. Pos Pelangi.
4. Pos Pango.
5. Pos Simpang Mesra.
6. Pos Keudah.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Cakupan pelayanan bencana kebakaran	12,22%	48,89%	48,89%	61,11%	73,34%	85,56%	85,71%

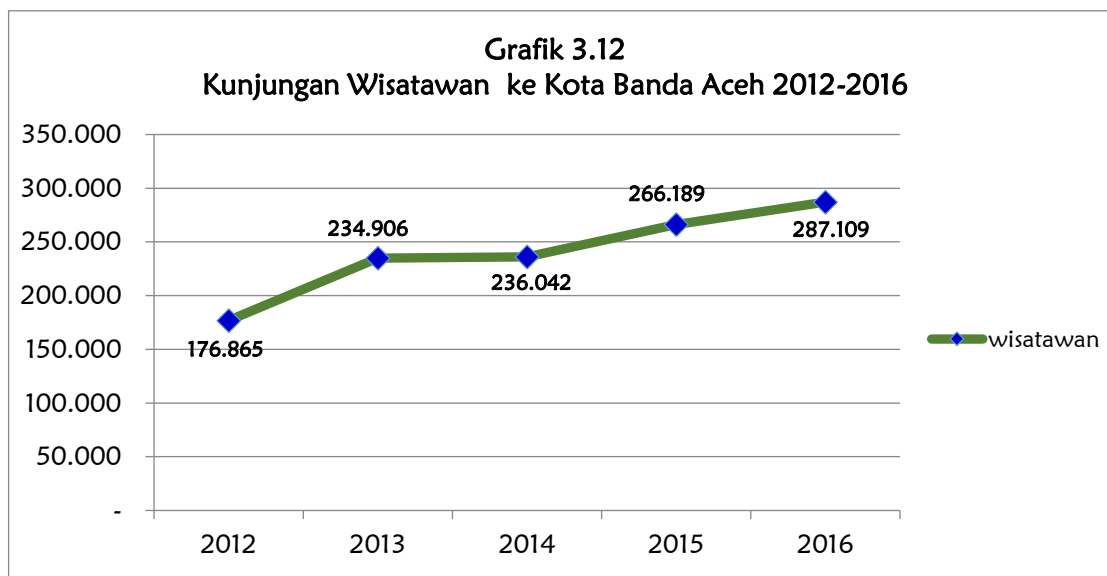
Cakupan pelayanan bencana kebakaran pada tahun 2016 mencapai 73,34% (6 pos) meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 61,11% (5 pos). Pada tahun 2016 terdapat penambahan 1 (satu) yaitu pos keudah. Dibandingkan dengan target kinerja akhir RPJMD terhadap capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 telah terealisasi 85,71%. Untuk memenuhi target akhir RPJMD, Pemerintah Kota Banda Aceh merencanakan penambahan 2 pos pemadam kebakaran, yaitu : pos Pasar Aceh dan pos Peunyeurat.

Indikator 6 : Meningkatkan Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
----	-------------------	--------	------------

			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
6.	Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	orang	280.000 wisatawan	287.109 wisatawan	102,54%

Indikator kinerja meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara diukur dari jumlah hunian hotel/wisma/losmen/penginapan di Kota Banda Aceh selama tahun 2016. Dari tabel diatas terlihat jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh selama tahun 2016 sebanyak 287.109 orang dari target yang ditetapkan 280.000 orang sehingga capainnya 102,54%. Jumlah kunjungan masih didominasi wisatawan domestik sebanyak 268.532 orang dan wisatawan mancanegara 18.577 orang. Kunjungan wisatawan selama tahun 2016 menunjukkan angka peningkatan dari tahun 2015 sebesar 7,86%.



Sumber : Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, 2017

Perkembangan pariwisata di Kota Banda Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian menggembirakan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Banda Aceh setiap tahunnya. Konsep wisata religi menjadi prioritas yang ditawarkan Kota Banda Aceh selain wisata sejarah, tsunami, keunikan seni dan budaya serta kuliner menjadi andalan promosi Banda Aceh.

Peningkatan jumlah wisatawan tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan hal sebagai berikut :

- Peningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata.
- Perbaikan sarana dan prasarana obyek / tempat wisata dan transportasi menuju obyek wisata.
- Promosi wisata.
- Peningkatan even seni dan budaya daerah.

- Melaksanakan even kuliner khas daerah seperti festival kopi Aceh, dll.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara	176.865	234.906	236.042	266.189	287.109	1.200.000	85,35%

Jika dilihat dari angka kunjungan wisatawan tahun 2016 sebanyak 287.109 orang, maka target akhir RPJMD selama 5 tahun jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1.200.000 orang, optimis tercapai. Capaian kinerja jumlah kunjungan wisatawan dari tahun 2013 s/d 2016 telah mencapai 1.024.246 orang, jika dibandingkan terhadap target akhir RPJMD sebanyak 1.200.000 orang telah telah tercapai 85,35%.

Indikator 7 : Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
7.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	%	23,5	46,55	198,08%

Indikator kinerja benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan diukur dari jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh dibandingkan jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang berada di Kota Banda Aceh. Pada tahun 2016 target indikator benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sebesar 23,5% dan direalisasikan sebesar 46,55% sehingga capaian kinerja sebesar 198,08%.

Penataan kawasan kota harus dapat melindungi kekayaan sejarah yang merupakan aset yang tidak tergantikan dan tidak ternilai. Seiring pengembangan kawasan Kota, Pemerintah Kota Banda Aceh tetap berupaya melestarikan dan mengembangkan kawasan bersejarah di Kota Banda Aceh meliputi bangunan bersejarah dan cagar budaya.

Kota Banda Aceh banyak memiliki situs dan cagar budaya, yang merupakan peninggalan sejarah masa masa lalu. Pengelolaan situs dan cagar budaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Kemendikbud, Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh. Tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh mengelola 27 situs dan cagar budaya dari 58 situs dan cagar budaya yang terdapat di Kota Banda Aceh.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	17,60%	35,3%	47,1%	29,31%	46,55%	23,5%	198,08%

Dari tabel diatas terlihat realisasi kinerja tahun 2016 lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 terhadap akhir RPJMD telah melebihi target yang telah ditetapkan mencapai 198,08%.

Sasaran Strategis 20

Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat

Tahun 2013 Kota Banda Aceh telah ditetapkan sebagai Pilot Project Kota Layak Anak (KLA) oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A). KLA adalah suatu strategi pembangunan kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat yang terencana dan berkelanjutan dalam program kegiatan pemenuhan hak anak. KLA ini dimaksud untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak di dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak di kabupaten/kota.

Terkait uraian diatas, Pemerintah Kota Banda Aceh menjadikan IKU tercapainya 31 indikator Kota layak Anak sebagai ukuran terwujudnya Kota Layak Anak di Kota Banda Aceh.

Indikator 1 : Tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016
----	-------------------	--------	------------

			Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak	%	100	87,09	87,09%

Indikator kinerja tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak diukur dari jumlah indikator kinerja KLA yang tercapai dibandingkan dengan jumlah keseluruhan indikator kinerja KLA sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja indikator tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak tahun 2016 terealisasi sebesar 87,09% atas target sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 87,09% atau tidak mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banda Aceh telah memenuhi 27 indikator KLA dari 31 indikator KLA, dengan rincian sebagai berikut :

- **Penguatan Kelembagaan (5 indikator)**
 1. Jumlah peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 2. Persentase anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak (dengan ukuran : meningkat setiap tahun);
 3. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terlatih KHA ;
 4. Keterlibatan lembaga masyarakat dan media massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 5. Keterlibatan Dunia Usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak;
- **Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan (4 indikator)**
 6. Persentase anak yang diregistrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran;
 7. Tersedia fasilitas informasi layak anak;
 8. Persentase forum anak, termasuk kelompok anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
 9. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas forum anak;
- **Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (3 Indikator)**
 10. Persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 tahun;
 11. Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga yang menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak;
 12. Tersedia program pengasuhan berkelanjutan;
- **Klaster III : Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (8 Indikator)**
 13. Angka kematian bayi (akb);
 14. Prevalensi gizi buruk, gizi kurang, stunting dan gizi lebih pada balita;
 15. Persentase asi eksklusif;

16. Persentase imunisasi dasar lengkap;
 17. Jumlah lembaga yang memberikan layanan kesehatan reproduksi remaja, napza, hiv/aids, kesehatan jiwa, dan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas;
 18. Persentase anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
 19. Persentase rumah tangga dengan akses air;
 20. Tersedia kawasan tanpa rokok;
- **Klaster IV : Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya (4 Indikator)**
 21. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 22. Persentase wajib belajar pendidikan 12 tahun;
 23. Sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak yang aman ke dan dari sekolah;
 24. Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah;
 - **Klaster V: Perlindungan Khusus (3 Indikator)**
 25. Persentase Anak dalam Kategori Perlindungan Khusus yang Mendapat Layanan;
 26. Persentase Penyelesaian Kasus dengan Proses Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum;
 27. Tersedia Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Terbaik Anak.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak	19,35%	19,35%	48,39%	83%	87,09%	100%	87,09%

Dari tabel diatas terlihat persentase capaian indikator tercapainya 31 indikator Kota Layak Anak tahun 2016 sebesar 87,09% (27 indikator KLA) meningkat 4,92% dibandingkan tahun 2015 sebesar 83% (26 indikator KLA). Capaian kinerja sampai tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 87,09%.

Sasaran Strategis 21

Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan daerah. Dalam konteks Kota Banda Aceh Pemuda harus mengambil peran untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai Model Kota Madani. Hal itu sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Kota Banda Aceh yakni meningkatkan peran generasi muda sebagai kekuatan pembangunan kota.

Untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Kota Banda Aceh yang berkelanjutan dibutuhkan partisipasi aktif dari generasi muda. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemko Banda Aceh dengan mengajak dan melibatkan pemuda dalam mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan berkeadilan. Selain itu generasi muda diarahkan agar dapat berperan aktif dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Kota Banda Aceh.

Pencapaian sasaran terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota lebih diarahkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas pemuda seperti yang tergambar dari IKU sasaran strategis tersebut. Pengukuran terhadap 2 IKU tersebut didapatkan nilai rata-rata capaian sasaran strategis sebesar 106,67%, seperti yang diuraikan dibawah ini :

Indikator 1 : Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	%	50	50	100%

Realisasi IKU meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh diukur melalui pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi para pemuda. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh melaksanakan pelatihan bagi 135 pemuda dari perwakilan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda di Kota Banda Aceh. Capaian IKU meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh tahun 2016 mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		

Meningkatnya potensi pemuda melalui pembinaan dan pelatihan pembangunan kota Banda Aceh	30%	35%	48%	50%	50%	60%	83,33%
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

Dari tabel diatas terlihat persentase capaian kinerja tahun 2016 sama dengan capaian tahun 2015 sebesar 50%. Capaian kinerja sampai tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 83,33%.

Indikator 2 : Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2016		Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	
2.	Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	OKP	60	68	113,34%

Realisasi IKU Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan diukur melalui pelaksanaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan pembinaan bagi 68 OKP yang ada di Kota Banda Aceh jumlah ini lebih dari target yang ditetapkan sejumlah 60 OKP sehingga capaian kinerja sebesar 113,34%.

Perbandingan capaian kinerja dari tahun 2013-2016 dan target akhir RPJMD Kota Banda Aceh 2012 -2017 (revisi) ditampilkan dalam tabel berikut :

Indikator Kinerja	Tahun RPJMD					Akhir RPJMD (2017)	Capaian Kinerja RPJMD (%)
	Kondisi Awal RPJMD (2012)	Realisasi 2013	Realisasi 2014	Realisasi 2015	Realisasi 2016		
Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan	25 OKP	25 OKP	35 OKP	45 OKP	68 OKP	85 OKP	80%

Dari tabel diatas terlihat persentase capaian indikator kinerja Meningkatnya pembinaan kepemudaan sebagai modal utama dalam pencapaian peningkatan pembangunan tahun 2016 sebanyak 68 OKP meningkat 51,11% dibandingkan tahun

2015 sebanyak 45 OKP yang dibina. Capaian kinerja sampai tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJMD telah tercapai sebesar 80%.

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Realisasi anggaran yang diuraikan pada subbab ini terdiri dari anggaran yang diperuntukan dalam pencapaian sasaran strategis dan realisasi anggaran daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2016.

3.2.1. Realisasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung tahun 2016 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12

Program, Kegiatan dan Anggaran per Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Jumlah		Anggaran		%
		Program	Kegiatan	Rencana	Realisasi	
1.	Terwujudnya pemahaman dan pengamalan Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul dalam kehidupan masyarakat	2	3	1.099.917.100	1.070.748.464	97,35
2.	Terciptanya masyarakat cerdas dalam menghadapi era globalisasi	11	32	10.168.038.559	9.858.550.544	96,96
3.	Terwujudnya manajemen pengelolaan ZIS secara transparan dan akuntabel	1	4	20.699.572.045	16.233.200.000	78,42
4.	Terwujudnya aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi, kompetitif, amanah, profesional dan bertanggung jawab	4	16	2.962.615.900	2.733.856.200	92,28
5.	Terciptanya pemerintahan yang berbasis e-government	2	6	5.012.152.460	4.794.349.332	95,65
6.	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, akuntabel, efektif dan efisien serta partisipatif	18	159	28.343.871.718	26.589.443.270	93,81
7.	Tersedianya payung hukum yang menjadi pedoman untuk mengoptimalkan birokrasi pelayanan	2	3	343.178.900	298.047.650	86,85

No	Sasaran Strategis	Jumlah		Anggaran		%
		Program	Kegiatan	Rencana	Realisasi	
8.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat	7	9	1.133.205.026	1.068.269.876	94,27
9.	Terbangunnya kehidupan berdemokrasi di gampong	6	15	2.564.522.660	2.397.674.725	93,49
10.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang perekonomian	3	5	7.035.152.193	6.835.562.049	97,16
11.	Tersedianya akses permodalan bagi Usaha Kecil Menengah (UKM)	4	7	9.896.109.650	9.735.362.858	98,38
12.	Terciptanya iklim usaha yang kondusif dan Kemudahan Investasi	5	12	2.102.307.295	2.040.553.320	97,06
13.	Terwujudnya pengembangan sektor perikanan, peternakan dan pertanian	10	15	9.172.525.814	8.625.510.098	94,04
14.	Meningkatnya penanggulangan PMKS	8	14	3.775.641.250	3.666.808.602	97,12
15.	Terwujudnya pelayanan kesehatan yang optimal dan berkualitas	12	34	154.370.206.845	145.036.627.743	93,95
16.	Tercapainya mutu dan keunggulan pendidikan	11	51	59.249.231.758	57.077.262.858	96,33
17.	Tersedianya Infrastruktur Kota Banda Aceh yang lebih berkualitas dan merata	11	15	138.234.911.828	135.525.858.880	98,04
18.	Terpenuhinya cakupan pelayanan transportasi dan tercipta keamanan serta kenyamanan bagi pengguna jalan/jasa	4	9	16.330.434.961	16.219.388.900	99,32
19.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan kota secara berkelanjutan	11	22	26.608.117.817	25.995.608.782	97,70
20.	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat	4	11	1.558.199.896	1.442.257.230	92,56
21.	Terciptanya generasi muda yang berperan dalam pembangunan kota	1	4	703.902.000	668.878.400	95,02

3.2.2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh 03 Tahun 2015 yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota tahun anggaran 2016 sebesar Rp. 1.318.153.038.568,- dan setelah perubahan melalui qanun

Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2016 yang ditetapkan tanggal 29 Oktober 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 1.378.366.044.234,- bertambah sebesar Rp. 60.213.005.666,- atau penambahan sebesar 4,57 % , dengan rincian sbb :

- ➔ Pendapatan daerah sebelum perubahan Rp. 1.318.153.038.568,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.378.366.044.234,- bertambah sebesar Rp. 60.213.005.666,- atau penambahan sebesar 4,57%.
- ➔ Belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 1.315.853.038.568,- setelah perubahan sebesar Rp. 1.451.949.982.790,- bertambah sebesar Rp. Rp. 136.096.944.222,- atau penambahan sebesar 10,34%.

Dari uraian diatas maka terjadi defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 73.583.938.556,-

➔ Pembiayaan daerah

- Penerimaan pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 4.000.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 129.110.140.556,- bertambah sebesar Rp. 125.110.140.556,-
- Pengeluaran pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 6.300.000.000,- setelah perubahan sebesar Rp. 55.526.202.000,- bertambah sebesar Rp. 49.226.202.000,-

Sehingga jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp. 73.583.938.556,- dengan demikian tidak ada sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan.

A. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah Kota Banda Aceh diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru.

Pendapatan daerah sebagaimana ketentuan yang berlaku dikelompokkan menjadi 3 bagian. Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Zakat dan Lain-lain PAD yang sah.
- 2) Dana perimbangan, meliputi : Dana bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
- 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi : Pendapatan Hobah, Bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya dan pendapatan sah lainnya.

Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan upaya dan langkah-langkah dalam mencapai target pendapatan, sebagai berikut :

- a. Melakukan perhitungan, pemetaan dan penggalian potensi PAD serta meningkatkan koordinasi serta mengurangi resiko kebocoran dalam pemungutan PAD.

- b. Menyempurnakan tarif pajak dan retribusi melalui qanun (intensifikasi) terhadap objek pajak dan retribusi.
- c. Sosialisasi kesadaran membayar pajak kepada wajib pajak.
- d. Optimalisasi penagihan dan pemungutan pajak dan retribusi.
- e. Peningkatan penegakan hukum (law enforcement) terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sebagai kontra prestasi/ belanja jasa dari pembayaran retribusi masyarakat kepada pemerintah.
- g. Optimalisasi sistem dan tata laksana pendapatan daerah, dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar SKPD penghasil dan evaluasi pendapatan asli daerah secara rutin.

Pendapatan daerah tahun 2016 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.318.153.038.568,-. Setelah perubahan pendapatan daerah Kota Banda Aceh menjadi Rp. 1.378.366.044.234,- dimana terdapat selisih sebesar 60.213.005.666,- atau naik 4,57%. Berikut rincian pendapatan daerah Kota Banda Aceh tahun 2016:

Tabel 3.13

Tabel Rincian Pendapatan Daerah Tahun 2016

Uraian	Jumlah		Bertambah/(berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
PENDAPATAN DAERAH	1.318.153.038.568	1.378.366.044.234	60.213.005.666	4.57
Pendapatan Asli Daerah	211.687.663.719	233.604.889.113	22.217.225.394	10,50
Pajak Daerah	53.085.000.000	53.085.000.000	-	0.00
Retribusi Daerah	26.592.979.646	26.592.979.646	-	0.00
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	800.000.000	800.000.000	-	0.00
Zakat	18.504.500.000	18.504.500.000	-	0.00
Lain-lain PAD yang sah	112.705.184.073	134.922.409.437	22.217.225.394	19.71
Dana Perimbangan	884.833.680.000	872.914.356.000	(11.919.324.000)	(1.35)
Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	37.826.566.000	31.808.946.000	(6.017.620.000)	(15.91)
Dana Alokasi Umum	602.292.108.000	602.292.108.000	-	0.00
Dana Alokasi Khusus	244.715.006.000	238.813.302.000	(5.901.704.000)	(2.41)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	221.631.694.849	271.546.799.121	49.915.104.272	22.52
Pendapatan Hibah	-	49.226.202.000	49.226.202.000	100.00

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	27.687.990.849	28.376.893.121	688.902.272	2.49
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.864.119.000	60.864.119.000	-	0.00
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	117.584.585.000	117.584.585.000	-	0.00
Pendapatan yang sah lainnya	15.495.000.000	15.495.000.000	-	0.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2016

Dari tabel diatas terlihat rincian pendapatan daerah setelah perubahan pada tahun 2016 proporsi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 15,98%. Kontribusi terbesar pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan sebesar 692.960.674.000,- atau 56,35% lalu diikuti oleh lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp. 340.169.758.790,- atau 27,66%.

B. Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, Belanja daerah tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan program-program strategis daerah. Belanja daerah dikelompokkan dalam 2 kelompok , yaitu : belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- 1) Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa dan Belanja Tidak Terduga.
- 2) Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah Kota Banda Aceh tahun 2016 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.315.853.038.568,- dan setelah perubahan sebesar Rp. 1.451.949.982.790,- atau naik 10,34%. Proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp784.495.906.392,- atau 54,03% lebih besar dari proporsi belanja langsung sebesar Rp. 667.454.076.398,- atau 45,97%, namun secara berkala Pemerintah Kota Banda Aceh terus berusaha meningkatkan anggaran belanja publik yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Banda Aceh. Berikut rincian belanja daerah Kota Banda Aceh tahun 2016 setelah perubahan :

Tabel 3.14

Tabel Rincian Belanja Daerah Tahun 2016

Uraian	Jumlah		Bertambah/(berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%

BELANJA DAERAH	1.315.853.038.568	1.451.949.982.790	136.096.944.222	10.34
Belanja Tidak Langsung	731.144.496.193	784.495.906.392	71.351.410.199	10.01
Belanja Pegawai	587.266.820.753	652.360.465.298	65.093.644.545	11.08
Belanja Bunga	2.000.000.000	3.550.000.000	1.550.000.000	77.50
Belanja Hibah	20.460.000.000	28.790.765.553	8.330.765.553	40.72
Belanja Bantuan Sosial	2.510.000.000	1.985.000.000	(525.000.000)	(20.92)
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	97.707.675.440	97.709.675.541	2.000.101	0.00
Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000	100.000.000	(3.100.000.000)	(96.88)
Belanja Langsung	602.708.542.375	667.454.076.398	64.745.534.023	10.74
Belanja Pegawai	80.915.816.000	87.211.966.482	6.296.150.482	7.78
Belanja Barang dan Jasa	252.558.773.918	307.351.874.810	54.793.100.892	21.70
Belanja Modal	269.233.952.457	272.890.235.106	3.656.282.649	1.36

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2016

C. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan daerah tahun 2016 sebelum perubahan sebesar Rp. (2.300.000.000,-) dan setelah perubahan sebesar Rp. 73.583.938.556 atau bertambah sebesar Rp. 75.883.938.556,- atau bertambah 3.299,30% persen. Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Banda Aceh setelah perubahan sebesar Rp. 129.110.140.556,- Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan daerah tahun 2016 setelah perubahan sebesar Rp. 55.526.202.000,-. Berikut rincian dari pembiayaan daerah tahun 2016 :

Tabel 3.15

Tabel Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2016

Uraian	Jumlah		Bertambah/(berkurang)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
PEMBIAYAAN DAERAH	(2.300.000.000)	73.583.938.556	75.883.938.556	3.299,30
Penerimaan Pembiayaan Daerah	4.000.000.000	129.110.140.556	125.110.140.556	3.127,75
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	4.000.000.000	129.110.140.556	125.110.140.556	3.127,75
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.000.000.000	129.110.140.556	125.110.140.556	3.127,75

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000	52.726.202.000	49.226.202.000	781,37
Pembayaran Pokok Utang	2.800.000.000	2.800.000.000	-	0.00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2016

D. Ringkasan Realisasi APBK TA. 2016

Pada tahun 2016 jumlah realisasi belanja daerah mencapai 95,88% atau sebesar Rp. 1.321.564.179.318,- dari jumlah belanja daerah Rp. 1.378.366.044.234,- setelah perubahan. Berikut rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota (APBK) Banda Aceh Tahun 2016 setelah perubahan :

Tabel 3.16

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2016

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
PENDAPATAN DAERAH	1.378.366.044.234	1.321.564.179.318	56.801.864.916	95,88
Pendapatan Asli Daerah	233.904.889.113	258.450.665.907	(24.545.776.794)	110,49
Pajak Daerah	53.085.000.000	68.859.556.607	(15.774.556.607)	129,72
Retribusi Daerah	26.592.979.646	21.557.377.273	5.035.602.374	81,06
Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	800.000.000	1.047.405.108	(247.405.108)	130,93
Zakat	18.504.500.000	19.481.191.339	(976.691.339)	105,28
Lain-lain PAD yang sah	134.922.409.467	147.505.135.580	(12.582.726.113)	109,33
Dana Perimbangan	872.914.356.000	801.801.081.470	71.113.274.530	91,85
Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak	31.808.946.000	30.872.881.523	936.064.477	97,06
Dana Alokasi Umum	602.292.108.000	602.292.108.000	-	100,00
Dana Alokasi Khusus	238.813.302.000	168.636.091.947	70.117.210.053	70,61
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	271.546.799.121	261.312.431.941	10.234.367.180	96,23
Pendapatan Hibah	49.226.202.000	49.226.200.582	1.418	100,00
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	28.376.893.121	14.618.341.524	13.758.551.597	51,51
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	60.864.119.000	60.764.119.000	-	100,00
Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	117.584.585.000	117.584.585.309	(309)	100,00
Pendapatan yang sah lainnya	15.495.000.000	19.019.185.526	(3.524.185.526)	122,74

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
BELANJA DAERAH	1.451.949.982.790	1.331.581.320.998	120.368.661.792	91,71
Belanja Tidak Langsung	784.495.906.392	693.936.591.720	90.559.314.672	88,46
Belanja Pegawai	652.360.465.298	564.003.037.058	88.327.428.240	86,46
Belanja Bunga	3.550.000.000	3.460.965.297	89.034.703	97,49
Belanja Hibah	28.790.765.553	27.793.273.935	997.691.618	96,54
Belanja Bantuan Sosial	1.985.000.000	1.705.020.000	279.980.000	85,90
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan /Desa	97.709.675.541	96.851.795.430	857.880.111	99,12
Belanja Tidak Terduga	100.000.000	92.500.000	7.500.000	92,50
Belanja Langsung	667.454.076.398	637.644.729.279	29.809.347.119	95,53
Belanja Pegawai	87.211.966.482	85.350.372.340	1.861.594.142	97,87
Belanja Barang dan Jasa	307.351.874.810	292.697.015.292	14.654.859.518	95,23
Belanja Modal	272.890.235.106	259.597.341.647	13.292.893.459	95,13
PEMBIAYAAN DAERAH	73.583.938.556	79.295.939.974	(5.712.001.418)	107,76
Penerimaan Pembiayaan Daerah	129.110.140.556	131.322.140.556	(2.212.000.000)	101,71
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	129.110.140.556	129.110.140.556	-	100,00
Penerimaan Piutang Daerah	-	2.212.000.000	(2.212.000.000)	-
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	55.526.202.000	52.026.200.582	3.500.001.418	93,70
Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	52.726.202.000	49.226.200.582	3.500.001.418	93,36
Pembayaran Pokok Utang	2.800.000.000	2.800.000.000	-	100,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh, 2016

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2016 capaian kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh adalah sebesar 103,74%. Secara umum, hal ini memperlihatkan pencapaian kinerja sangat baik atas sasaran-sasaran strategis. Capaian ini dihasilkan atas akumulasi hasil kinerja SKPD dalam memenuhi tanggungjawab pekerjaan yang direncanakan pada RPJMD Kota Banda Aceh tahun 2012 – 2017.

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016, tidak hanya menjelaskan capaian kinerja dengan penjelasan berbagai keberhasilan dan kekurangannya yang dihadapi, namun juga melihat capaian kinerja tahun 2013 - 2016 dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD periode 2012-2017. Selain itu, Pemerintah Kota Banda Aceh berupaya memastikan capaian kinerja sebagai prioritas pembangunan daerah. Upaya ini mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan sebagai bagian kebijakan strategis daerah dan pengembangan e-monev yang merupakan inovasi berbasis teknologi informasi untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/ kegiatan.

Dapat kami sampaikan juga bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016, telah berupaya untuk mengakomodasi rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB). Rekomendasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2015 tertuang dalam Surat MenpanRB nomor B/27/AA.05/2017 tanggal 17 Januari 2017 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Banda Aceh Tahun 2016 diharapkan memberi gambaran tentang berbagai capaian kinerja pada berbagai perspektif, sasaran strategis dan indikator keberhasilannya. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang diembannya dalam melayani masyarakat.

Pemerintah Kota Banda Aceh tentunya sadar bahwa laporan ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2016.

Banda Aceh, _____ Maret 2017 M

Jumadil Akhir 1438 H

WALIKOTA BANDA ACEH

Hi. ILLIZA SAÁDUDDIN DJAMAL. SE